



# Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





## ► Referensi Penerapan Tata Kelola Perusahaan

### References Of Corporate Governance Implementation



#### REFERENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan pada peraturan perundangan berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Piagam Komite
7. *Board Manual* Perseroan
8. Anggaran Dasar Perseroan.

#### REFERENCES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company is committed to implement Good Corporate Governance by adhering to the following laws and regulations

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2014 on Insurance.
3. OJK Regulation No.69/POJK.05/2016 on Implementation of Insurance Business, Sharia Insurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.
4. OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
5. OJK Regulation No. 43/POJK.05/2019 on Amendment to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
6. Committee Charter.
7. Company Board Manual.
8. Company's Article of Association.



## TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara menyeluruh memiliki tujuan utama untuk:

- Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organisasi Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
- Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan;
- Mengarahkan segenap perangkat Perseroan pada pencapaian visi dan misi Perseroan;
- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- Melaksanakan dan mengembangkan Nilai Perusahaan Perseroan;
- Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan.

## OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The company's commitment in implementing a comprehensive GCG has the following main objectives:

- To direct and control the work relations of the Company's organizations through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
- To improve the Company's Management accountability to the shareholders and all stakeholders;
- To direct all of the Company's resources in achieving the Company's vision and mission;
- To Improve the professionalism of Human Resources;
- Implement and develop the Company's Corporate Value;
- To improve the supervision and management functions of the Company.



Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) senantiasa di tingkatkan dan disesuaikan terhadap aturan yang ada maupun terhadap praktek-praktek yang ada.

The implementation of good corporate governance is always improved and conformed to the applicable rules and practices.



## ► Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik References Of Corporate Governance Implementation



### HASIL PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PERSEROAN TAHUN 2021

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan, Perusahaan telah melakukan Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) setiap tahun serta membuat Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam:

- Peraturan OJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
- Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

### THE COMPANY'S GCG ASSESSMENT RESULTS IN 2021

To monitor the implementation of Good Corporate Governance, the Company conducts self-assessment every year and prepares a report on the Implementation of Good Corporate Governance for Insurance Companies and Sharia Insurance Companies, as required under:

- OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies
- OJK Regulation No. 43/POJK.05/2019 on Amendment to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies
- OJK Circular Letter No. 17/SEOJK.05/2014 on the Report of the Implementation of Good Corporate Governance for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.
- OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Code of Corporate Governance Implementation for Public Companies; and
- OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Code of Corporate Governance for Public Companies.



## **PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi perusahaan perasuransian dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap aspek usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Di dalam Tata Kelola Perusahaan, PT Asuransi Bintang Tbk selalu menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan didalam menjalankan setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sebagai berikut:

1. **Transparansi**  
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
2. **Akuntabilitas**  
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
3. **Responsibilitas**  
Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
4. **Independensi**  
Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

## **THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES**

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for insurance companies and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Code of Corporate Governance for Public Companies, companies are required to apply Good Corporate Governance principles in all aspects of their business throughout all organization level.

In respect of Corporate Governance, PT Asuransi Bintang Tbk always implements Corporate Governance principles in carrying out every business activity at all levels of the organization, as explained below:

1. **Transparency**  
Openness in the process of making decision, revealing, and providing relevant information about the Company, which is easily accessed by Stakeholders in accordance with the laws and regulations on insurance, along with the standards, principles, and practices of healthy governance.
2. **Accountability**  
The clarity of function and accountability performance of the Company's organs that enables transparent, fair, effective, and efficient insurance business performance.
3. **Responsibility**  
The compliance of the management of the Company with the laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business governance.
4. **Independence**  
The state of independent and professional management of the Company which is free from conflict of interests and influences or pressures which are against the laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business governance.



## Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik

References Of Corporate Governance Implementation

### 5. Keadilan

Kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

### 5. Fairness

The equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders arising out of the agreement, laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of health Insurance Business governance.

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham/ <i>The Company's Relationship with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights</i>			
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Improve the Value of Performing the GMS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 1.1 Public Company has a means or technical procedures for voting either in open or closed ballots by upholding independency and interests of shareholders.	Perseroan memiliki prosedur teknis pengumpulan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tecantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan dibacakan kepada Pemegang saham pada tata tertib RUPS. The Company has means or technical procedures for voting either in open or closed ballots, as stated in the Company's Articles of Association, which is read to Shareholders as part of GMS rules.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	1.2 Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan 1.2 The Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies attend Annual General Meeting of Shareholders	Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. The Board of Directors and Board of Commissioners are held accountable to and shall report the implementation of their duties to shareholders through GMS.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3 Summary of GMS minutes is provided in the Website of Public Companies for at least 1 (one) year.	Perseroan menyediakan Ringkasan Risalah RUPS lebih dari 1 tahun dalam <i>website</i> Perseroan pada menu Tata Kelola. The Company provides a Summary of GMS minutes on the Company's website in the Governance section for 1 year	Telah diterapkan <i>Implemented</i>



**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improve the Quality of Public Company's Communication between Shareholders or Investors	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor 2.1 The Public Company has a communication policy with shareholders or investors	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan Investor melalui <i>Public Expose</i> , <i>website</i> Perseroan, dan email The Company has a communication policy with Investors, where communication shall be channeled through Public Expose, the Company's website, and e-mail address.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 2.2 The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	Perseroan menyediakan Laporan secara Berkala, Keterbukaan Informasi, Kinerja Perseroan dan Pelaksanaan Tata Kelola di website Perseroan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada setiap pemegang saham dan memberitahukan tata cara berkomunikasi dengan Perseroan melalui email Perseroan. The Company provides periodic reports, Information Disclosure, Company Performance and Implementation of Governance on the Company's website to provide complete information to each shareholder and inform communication with the Company procedures, which shall be made through Company email.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of Board of Commissioners			
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Strengthening the membership and composition of Board of Commissioners	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. 3.1 Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into consideration the condition of the Public Company.	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners consists of at least 3 members of Board of Commissioners, including President Commissioner and Independent Commissioner.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan 3.2 Determination of the Board of Commissioners composition takes into consideration its diversity in terms of skills, knowledge, and experience required.	Komposisi Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing anggota Komisaris memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Composition of members of the Board of Commissioners has met the needs of the Company; each Commissioner has education, experience, and competencies according to the Company's needs.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>





**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris  Improving the quality of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	4.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 4.1 Have self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance.	Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris tertuang pada Anggaran Dasar dan Board Manual Board of Commissioners Performance Evaluation Policy is set out in the Articles of Association and Board Manual.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan. 4.2 Self-assessment policy is disclosed through Annual report.	Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif dan diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan. Self-assessment is carried out by each member to assess the performance of the Board of Commissioners' performance collectively and is disclosed through the company's annual report.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	4.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3 Have a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial violation.	Kebijakan pengunduran diri anggota Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS. The resignation policy of Commissioners is stated in the Company's Articles of Association and ratified at the AGMS.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite Nominasi & Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. 4.4 The Board of Commissioners or the Nomination & Remuneration Committee prepares a succession policy in relation to nomination process of members of the Board of Directors.	Perusahaan memiliki Kebijakan suksesi yang tercermin dengan adanya training baik dalam tingkat kompetensi, <i>soft &amp; hard skill</i> maupun managerial terhadap karyawan yang kinerjanya dinilai sangat baik untuk kemudian disiapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Penilaian karyawan sampai ke jenjang Direksi dilakukan berdasarkan KPI setiap tahun. The company has a succession policy as reflected on training both at development of competency, soft & hard skills levels to the Managerial level for employees considered as having superior performance in order to prepare them to become future leaders. Employee assessment up to the Board of Directors level is done based on KPIs every year.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>



**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of Board of Directors			
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Strengthening membership and composition of Board of Directors	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5.1 Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Company and effectiveness of decision making.	Sesuai Anggaran Dasar; Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi termasuk Presiden Direktur serta Direktur Kepatuhan. In accordance with the Articles of Association, the company is managed and led by Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors, including President Director and Compliance Director.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2 Determination of composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Komposisi Direksi telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing Direksi memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Composition of members of the Board of Directors has met the needs of the Company; each Director has education, experience, and competencies according to the Company's needs.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance possesses expertise and or knowledge in the accounting field.	Perseroan memiliki Direktur yang membidangi akuntansi dan keuangan yang memiliki gelar Megister Manajemen dan juga sebagai wakil ketua dan ketua bidang keuangan, akuntansi & Perpajakan di AAUI. The Company has a Director in charge of accounting and finance who has a Master's degree in Management and also serves as Vice Chairman and Chairman of Finance, Accounting & Taxation at AAUI.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Improving the quality of implementation of duties and responsibilities of Board of Directors	6.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. 6.1 Have self-assessment policy to assess Board of Directors' performance.	Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi tertuang pada Anggaran dasar dan <i>Board Manual</i> . Board of Directors Performance Evaluation Policy is set out in the Articles of Association and Board Manual.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan. 6.2 The Self-assessment policy is disclosed through Annual report.	Penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal. Kebijakan penilaian ini diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment is carried out to assess the performance of the Board of Directors collectively. This selfassessment policy is disclosed through annual report of Public Company.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>



**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
	6.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3 Have a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial violation	Kebijakan pengunduran diri Direksi tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS. The resignation policy of Board of Directors is stated in the Company's Articles of Association and ratified at the AGMS.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
<b>Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement</b>			
Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan Improving corporate governance through stakeholders engagement	7.1 Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . 7.1 Have a policy to prevent insider trading.	Perusahaan telah memisahkan dengan tegas data/informasi yang sifatnya rahasia dengan yang bersifat publik. Perusahaan juga telah membagi pengelolaan data/informasi secara proporsional. The company has strictly separated between confidential and for public disclosure data/information. The company has also divided data / information management proportionally.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	7.2 Memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> . 7.2 Have anti-corruption and anti-fraud policies.	Kebijakan tentang Anti Korupsi dan Fraud dituangkan pada Kode etik & pedoman perilaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Karyawan. Anti-Corruption and Fraud Policies are set forth in the Code of Ethics & Code of Conduct and Joint Work Agreement with Employees.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	7.3 Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok. 7.3 Have a policy on selection and improvement of suppliers' capability.	Perusahaan memiliki Pedoman yang mengatur tentang seleksi dan evaluasi kinerja vendor. Ketidaksihinggaan dengan standar Perusahaan dikomunikasikan dengan vendor sebagai upaya peningkatan kemampuan vendor. The company has guidelines that govern the selection and evaluation of vendor performance. Any noncompliance with Company standards will be communicated with the vendor as part of vendors' capability improvement efforts	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	7.4 Memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4 Have a policy on the fulfillment of creditor rights.	Perusahaan memiliki Pedoman tentang Perlindungan Konsumen untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konsumen. The company has Guidelines on Consumer Protection to ensure the fulfillment of consumer rights.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>



**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Notes
	7.5 Memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . 7.5 Have a whistleblowing system policy	Perusahaan memiliki Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> yang dijelaskan penerapannya kepada seluruh perusahaan dan website perusahaan. The company has a Whistleblowing System Policy and its implementation is explained to all employees of the company and disclosed in company websites	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	7.6 Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6 Have a policy on long-term incentive provision to Board of Directors and employees.	Kebijakan pemberian insentif jangka Panjang dilaksanakan melalui kebijakan yang terdapat di HRD. Long-term incentive provision policy is implemented as part of HRD implementation.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
Keterbukaan Informasi Information Disclosure			
Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan Informasi Improving information disclosure implementation	8.1 Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. 8.1 Utilizing the use of information technology more broadly, in addition to website as information disclosure media.	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dengan penerapan digitalisasi pada proses bisnis dan penyajian informasi yang berguna untuk proses analisa dan pengambilan keputusan. Optimal use of Information Technology by applying digitalization on business processes and presenting information that is useful for the process of analysis and decision making.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>
	8.2 Laporan Tahunan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2 Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership of at least 5%, in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership through major and controlling shareholders.	Struktur Kepemilikan Saham Perseroan yang besarnya paling sedikit 5%; sampai dengan pemilik manfaat akhir telah disajikan pada Laporan Tahunan Perseroan. Company Share Ownership Structure of which amount is at least 5%; until the ultimate beneficial owner has been presented in the Company's Annual Report.	Telah diterapkan <i>Implemented</i>



**Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
References Of Corporate Governance Implementation





## ► Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Sebagai suatu Organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Asuransi Bintang Tbk selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2021 dengan keputusan sebagai berikut:

#### Keputusan Agenda Pertama dan Kedua

Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, *an independent member of Moore Stephens International Limited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00206/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.

As a Company Organ, General Meeting of Shareholders (GMS) has some powers, among others, to approve amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors, approve the Company's Annual Report, appoint external auditor, determine the use of the Company's net profit, approve determination of salary and allowances of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as provide other approvals in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

In holding a General Meeting of Shareholders, PT Asuransi Bintang Tbk always complies with the provisions stated in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as the Articles of Association of the Company.

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2021, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders convened on July 15th, 2021 with the following resolutions:

#### Resolutions of The First and Second Agenda

Receiving Report from the Board of Directors regarding the Company's activities for the fiscal year 2020 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2020, audited by Public Accountant Firm of Mirawati Sensi Idris, *an independent member of Moore Stephens International Limited* for the Fiscal Year ended on December 31st, 2020, as stated in report No. 00206/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2021 dated March 29th, 2021 that obtained unqualified opinion, and receiving Report of Supervision that has been carried out by the Company's Board of Commissioners.

Providing full responsibility exemption (*Acquit et de charge*) to the Board of Director and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2020, as long as such actions were not criminal acts and were reflected on the Company's Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements.



## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

### Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.183.415.200,- (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus Rupiah);
2. Sejumlah Rp3.483.864.720,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham;
3. Sejumlah Rp188.650.000,- dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 539 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020, atau Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per sertifikat;
4. Sisa laba bersih tahun 2020 adalah sebesar Rp18.812.374.080 (dibukukan sebagai sisa laba Perseroan).
5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp3.483.864.720,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

### Keputusan Agenda Keempat

Menyetujui:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/ atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000 per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Resolutions of The Third Agenda

Approving and deciding the appropriation of profit for Fiscal Year 2020:

1. For the reserve fund as referred to in article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company provides approximately 5% (five percent) of its net profit or at the amount of IDR1,183,415,200 (one billion one hundred eighty-three million four hundred fifteen thousand two hundred rupiah);
2. IDR3,483,864,720 was paid as cash dividends to be distributed to 348,386,472 shares issued by the Company or IDR10 (ten rupiah) per share;
3. IDR 188,650,000 was paid as dividend profit for 539 Profit Certificate issued by the Company up to December 31st, 2020 or IDR350,000 (three hundred fifty rupiah) per share;
4. The remaining of net profit in 2020 at the amount of IDR18,812,374,080 was recorded as the remaining profit of the Company.
5. Payment of cash dividends will be made on August 16, 2021 in the amount of IDR3,483,864,720, - to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on July 28, 2021 until 16.00 WIB.
6. For the payment of dividends, tax is imposed according to the applicable tax provisions. The Meeting authorizes the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividend.

### Resolutions of The Fourth Agenda

To approve:

1. Granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other benefits including bonuses/tantiem for members of the Company's Board of Directors.
2. To determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners of a maximum of IDR170.000.000 per month after deducting income tax and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of tantiem/bonus for all members of the Company's Board of Commissioners.



### Keputusan Agenda Kelima

1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Indris (MSI) dan Akuntan Publik Ahmad Syakir yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

### Resolutions of The Fifth Agenda

1. Firm Appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accountant (MSI) and Ahmad Syakir Public Accountant that will audit the Company's financial statements for Financial Year ending on December 31st, 2021 according to the Audit Committee's proposal and to grant authority and power to the Company's Board of Directors to do required actions regarding the appointment of the Public Accounting Firm;
2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint substitute Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority that by any cause could not complete the audit of the Company's Financial Statements for Financial Year ending on December 31st, 2021.

### Keputusan Agenda Keenam

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat.

### Resolutions of The Sixth Agenda

Approving the Company's Business Plan for 2021-2023 submitted by the Directors at the meeting

#### PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 2021 EXPLANATION ON AGMS RESOLUTIONS 2021

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
1.	Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 Receiving Report from the Board of Directors regarding the Company's activities for the fiscal year 2020 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2020.	Selesai Completed	Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 April 2021 Financial Statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) on April 30th, 2021.
2.	Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( <i>Acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 Providing full release and discharge ( <i>Acquit et de charge</i> ) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2020.	Selesai Completed	





**Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders

**PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 2021**  
**EXPLANATION ON AGMS RESOLUTIONS 2021**

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
3.	<p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2020. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</p> <p>Approving and deciding the appropriation of profit for Fiscal Year 2020. As recorded in the Company's Consolidated Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2020.</p>	Selesai Completed	<p>Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 26 Juli 2021;</li> <li>• Ex Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 27 Juli 2021;</li> <li>• Cum Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 28 Juli 2021;</li> <li>• Ex Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 29 Juli 2021;</li> <li>• Tanggal pencatatan pada tanggal 28 Juli 2021; dan</li> <li>• Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 16 Agustus 2021.</li> </ul> <p>Schedule of cash dividends payment implementation is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum Dividend for trading in the Regular and Negotiation Markets was on July 26nd, 2021</li> <li>• Ex Dividend for trading in the Regular and Negotiation Market was on July 27rd, 2021;</li> <li>• Cum Dividend for trading on the Cash Market was on July 28th, 2021;</li> <li>• Ex Dividend for trading on the Cash Market was on July 29th, 2021;</li> <li>• Date of recording was on July 28th, 2021; and</li> <li>• Date of Dividend Payment was on August 16th, 2021.</li> </ul>
4.	<p>Penentuan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>Determining the amount of salary and/ or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	Selesai Completed	<p>RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/ bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/ bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>AGMS granted power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances, including tantiem/ bonus for all members of the Company's Board of Directors and determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners to a maximum of IDR170,000,000 per month after deducting income tax and granted power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of tantiem/ bonus for all members of the Company's Board of Commissioners.</p>



**PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 2021**  
**EXPLANATION ON AGMS RESOLUTIONS 2021**

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
5.	Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2021 Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2021	Selesai <i>Completed</i>	RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. AGMS granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on December 31st, 2021 according to the Audit Committee's proposal and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.
6.	Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 Approving the Company's Business Plan for 2021-2023	Selesai <i>Completed</i>	RUPST telah menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 AGMS approved the Company's Business Plan for 2021-2023

**PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 1 (SATU) TAHUN SEBELUMNYA**

Selama tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan yang telah direalisasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**EXPLANATION ON RESOLUTION OF THE PREVIOUS YEAR'S AGMS**

During 2020, the Company held two meetings which were Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provision's applicable Regulations.



**Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2020.

Annual General Meeting of Shareholders convened on July 14, 2020.

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
1.	<p>Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019</p> <p>Receiving Report from the Board of Directors regarding the Company's activities for the fiscal year 2019 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2019.</p>	Selesai <i>Completed</i>	<p>Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 April 2020</p> <p>Financial Statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) on April 13, 2020.</p>
2.	<p>Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Aquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019</p> <p>Providing full release and discharge (<i>Aquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2019.</p>	Selesai <i>Completed</i>	
3.	<p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2019. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</p> <p>Approving and deciding the appropriation of profit for Fiscal Year 2019. As recorded in the Company's Consolidated Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2019.</p>	Selesai <i>Completed</i>	<p>Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cum</i> Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 22 Juli 2020</li> <li>• <i>Ex</i> Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 23 Juli 2020</li> <li>• <i>Cum</i> Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 24 Juli 2020</li> <li>• <i>Ex</i> Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 27 Juli 2020:</li> <li>• Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 24 Juli 2020</li> <li>• Pelaksanaan Pembayaran Dividen 12 Agustus 2020.</li> </ul> <p>Schedule of cash dividends payment implementation is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cum</i> Dividend for trading in the Regular and Negotiation Markets was on July 22, 2020;</li> <li>• <i>Ex</i> Dividend for trading in the Regular and Negotiation Market was on July 23, 2020;</li> <li>• <i>Cum</i> Dividend for trading on the Cash Market was on July 24, 2020;</li> <li>• <i>Ex</i> Dividend for trading on the Cash Market was on July 27, 2020;</li> <li>• Deadline for recording in the Shareholders Register (recording date) was on July 24, 2020;</li> <li>• Implementation of Dividend Payment was on August 12, 2020.</li> </ul>



**Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
4.	<p>Penentuan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>Determining the amount of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	<p>Selesai <i>Completed</i></p>	<p>RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>AGMS granted power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances, including tantiem/bonus for all members of the Company's Board of Directors and determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners to a maximum of IDR170,000,000 per month after deducting income tax and granted power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of tantiem/bonus for all members of the Company's Board of Commissioners.</p>
5.	<p>Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2020</p> <p>Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2020</p>	<p>Selesai <i>Completed</i></p>	<p>RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>AGMS granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on December 31, 2020 according to the Audit Committee's proposal and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.</p>
6.	<p>Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2020-2022 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014</p> <p>Approving the Company's Business Plan for 2020-2022 to comply with OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2014.</p>	<p>Selesai <i>Completed</i></p>	<p>RUPST telah menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2020-2022 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014</p> <p>AGMS approved the Company's Business Plan for 2019-2021 to comply with OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2014.</p>



**Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

NO	Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Status	Realisasi Realization
1.	<p>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha guna memenuhi Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 tahun 2017.</p> <p>Approving the amendment to the Articles of Association of the Company on Article 3 regarding the Purposes and Objectives and business activities in order to comply with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services and with Regulation of Chairman of Statistics Indonesia No. 19 of 2017.</p>	<p>Selesai <i>Completed</i></p>	<p>Merubah AD Perseroan menjadi: Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Non Jiwa Konvensional (65121)</li> <li>• Asuransi Non Jiwa Syariah (65122)</li> </ul> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Non Jiwa Konvensional (65121) Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/ milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.</li> <li>• Asuransi Non Jiwa Syariah (65122) Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/ milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.</li> </ul> <p>Amending the Company's Articles of Association to: The Company's Purposes and Objectives are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conventional Non-Life Insurance (65121)</li> <li>• Sharia Non-Life Insurance (65122)</li> </ul> <p>To achieve the purposes and objectives above, the Company can carry out the following business activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conventional Non-Life Insurance (65121) This group includes insurance business that specifically insures the risk of loss, loss of property/ownership, including legal liability to third parties that may occur against property/ ownership of the insured for certain reasons with an insurance value of which the amount has been determined and agreed upon by both parties as stated in the agreement. Provisions of insurance services other than life insurance, such as accident and fire insurance, health insurance, travel insurance, property insurance, transportation insurance, motor vehicles, marine and aviation, and liability and financial loss insurance.</li> </ul>



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

NO	Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Status	Realisasi Realization
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sharia Non-Life Insurance (65122) This group includes sharia insurance business that specifically insures the risk of loss, loss of property/ownership, including legal liability to third parties that may occur against property/ownership of the insured for certain reasons with an insurance value of which the amount has been determined and agreed upon by both parties as stated in the agreement. Provisions of insurance services other than life insurance, such as accident and fire insurance, health insurance, travel insurance, property insurance, transportation insurance, motor vehicles, marine and aviation, and liability and financial loss insurance.</li> </ul>
2.	<p>Menyetujui Pengunduran diri Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>Approving the resignation of Mr. Zafar Dinesh Idham as a Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting.</p>	Selesai Completed	<p>Maka susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto - Presiden Komisaris</li> <li>Bapak Petronius Saragih - Komisaris</li> <li>Bapak Krishna Suparto - Komisaris Independen</li> <li>Bapak Ronald Waas - Komisaris Independen</li> </ul> <p>Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2022 is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto - President Commissioner</li> <li>Bapak Petronius Saragih - Commissioner</li> <li>Bapak Krishna Suparto - Commissioner</li> <li>Bapak Ronald Waas - Independent Commissioner</li> </ul>
3.	<p>Menyetujui untuk mengangkat Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan dengan ketentuan pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Direksi lainnya.</p> <p>Approving to appoint Mr. Zafar Dinesh Idham as Compliance Director of the Company provided that the appointment is for the remaining term of office of the other Directors</p>	Selesai Completed	<p>Maka susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak Hastanto Sri Margi Widodo - Presiden Direktur</li> <li>Ibu Reniwati Darmakusumah - Direktur</li> <li>Bapak Jenry Cardo Manurung - Direktur</li> <li>Bapak Zafar Dinesh Idham - Direktur Kepatuhan</li> </ul> <p>Thus, the composition of the Company's Board of Directors starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024 is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak Hastanto Sri Margi Widodo - President Director</li> <li>Ibu Reniwati Darmakusumah - Director</li> <li>Bapak Jenry Cardo Manurung - Director</li> <li>Bapak Zafar Dinesh Idham - Director Compliance</li> </ul>



## Dewan Komisaris

### Board Of Commissioners

Dewan Komisaris adalah bagian dari organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hasil Pengawasan dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

#### PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan seorang calon Dewan Komisaris dan pemberhentian setiap anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham melalui RUPS. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat saat ini adalah untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS.

#### PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite- komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

The Board of Commissioners is a part of the Company's organ which is in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Company's Articles of Association and providing recommendation and advice on policies taken the Board of Directors to the Board of Directors and ensuring that the Company implements good corporate governance across all levels in the organization. Supervision results and insights of the Board of Commissioners are reported at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) as part of the Board of Directors' performance assessment.

#### PROCEDURE FOR APPOINTMENT AND TERMINATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Appointment procedure of Commissioner candidates and termination of each member of the Board of Commissioners is carried out based on Shareholders' resolution through GMS. Current term of office of each member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, without prejudice to the right of the GMS to terminate members of the Board of Commissioners at any time after the member of the Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself, unless the member concerned does not object to the termination. Such termination is effective from the closing of the GMS which decides the termination, unless the date of termination is determined otherwise by the GMS.

#### WORK GUIDELINES OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has work guidelines incorporated in the Articles of Association and Board Manual governing the overall composition and requirements of the Commissioner; independence of the Commissioner; code of ethics; duties and obligations and rights and authority; stipulation of Company management policies by the Commissioner; relationship with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and division of duties among Commissioners; meeting procedures and policies; relationship among members of the Board of Directors; supporting organs and Committees under the Board of Commissioners; and the relationship with the capital market profession and the use of professionals.



## **KRITERIA    PERSYARATAN    ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite- komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

1. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
2. Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi.
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan perasuransian dan pemegang polis.
7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan Pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
9. Cakap melakukan perbuatan hukum.
10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama

## **REQUIREMENT CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners has work guidelines incorporated in the Articles of Association and Board Manual governing the overall composition and requirements of the Commissioner; independence of the Commissioner; code of ethics; duties and obligations and rights and authority; stipulation of Company management policies by the Commissioner; relationship with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and division of duties among Commissioners; meeting procedures and policies; relationship among members of the Board of Directors; supporting organs and Committees under the Board of Commissioners; and the relationship with the capital market profession and the use of professionals.

1. Declared to have passed the fit and proper test;
2. Have knowledge according to business field of the company that is relevant to their positions;
3. Capable of acting in good faith, honest and professional;
4. Capable of acting in the interests of Insurance Companies and policy holders, insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Prioritize the interests of the Insurance Company and policyholders, the insured, participants, and/or beneficiaries over their personal interests;
6. Capable of making decisions based on independent and objective assessments for the interest of the Insurance Company and policyholders.
7. Capable of avoiding misuse of authority to obtain undue personal gain or advantage that may jeopardize the Insurance Company.
8. Have good morals and integrity.
9. Capable of doing legal actions.
10. Never been declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt, never been convicted of any criminal act that has caused losses to the Country's finance and/or related to the financial sector, never become a member of Board of Directors and/or board of commissioners who failed to





**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/ atau anggota dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Kebijakan Umum
  - a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
  - b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
  - c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - e. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - f. Membentuk Komite yang akan membantu pelaksanaan Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan komite lainnya;
  - g. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau yang berhak mendapatkan manfaat;
  - h. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

hold a GMS during their term of office, whose report of responsibility as members of board of directors and/or board of commissioners were rejected by GMS or who once failed to report their responsibility as members of board of directors and/or board of commissioners to the GMS; who once caused the Company that has obtained license, approval or registration from the Financial Services Authority failed to fulfill the obligation to submit annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.

11. Have a commitment to comply with laws and regulations.
12. Have knowledge and/or expertise in the fields needed by the Company.

**DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS:**

1. General Policy
  - a. Ensure effective, precise and fast decision making and independent act, unbiased of anything that can interfere his/her ability to carry out tasks independently and critically;
  - b. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors;
  - c. Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties, in particular the interests of policyholders, the insured, participants and/or parties entitled to benefit;
  - d. Compile a report on the activities of the Board of Commissioners, which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance;
  - e. Monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance;
  - f. Establish a Committee that will assist the implementation of the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Corporate Governance Policy Committee and other committees;
  - g. Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties, especially the interests of policyholders, the insured, participants and/or those entitled to benefits;
  - h. Supervise the interests of the Company by taking into account the interests of the shareholders and being responsible to the General Meeting of Shareholders;



- i. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - l. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - m. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan
2. Terkait dengan RUPS
- a. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan aktivitas dan kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS;
  - b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS;
  - c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis;
  - d. Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- i. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in running the Company including the Company's Development Plan, Implementation of the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and the decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as the prevailing laws and regulations;
  - j. Perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the prevailing laws and regulations;
  - k. Supervision for the interest of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the General Meeting of Shareholders;
  - l. Supervision of the Company's management policies carried out by the Board of Directors, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business as well as providing advice to the Board of Directors in running the Company including the Company Development Plan, Implementation of the Company's Work Plan and Budget, provisions of the articles of association and decisions General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations;
  - m. Duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the articles of association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the prevailing laws and regulations;
  - n. Researching and reviewing the annual report prepared by the Board of Directors and signing the annual report
2. Related to GMS
- a. Report and account for the activities and performance of the Board of Commissioners to the GMS;
  - b. Reporting the performance of the Board of Directors to the GMS;
  - c. Supervise the implementation of the Business Plan;
  - d. Provide opinions and suggestions for the GMS in terms of the appointment and dismissal of the Board of Directors;



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

- e. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai dengan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - f. Mengusulkan penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS.
3. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko
    - a. Membentuk Komite Pemantau Risiko;
    - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
    - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
    - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
  4. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
    - a. Mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku secara *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*;
    - b. Bertanggung-jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
    - c. Memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dalam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan *best practice*.
  5. Terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan / Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
  6. Terkait dengan Kegiatan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung-jawab Direksi terhadap penerapan APU & PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Komisaris.
  7. Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen
    - a. Menyampaikan atau menyuarakan kepentingan pemegang polis;
- e. In the event that the Company shows signs of a significant setback, immediately report it to the GMS accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken;
  - f. Propose the appointment of an External Auditor to the GMS.
3. Related to Risk Management
    - a. Establish a Risk Monitoring Committee;
    - b. Evaluating Risk Management policies;
    - c. Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies;
    - d. Evaluate and decide on applications from the Board of Directors related to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
  4. Related to Information Disclosure and Confidentiality
    - a. Supervise that the Company discloses important information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in an accurate, reliable, timely, consistent and useful manner;
    - b. Responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information;
    - c. Ensure that the Company discloses the implementation of GCG principles in the Annual Report that is adjusted to best practice.
  5. Related to the Implementation of Supervision / Providing Advice by the Board of Commissioners Supervision and providing advice is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and is not intended for the interests of certain parties or groups.
  6. Related to Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorist Financing (PPT) Activities Supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the implementation of AML&CFT and ensure that there are discussions related to Money Laundering and Terrorism Financing at the Board of Directors and Commissioners' meetings.
  7. Duties and Responsibilities of Independent Commissioners
    - a. To convey or voice the interests of the policyholder;



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li> <li>c. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan. Laporan tahunan tersebut menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;</li> <li>d. Laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Performing a supervisory function to voice the interests of policyholders, the insured, participants and/or parties entitled to benefit;</li> <li>c. The Independent Commissioner is required to make an annual report regarding the implementation of his duties related to the protection of the interests of policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to benefits, both regarding services and settlement of claims, including reports on disputes that are in the process of being resolved at the agency, mediation, arbitration or judicial bodies. The annual report becomes part of the report of the Board of Commissioners and is included in the Report on the implementation of Good Corporate Governance;</li> <li>d. Annual reports regarding the implementation of their duties related to the protection of the interests of policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to benefits, both concerning services and settlement of claims, including reports on disputes that are in the process of being resolved at the mediation agency, arbitration body or judicial body.</li> </ul> |
|---|--|

Jika terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

If there are policies or actions of members of the Board of Directors that are detrimental or have the potential to harm the interests of the policyholder, the insured, participants, and/or parties entitled to benefit, the Independent Commissioner is required to propose the holding of a Meeting of the Board of Commissioners.

## **KOMPOSISI KOMISARIS**

## **BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION**

PT Asuransi Bintang Tbk selama tahun 2021 tidak mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris.

During 2021 PT Asuransi Bintang Tbk did not change the composition of the Board of Commissioners.

Berikut ini merupakan susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2021:

The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31st, 2021:



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Uji Kemampuan dan Kepatutan</b> Fit and Proper Test	<b>Tanggal Pengangkatan oleh RUPS</b> Appointment Date by GMS
Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	KEP-318/BL/2007 Tanggal 10 September 2007 Dated September 10, 2007	17 April 2008 April 17, 2008
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	KEP-34/BL/2010 Tanggal 22 Februari 2010 Dated February 22, 2010	17 Juni 2009 June 17, 2009
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-477/NB.1/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Dated August 28, 2013	25 Juni 2013 June 25, 2013
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-257/NB.11/2016 Tanggal 15 April 2016 Dated April 15, 2016	1 Juni 2016 June 1, 2016
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-621/NB.11/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Dated June 29, 2018	26 Juni 2018 June 26, 2018

**RAPAT KOMISARIS**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut ini rincian tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris:

**BOARD OF COMMISSIONERS MEETING**

In accordance with OJK Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Articles of Association of the Company, it is stated that members of the Board of Commissioners must hold periodical Board of Commissioners Meetings at least once a month.

The following is the details of the attendance of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners Meeting:

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Kehadiran</b> Attendance	<b>%</b>
Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	12	100
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	10	83,3
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	100
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	100
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	100



No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	17 Februari 2021 February 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Operasional</li> <li>• Persetujuan Ulang Penjualan Tanah Sawangan</li> <li>• Produksi Tahun 2020 &amp; Januari 2021</li> <li>• Kinerja Desember 2020</li> <li>• <i>Progress Report ISO 9001 : 2015</i></li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Operational Update</li> <li>• Re-Approval of Sawangan Land Sales</li> <li>• 2020 &amp; January 2021 Production</li> <li>• December 2020 Performance – Estimated Unaudited</li> <li>• Progress Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Others</li> </ul>
2.	17 Maret 2021 March 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk</li> <li>• Penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2013</li> <li>• Penyerahan Beasiswa oleh Komisaris &amp; Direksi</li> <li>• Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk</li> <li>• Presentation of ISO 9001:2013 certificate</li> <li>• Scholarship Presentation by Commissioners &amp; Directors</li> </ul>
3.	7 Mei 2021 May 7, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Strategi</li> <li>• Kinerja Tahun Buku 2020</li> <li>• Kinerja Triwulan I Tahun 2021</li> <li>• Rencana RUPS Tahun Buku 2020</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Strategic Update</li> <li>• Work Performance Year 2020</li> <li>• Performance for the First Quarter of 2021</li> <li>• RUPS Plan for 2020 Fiscal Year</li> <li>• Others</li> </ul>
4.	17 Juni 2021 June 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</li> <li>• Rencana Pembagian Dividen, Gaji Direksi &amp; Dewan Komisaris, Penunjukkan KAP &amp; AP</li> <li>• Usulan Penambahan Direktur</li> <li>• Kinerja Mei 2021</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>• Dividend Distribution Plan, Salary of Directors &amp; Board of Commissioners, Appointment of KAP &amp; AP</li> <li>• Suggestion for Adding Director</li> <li>• May 2020 Performance – Summary</li> <li>• Others</li> </ul>
5.	17 Juni 2021 June 17, 2021	Penentuan akuntan publik dan kantor akuntan publik Tahun Buku 2022 Determination of public accountants and public accounting firms for Fiscal Year 2022
6.	17 Juni 2021 June 17, 2021	Penentuan Gaji dan atau Tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020 Determination of Salary and or other Benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2020
7.	17 Juni 2021 June 17, 2021	Penunjukkan ketua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 Appointment of chairman of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
8.	20 Agustus 2021 August 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Strategi</li> <li>• Kinerja Juli 2021</li> <li>• Lain – lain</li> <li>• Strategic update</li> <li>• July 2020 Performance</li> <li>• Others</li> </ul>



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	22 Oktober 2021 October 22, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operational Update</li> <li>• Kinerja September 2020</li> <li>• Audit Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Operational Update</li> <li>• Performance in September 2020 – Summary</li> <li>• Audit Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Others</li> </ul>
10	24 November 2021 November 24, 2021	Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Bintang Tbk – hari pertama National Working Meeting PT Asuransi Bintang Tbk – Day 1
11	25 November 2021 November 25, 2021	Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Bintang Tbk – hari kedua National Working Meeting PT Asuransi Bintang Tbk – Day 2
12	28 Desember 2021 December 28, 2021	Public Expose PT Asuransi Bintang Tbk

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN &  
PENDOKUMENTASIAN HASIL RAPAT  
DEWAN KOMISARIS**

Pengambilan keputusan yang dilakukan selama Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai yang tercantum dalam POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan, sebagai berikut :

- a. Rapat Dewan Komisaris untuk menyetujui permasalahan- permasalahan adalah sah dan mengikat jika kuorum terpenuhi berdasarkan anggaran dasar Perusahaan.
- b. Keputusan-keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, keputusan diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dalam hal pendokumentasian hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut (jika ada). Setiap anggota komisaris

**RESOLUTION MAKING & DOCUMENTATION  
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS'  
MINUTES OF MEETING**

Resolutions made during the Board of Commissioners' Meeting have been carried out according to those set out in POJK Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and Articles of Association Company, as follows:

- a. The Board of Commissioners' meeting resolution to approve issues is valid and binding if the quorum is fulfilled in accordance with the Company's articles of association.
- b. Resolutions are made through discussion to reach consensus. In the event that the discussion does not reach an agreement, the resolution is made by affirmative votes of more than 1/2 (half) of the number of votes at the Meeting.
- c. Dissenting opinions occurring in the resolution of the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the Board of Commissioners minutes of meeting along with the corresponding reasons thereof.

In the case of documenting the resolutions of the Board of Commissioners Meeting, the resolutions must be stated in the minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners. Minutes of meetings must contain all the issues discussed, including the evaluation of the implementation of the resolutions of the previous meeting and stating the dissenting opinions on what was decided at the Board of Commissioners meeting (if any). Each commissioner

berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris dan Risalah rapat asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus didokumentasikan dengan baik.

## RANGKAP JABATAN

Sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain dan sesuai dengan Peraturan OJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan perasuransian menyatakan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.

Sepanjang tahun 2021, rangkap jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan atau instansi lain adalah sebagai berikut :

has the right to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners' meeting, and the original minutes of each meeting of the Board of Commissioners must be well documented.

## CONCURRENT POSITIONS

As regulated in the Financial Services Authority regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of issuers or public companies, members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as members of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) Issuers or other Public Companies that are members of the Board of Commissioners. at most 2 (two) Issuers or other Public Companies and in accordance with OJK Regulation No.73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, states that the Board of Commissioners of an Insurance Company is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, member of The Board of Directors, or members of the Sharia Supervisory Board in an Insurance Company that has the same line of business.

Throughout 2021, the concurrent positions of the Board of Commissioners in other companies or agencies are as follows:

No	Nama Name	Posisi di Perusahaan <i>Position at the Company</i>	Posisi di Perusahaan Lain <i>Position at Other Companies</i>	Nama Perusahaan Lain Dimaksud <i>The Name of the Other Companies</i>	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>
1.	Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	Direktur Utama President Director	PT. Ngrumat Bondo Utomo	Shipping, transportation, information and technology, finance, media, engineering and construction, and leisure.
			Komisaris Utama President Commissioner	PT. Samudera Indonesia Tbk	Shipping, transportation.
			Komisaris Utama President Commissioner	PT. Samudera Indonesia Tangguh	Shipping, transportation.
			Komisaris Commissioner	PT. Inter Pariwara Global	Media Buying Agency & Advertising
			Direktur Utama President Director	PT. NBU Indonesia Utama	Holding
			Direktur Utama President Director	PT. NBU Investama Indonesia	





**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

No	Nama Name	Posisi di Perusahaan <i>Position at the Company</i>	Posisi di Perusahaan Lain <i>Position at Other Companies</i>	Nama Perusahaan Lain Dimaksud <i>The Name of the Other Companies</i>	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>
2.	Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	PT. Dajawak Lima Saudara	Perkebunan Plantation
			Direktur Utama President Director	PT. Warisan Kasih Bunda	Perdagangan, pembangunan, Jasa, Pertanian, Percetakan, perindustrian dan pengangkutan darat Trading, construction, services, agriculture, printing, industry, and land transportation
3.	Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Commissioner	PT. Salemba Emban Patria	Penerbitan Buku Book publishing
4.	Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	PT. Asuransi Jiwa Sequis Life	Asuransi Jiwa Life Insurance
			Komisaris Independen Independent Commissioner	PT. HSBC Sekuritas Indonesia	Securitas Securities
5	Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	Menara telekomunikasi seluler, multimedia, penyedia layanan internet dan portal Cellular telecommunication tower, multimedia, internet service provider and portal
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Advance Intelligence Indonesia	Teknologi Informasi Information Technology
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Warung Dana Nusantara	Teknologi Informasi Information Technology
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Digital Kas Nusantara	Teknologi Informasi Information Technology
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Pasar Modal Capital market
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Berdikari Manajemen Investasi	Manajemen Investasi Investment management
			Komisaris Commissioner	PT Gojek Indonesia	Teknologi angkutan jasa Service transport technology
			Komisaris Commissioner	PT Solusi Pasti Indonesia	Teknologi Keuangan Financial Technology
			Komisaris Commissioner	PT Kredit biro Indonesia Jaya	Biro penilaian dan informasi kredit swasta Assessment and private credit information bureau



## PELATIHAN DAN/PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pelatihan dan/Peningkatan Kompetensi dapat dilihat dalam bagian Bab Profil Perusahaan.

## PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG BARU DIANGKAT

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan Dewan Komisaris maka tidak terdapat program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

## INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan OJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan perasuransian menyatakan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

## TRAINING AND/COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Training and/or Competency Improvement can be seen in the Company Profile Chapter.

## ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2021 there are no changes to the Board of Commissioners, so there is no orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners.

## INDEPENDENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, it is stated that the Board of Commissioners of an Insurance Company must guarantee effective, appropriate and fast decision making and shall act independently, does not have an interest that may interfere his capability of carrying out task independently and critically.

Kriteria Independensi Independency Criteria	SLP	PS	CDD	KS	RW
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have financial relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have management relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have share ownership relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Director, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√

**Keterangan | Remarks:**

SLP : Shanti L. Poesposoetjipto  
PS : Petronius Saragih  
CDD : Chaerul D. Djakman  
KS : Krishna Suparto  
RW : Ronald Waas



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

### **Kebijakan Emiten Tentang Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris**

Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan KPI yang telah ditetapkan oleh RUPS. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemberian insentif bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Rapat Gabungan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Komisaris menggunakan mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi (Rapat Gabungan). Dalam Rapat Gabungan tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan membahas agenda-agenda yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

### **Policy Of Issuers On Assessment On Performance Of Members Of Board Of Directors And Board Of Commissioners**

Performance of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is evaluated by the Shareholders at the GMS. The performance evaluation of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is based on the KPI determined by the GMS. Performance Achievement Indicators are a measure of the evaluation of the success of the duties and responsibilities of supervision and provision of advice by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the laws and regulations and/or the Articles of Association of the company.

The evaluation result of the individual performance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the performance of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners is an integral part of intensification for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

### **The results of the performance evaluation are a means of assessing and increasing the effectiveness of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.**

The results of the performance evaluation of each Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners individually are one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the relevant Members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The results of the performance evaluation are a means of assessing and increasing the effectiveness of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

### **Joint Meeting of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners uses the mechanism of the Board of Commissioners Meeting which includes the Board of Directors (Joint Meeting). In the Joint Meeting, the Board of Commissioners provides recommendations to the Board of Directors in accordance with the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners. During 2021, 9 (nine) Joint Meetings have been held to discuss the agendas in accordance with the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	9	100
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	8	100
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	100
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	100
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	100
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	9	100
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	9	100
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	9	100
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	9	100

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 Februari 2021 February 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Operasional</li> <li>• Persetujuan Ulang Penjualan Tanah Sawangan</li> <li>• Produksi Tahun 2020 &amp; Januari 2021</li> <li>• Kinerja Desember 2020</li> <li>• Progress Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Operational Update</li> <li>• Re-Approval of Sawangan Land Sales</li> <li>• 2020 &amp; January 2021 Production</li> <li>• December 2020 Performance – Estimated Unaudited</li> <li>• Progress Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Others</li> </ul>
2	17 Maret 2021 March 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk</li> <li>• Penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2013</li> <li>• Penyerahan Beasiswa oleh Komisaris &amp; Direksi</li> <li>• Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk</li> <li>• Presentation of ISO 9001:2013 certificate</li> <li>• Scholarship Presentation by Commissioners &amp; Directors</li> </ul>
3	7 Mei 2021 May 7, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Strategi</li> <li>• Kinerja Tahun Buku 2020 – Audited</li> <li>• Kinerja Triwulan I Tahun 2021</li> <li>• Rencana RUPS Tahun Buku 2020</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Strategic Update</li> <li>• Work Performance Year 2020 – Audited</li> <li>• Performance for the First Quarter of 2021</li> <li>• 2020 Fiscal Year GMS Plan</li> <li>• Others</li> </ul>



**Dewan Komisaris**  
Board Of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4	17 Juni 2021 June 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</li> <li>• Rencana Pembagian Dividen, Gaji Direksi &amp; Dewan Komisaris, Penunjukkan KAP &amp; AP Usulan Penambahan Direktur</li> <li>• Kinerja Mei 2021</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>• Dividend Distribution Plan, Salary of Directors &amp; Board of Commissioners, Appointment of KAP &amp; AP Suggestion for Adding Director</li> <li>• May 2021 Performance – Summary</li> <li>• Others</li> </ul>
5	20 Agustus 2021 August 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Strategi</li> <li>• Kinerja Juli 2021</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Strategic update</li> <li>• July 2021 Performance</li> <li>• Others</li> </ul>
6	22 Oktober 2021 October 22, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Operasional</li> <li>• Kinerja September 2021</li> <li>• Audit Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Lain-lain</li> <li>• Operational Update</li> <li>• September 2021 Performance – Summary</li> <li>• Audit Report ISO 9001 : 2015</li> <li>• Others</li> </ul>
7	24 November 2021 November 24, 2021	Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Bintang Tbk – hari pertama PT Asuransi Bintang Tbk National Working Meeting – day 1
8	25 November 2021 November 25, 2021	Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Bintang Tbk – hari kedua PT Asuransi Bintang Tbk National Working Meeting – day 2
9	28 Desember 2021 December 28, 2021	Public Expose PT Asuransi Bintang Tbk



## Direksi

### Board Of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

#### KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. Anggota direksi ditunjuk masing-masing untuk suatu masa jabatan 5 (lima) tahun yang berlaku sejak penutupan rapat penunjukan mereka oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentianannya ditentukan lain oleh RUPS.

Adapun dasar acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT Asuransi Bintang Tbk adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar PT Asuransi Bintang Tbk.
- Board Manual

#### PEDOMAN KERJA ANGGOTA DIREKSI

Direksi memiliki acuan dan pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman kerja Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur tentang:

- Keseluruhan komposisi dan persyaratan Direksi;

The Board of Directors is an organ of the Company that has the authority and is fully responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions in the Articles of Association.

#### CRITERIA AND PROCEDURE FOR APPOINTING AND TERMINATING THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company, the appointment and termination of members of the Board of Directors are carried out through GMS. Each member of the board of directors is appointed for a 5 (five) year term effective from the closing of their appointment at the GMS meeting without prejudice to the right of the GMS to terminate members of the Board of Directors at any time after the member of the Board of Directors is given the opportunity to defend himself, unless those concerned do not object to the termination. The termination is effective from the closing of the Meeting which decides the termination, unless determined otherwise by the GMS.

The basis of reference in the appointment and termination of members of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk are as follows:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Regulation of the Financial Services Authority Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- OJK Regulation No. 43/POJK.05/2019 on Amendment to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Articles of Association of PT Asuransi Bintang Tbk.
- Board Manual

#### WORK GUIDELINES OF DIRECTORS

The Board of Directors has work guidelines and references that bind each member of the Board of Directors. The Board of Directors' work guidelines are set out in the Articles of Association and Board Manual that govern:

- The overall composition and requirements of the Board of Directors;



## Direksi

Board Of Directors

- Independensi Direksi;
- Etika jabatan;
- Tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang;
- Hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi;
- Pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Direksi;
- Prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Dewan Komisaris;
- Organ pendukung dan Komite-komite di bawah Direksi; dan
- Hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

Adapun landasan atau pedoman yang digunakan dalam anggaran dasar dan Board Manual terkait pedoman kerja Direksi adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03 /2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05 /2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

### PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa kriteria Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Telah mendapatkan persetujuan dari OJK;
2. Berdomisili di Indonesia;
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

- Independence of the Board of Directors;
- Code of ethics;
- Duties and obligations and rights and authority;
- Relationship with subsidiaries and affiliated companies;
- Delegation of authority and division of duties among Directors;
- Meeting procedures and policies; Relationship with the Board of Commissioners;
- Supporting organs and Committees under the Board of Directors; and
- The relationship with the capital market profession and the use of professionals.

Basis or reference used in the articles of association and Board Manual related to the work guidelines of the Board of Directors are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance.
3. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
4. Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.

### REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Articles of Association of the Company, it is stated that the criteria for the Members of the Board of Directors of the Insurance Company are as follows:

1. Have obtained approval from OJK;
2. Domiciles in Indonesia;
3. Capable of acting in good faith, honest and professional;
4. Capable of acting in the interests of Insurance Companies and policy holders, the insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Prioritize the interests of the Insurance Company and policyholders, the insured, participants, and/or beneficiaries over their personal interests;



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li> <li>7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.</li> <li>8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.</li> <li>9. Cakap melakukan perbuatan hukum.</li> <li>10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</li> <li>11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang- undangan.</li> <li>12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Capable of making decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Insurance Company and policy holders, the insured, participants, and/or beneficiaries; and</li> <li>7. Capable of avoiding misuse of authority to obtain undue personal gain or advantage that may jeopardize the Insurance Company.</li> <li>8. Have good morals and integrity.</li> <li>9. Capable of doing legal actions.</li> <li>10. Never been declared bankrupt, has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt, never been convicted of a criminal act that has caused losses to the Country's finance and/or related to the financial sector, never become members of the Board of Directors and/or board of commissioners who failed to hold a GMS during their term of office, or failed to report their responsibilities as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</li> <li>11. Have a commitment to comply with laws and regulations.</li> <li>12. Have knowledge and/or expertise in the fields needed by the Company.</li> </ol> |
|--|--|

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA KOLEGIAL**

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
4. Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;

### **COLLEGIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Collegial duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Insurance Company in carrying out their duties;
2. Manage Insurance Companies in accordance with their authority and responsibilities;
3. To account for the implementation of their duties to the GMS;
4. Ensure that the Insurance Company considers the interests of all parties, especially the interests of policyholders, insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Ensure that information on the Insurance Company is given to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board in a timely and complete manner;





## Direksi

Board Of Directors

6. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite investasi, karyawan perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
  7. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  8. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
  9. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan- tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) pemegang saham Perseroan;
    - b. Mengikat Perseroan sebagai Penanggung/ penjamin (guarantor) atas hutang pihak lain;
    - c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- barang tidak bergerak termasuk bangunan- bangunan dan hak- hak atas tanah serta perusahaan- perusahaan;
    - d. Membebani harta milik Perseroan dengan hak tanggungan, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.
  11. Menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku.
6. Assist to meet the needs of the Sharia Supervisory Board in using investment committee members, company employees, and professional experts whose organizational structure is under the Board of Directors.
  7. Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company;
  8. Maintain and manage the Company's assets
  9. Must carry out their duties in good faith and responsible manner with due observance of the applicable laws and regulations;
  10. Entitled to represent the Company inside and outside the Court regarding all issues and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, whether concerning management or ownership, but with limitation that to take actions below, the Board of Directors must first obtain approval from the Board of Commissioners:
    - a. Borrow or lend money on behalf of the Company (in this case not including taking money from open credit) provided that the Company is not permitted to provide loans to (the) shareholders of the Company
    - b. Bind the Company as guarantor for the debts of other parties;
    - c. Buy, sell or for other reasons to obtain or release rights to immovable goods, including buildings and rights to land and companies;
    - d. Burden the Company's assets with mortgage, pawn, and other means as bond debts.
  11. Carry out legal actions to transfer, release rights or make bond debts all or more than 50% of the Company's net assets, either in one transaction or several independent transactions related to each other in 1 fiscal year.



## PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

Di samping memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal, demi menjaga kejelasan tugas dan fungsi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas, maka tugas masing-masing Direksi antara lain sebagai berikut :

### 1. PRESIDEN DIREKTUR

- Bertanggung jawab atas jalannya aktivitas perusahaan secara keseluruhan.
- Bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi yang membawahi 3 (tiga) Direktorat.
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya dalam membuat rencana kerja (termasuk rencana bisnis, rencana korporasi dan rencana keuangan berkelanjutan).
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya dalam membuat rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan profitabilitas Perusahaan.
- Bertanggung jawab dan memastikan terselenggaranya pengelolaan Perusahaan secara Good Corporate Government (GCG).
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya atas hasil operasional perusahaan dalam setahun sekali yang tertuang dalam RUPST.
- Bertanggung jawab dan membawahi ICT dan Quality Management & Operation.

### 2. DIREKTUR KEUANGAN DAN LAYANAN

- Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan membawahi Finance & Investment, Akunting & Pajak, Human Resources Group, General Affairs, serta Corporate Secretary dan Legal.
- Bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Perseroan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kaidah/prinsip Akuntansi yang berlaku.
- Bertanggung jawab dalam penyusunan Anggaran Perusahaan, Pengelolaan Kekayaan dan Investasi, yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh OJK dan Regulator lainnya.
- Bertanggung jawab atas semua aspek pelayanan yang terkait dengan pelayanan jasa pendukung usaha Perseroan.

## DIVISION OF DUTIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In addition to having collegial duties and responsibilities, in order to maintain clarity of duties and functions, as well as to apply the principle of accountability, the duties of each of the Directors are as follows:

### 1. PRESIDENT DIRECTOR

- Be responsible for the overall course of the company's activities
- Act as the highest decision maker managing 3 (three) Directorates.
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for preparing work plans (including business plans, corporate plans and Sustainability report plans).
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for making short and long-term budget plans to ensure the Company's profitability.
- Be responsible for and ensure the implementation of Good Corporate Government (GCG) in the Company.
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for the company's operational results on an annual basis as stated in the AGMS.
- Be responsible for and supervise ICT and Quality Management & Operation.

### 2. FINANCE AND SERVICES DIRECTOR

- Report to the President Director and supervise Finance & Investment, Accounting & Taxes, Human Resources Group, General Affairs, and Corporate Secretary and Legal.
- Be responsible for the preparation of the Company's Financial Statements in a timely and accurate manner and in accordance with the applicable Accounting principles.
- Be responsible for the preparation of the Corporate Budget, Wealth Management and Investment, which is in line with the applicable provisions that are determined by OJK and other Regulators.
- Be responsible for all aspects of services related to services supporting the Company.



## Direksi

Board Of Directors

### 3. DIREKTUR PEMASARAN DAN PENJUALAN

- Bertanggung jawab atas Pemasaran Produk melalui jalur distribusi yang memadai dan senantiasa mengupayakan jalur distribusi yang baru dengan tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh OJK dan Regulator lainnya.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan terarah dengan pihak internal dan eksternal khususnya dalam pengembangan & pemasaran produk.
- Bertanggung jawab dan mengawasi/monitoring serta melakukan evaluasi atas kinerja produksi dari tiap jalur distribusi yang telah disepakati bersama.
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemasaran dan penjualan produk.
- Melakukan pengembangan bisnis baru di luar portofolio bisnis yang telah berjalan dengan tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh OJK dan Regulator lainnya.

### 4. DIREKTUR TEKNIK

- Bertanggung jawab secara umum atas bidang Teknik Perasuransian
- Melakukan pengawasan operasional kebijakan yang berlaku dalam kaitannya dengan Produk, Pengembangan Produk dan pengawasan pelaksanaannya.
- Memberikan arahan dan koordinasi dalam pengembangan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Fungsi Direktur Teknik dirangkap oleh Presiden Direktur

### 5. DIREKTUR KEPATUHAN

- Bertanggung jawab atas terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan, dan Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen.
- Memastikan perusahaan telah melaksanakan GCG (Good Corporate Governance).
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. MARKETING AND SALES DIRECTOR

- Be responsible for marketing of Products through adequate distribution channels and always strive to develop new distribution channels while remaining in line with the applicable regulations or those stipulated by OJK and other regulators.
- Create good and focused coordination and communication with internal and external parties especially in the development & marketing of products.
- Be responsible and monitor/evaluate the production performance of each distribution channel that has been agreed upon.
- Provide direction in the implementation of product marketing and sales.
- Develop new business outside existing business portfolios while complying with the applicable regulations or those stipulated by OJK and other regulators.

### 4. TECHNICAL DIRECTOR

- Be responsible in general for the Technical Insurance field.
- Carry out operational control of policies in force in relation to Products, Product Development and supervision of the implementation.
- Provide direction and coordination in developing high quality and competitive products while paying attention to the prudent principles
- The function of Technical Director is concurrently held by President Director

### 5. COMPLIANCE DIRECTOR

- Responsible for creating Compliance Culture across all levels of the organization and business activities of the Company in accordance with POJK provisions and applicable laws and regulations.
- Develop, establish, and evaluate the policies, strategies and framework of Risk Management as well as procedures and tools to identify, measure, monitor and control Risks.
- Ensure that the Risk Management function has been implemented independently.
- Ensure that the company has implemented GCG (Good Corporate Governance).
- Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with prevailing laws and regulations.



## WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

### Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris

- a. Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) Pemegang Saham Perusahaan.
- b. Mengikat Perusahaan sebagai Penanggung/ Penjamin (*Guarantor*) atas hutang pihak lain.
- c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan.
- d. Membebani harta milik Perusahaan dengan Hak Tanggungan, Gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.

### Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

- a. Setiap penggabungan, *demerger*, *spin-off*, penggabungan, atau konsolidasi.
- b. Setiap perubahan Anggaran Dasar yang secara negatif mempengaruhi hak-hak Pemegang Saham berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham, undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar kecuali diharuskan untuk melaksanakan setiap transaksi yang diizinkan dengan cara lain berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham.
- c. Setiap tindakan untuk likuidasi pembubaran penutupan sukarela, kepailitan, perwaliamanatan kebangkrutan, rekapisalisasi, reorganisasi, rehabilitasi Perusahaan, atau melakukan pemindahtanganan kepada, komposisi, atau kesepakatan serupa dengan kreditur perseroan.
- d. Setiap tindakan materiil dalam cangkupan dan sifat bisnis perseroan.
- e. Setiap penerbitan efek yang bersifat ekuitas kepada suatu pihak terkait yang bukan berdasarkan hak pro rata.
- f. Setiap pembelian kembali saham-saham dalam modal saham perseroan atau efek yang bersifat ekuitas lainnya dari setiap pihak berelasi yang tidak sesuai dengan proporsi kepemilikan saham pihak berelasi tersebut.
- g. Mengadakan setiap kesepakatan yang mengikat untuk mengambil setiap dari tindakan-tindakan yang disebutkan diatas.

## BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

### Authority of Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners

- a. Borrow or lend money on behalf of the Company (in this case not including taking money from open credit) provided that the company is not allowed to provide loans to the Company's Shareholders.
- b. Bind the Company as Guarantor for other parties' debts.
- c. Buy, sell or for other reasons obtain or release rights to immovable goods including buildings and rights to land and companies.
- d. Burdening the Company's property with Mortgage right, Pawn and other means as bond debts.

### Authority of the Board of Directors requiring approval from the General Meeting of Shareholders

- a. Merger, demerger, spin-off, or consolidation.
- b. Any amendments to the Articles of Association that negatively affect the rights of Shareholders based on the agreement of Shareholders, applicable laws or Articles of Association, unless required in order to carry out any transactions permitted by other means based on the agreement of the Shareholders.
- c. Every act of liquidation, winding-up, voluntary closure, bankruptcy, bankruptcy trustee, recapitalization, reorganization, corporate rehabilitation, or transfer of ownership, composition, or similar agreements with the company's creditors.
- d. Any material action in the scope and nature of the company's business.
- e. Any issuance of equity securities to a related party that is not based on pro-rata rights.
- f. Any buy back in the company's share capital or other equity securities of each party that is not in accordance with the proportion of the shareholding of the related party.
- g. Hold any binding agreement to take each of the actions mentioned above.



**Direksi**  
Board Of Directors

**Kewenangan Menjalankan Tindakan-tindakan Lainnya**

Kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

**KOMPOSISI DIREKSI**

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi pada PT Asuransi Bintang Tbk.

Berikut susunan anggota Direksi PT Asuransi bintang Tbk berdasarkan hasil RUPSLB pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan RUPST tahun buku 2020:

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Uji Kemampuan dan Kepatuhan</b> Fit and Proper Test	<b>Tanggal Pengangkatan oleh RUPS</b> Appointment Date by GMS
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	KEP-259/NB.11/2016 tanggal 15 April 2016 Dated April 15, 2016	1 Juni 2016 June 1, 2016
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	KEP-305/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Dated November 28, 2009	17 April 2008 April 17, 2008
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	KEP-585/BL/2011 tanggal 3 November 2011 Dated November 3, 2011	9 Juni 2011 June 9, 2011
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	KEP-645/NB.11/2019 tanggal 05 November 2019 Dated November 5, 2019	19 Desember 2019 December 19, 2019

**RAPAT DIREKSI**

Sebagaimana Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Selama tahun 2021, anggota Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan rincian tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi sebagai berikut:

**Authority to Carry Out Other Actions**

The authority to carry out other actions is determined in the Company's Articles of Association and applicable regulations.

**COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

During 2021 there was no change in the composition of the members of the Board of Directors at PT Asuransi Bintang Tbk.

The following is the composition of members of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk based on the EGMS resolution on December 19th, 2019 until the AGMS for fiscal year 2020:

**BOARD OF DIRECTORS MEETING**

According to OJK Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Articles of Association of the Company, members of the Board of Directors shall hold periodical Board of Directors Meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month.

In 2021, the members of the Board of Directors held 18 meetings with details of attendance of members of the Board of Directors in the Board of Directors meeting as follows:



<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Kehadiran</b> Attendance	<b>%</b>
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	18	100%
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	18	100%
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	18	100%
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	18	100%

Berikut ini adalah perincian mengenai tanggal dan agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2021: The following is details on date and agenda of Board of Directors meeting during 2021:

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b> Date	<b>Agenda Rapat</b> Meeting Agenda
1	8 Februari 2021 February 8, 2021	Update Sistim Informasi & Tanah Sawangan Update on Information System & Sawangan Land
2	26 Februari 2021 February 26, 2021	1. Surat OJK UUS 2. Penundaan pembayaran tanah sawangan 1. OJK Letter UUS 2. Postponement on the payment for Sawangan land
3	4 Maret 2021 March 4, 2021	1. Hasil audit internal IT 2. Ulang tahun Bintang 3. DDI Assesment untuk Group Head 1. Results of internal audit on IT 2. Anniversary of Bintang 3. DDI Assessment for Group Head
4	21 Maret 2021 March 21, 2021	Hasil Assesment DDI Terhadap Group Head Results of DDI Assessment on Group Head
5	23 April 2021 April 23, 2021	1. Kondisi Ibu Winey/Mrs. Winey Condition 2. Pembayaran THR/Payment of Holiday Allowances 3. Rencana Radekom/Board of Commissioners' Meeting Plan 4. Lain - lain (Broker dan Bank)/Others (Brokers and Banks)
6	6 Mei 2021 May 6, 2021	ISO 9001 2015 di CNBC dan Penyerahan Beasiswa ISO 9001 2015 at CNBC and Scholarship Presentation
7	19 Mei 2021 May 19, 2021	Penentuan keputusan RUPS PT Reasuransi MAIPARK Indonesia Stipulation on GMS Resolutions of PT Reasuransi MAIPARK Indonesia
8	10 Juni 2021 June 10, 2021	Persiapan Rapat BOC – BOD Preparation of BOC—BOD Meetings
9	21 Juni 2021 June 21, 2021	Persiapan RUPS Teknis dengan Notaris & BAE Preparation for Technical GMS with Notary & BAE
10	10 Juli 2021 July 10, 2021	Persiapan RUPS dan lain-lain 1. Dividen tahun buku 2021 2. Alokasi Dana khusus covid-19 3. Tindak lanjut rencana penambahan BOD – Pak Yuri Preparation for GMS and others 1. 2021 Dividend 2. Fund allocation special for COVID-19 3. Follow-up on plan for additional BOD – Mr. Yuri
11	27 Juli 2021 July 27, 2021	Laporan keuangan publikasi bulan Juli 2021 Financial statement to publish July 2021



**Direksi**  
Board Of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
12	19 Agustus 2021 August 19, 2021	Rencana Radekom Board of Commissioners' Meeting Plan
13	3 September 2021 September 3, 2021	Persiapan Meeting dengan SPAB Preparation of Meeting with SPAB
14	27 September 2021 September 27, 2021	Pengalihan Sebagian Modal (Aset) UUS Diversion of Part of Capital (Asset) of UUS
15	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Laporan keuangan bulan September 2021 Financial statement for September 2021
16	24 November 2021 November 24, 2021	Rapat Kerja Nasional hari pertama National Working Meeting day 1
17	25 November 2021 November 25, 2021	Rapat Kerja Nasional hari kedua National Working Meeting day 2
18	28 Desember 2021 December 28, 2021	Public Expose

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN HASIL RAPAT DIREKSI**

Pengambilan keputusan yang dilakukan selama Rapat Direksi sudah dilakukan sesuai yang tercantum dalam POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila terdapat lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau diwakili secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat Direksi baik harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

**PELATIHAN DAN/PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI**

Pelatihan dan/Peningkatan Kompetensi dapat dilihat dalam bagian Bab Profil Perusahaan.

**PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI YANG BARU DIANGKAT**

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan Direksi, maka tidak terdapat program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat.

**RESOLUTION MAKING AND RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Resolutions made during the Board of Directors Meeting have been implemented according to those set out in POJK Number 2/POJK.05/2014 as amended by OJK Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and Company Articles of Association. The Board of Directors meeting is valid and binding if the meeting is attended by more than ½ (one-half) of the number of members of the Board of Directors or those legally represented at the Meeting. Resolution of Board of Directors meetings must be taken based on discussion to reach consensus. The results of the Board of Directors Meeting must be stated in the minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors present, and shall be delivered to all members of the Board of Directors and well documented.

**TRAINING AND/INCREASING COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Training and/or Competency Improvement can be seen in the Company Profile Chapter.

**ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

During 2021 there are no changes to the Board of Directors, so there is no orientation program for newly appointed members of the Board of Directors.

**INDEPENDENCY AND AFFILIATION OF THE**



## INDEPENDENSI DAN HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan perasuransian menyatakan bahwa Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

## BOARD OF DIRECTORS

OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for insurance companies state that the Board of Directors of Insurance Companies must guarantee effective, appropriate and quick decision making and be able to act independently, have no interests that may interfere with their ability to carry out their tasks independently and critically.

Kriteria Independensi dan Afiliasi Independency Criteria and Affiliation	HSMW	JCM	RD	ZDI
Anggota Direksi telah menandatangani pernyataan bahwa "Tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan" Board of Directors members have signed a statement that "There is no conflict of interest against any decision taken by the authoritative party".	V	V	V	V
Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan dan fungsi Direksi. Members of the Board of Directors never gave a general authorization to another party that resulted in transfer of authority and function of the Board of Directors.	V	V	V	V
Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. All Members of the Board of Directors have no family relations up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.	V	V	V	V
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan. All members of the Board of Directors have no financial ties or relationships with members of the Board of Commissioners and/or other Directors and/or controlling shareholder of the Company.	V	V	V	-

HSMW : Hastanto Sri Margi Widodo  
JCM : Jenry Cardo Manurung  
RD : Reniwati Darmakusumah  
ZDI : Zafar Dinesh Idham

## REMUNERATION OF THE BOARD OF





**Direksi**  
Board Of Directors

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- Dasar Penetapan Remunerasi  
PT Asuransi Bintang Tbk dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan, perumusan dan penentuan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris yang dilakukan melalui Komite Nominasi & Remunerasi.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021, RUPS memutuskan:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Prosedur Penetapan Remunerasi:

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

## COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

### Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

- Basis for Determining Remuneration  
PT Asuransi Bintang Tbk in providing remuneration for the Board of Commissioners is guided by the Regulation of the Financial Services Authority No.73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.

The Board of Commissioners supervises, formulates and determines remuneration in the form of salaries and honoraria, fixed allowances and facilities and variable incentives for the Board of Commissioners which is carried out through the Nomination & Remuneration Committee.

Based on the decision of the 2020 Annual GMS of PT Asuransi Bintang Tbk which was held on 15 July 2021, the GMS decided:

1. Granting power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and/or other allowances including tantiem/bonus for members of the Board of Directors of the Company; and
2. Determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners of a maximum of Rp 170.000.000- (one hundred and seventy million Rupiah) per month after deducting income tax and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of tantiem/bonus for all members of the Company's Board of Commissioners.

### Remuneration Determination Procedure:

In general, the procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners is carried out through the following stages:

Remuneration in one year, based on the income



### KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

**Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi dewan Komisaris dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan mengusulkan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.**

Nomination and Remuneration Committee carry out evaluations on the remuneration policy issued for Board of Commissioners, create a recommendation to the Board of Commissioners, and suggest the Remuneration of Board of Commissioners.



### DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

**Mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.**

Learn the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and recommend remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors to AGMS



### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS) ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

**RUPS menetapkan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Presiden Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.**

AGMS enact remuneration for Board of Commissioners and elect President Commissioner to develop the share to each member of Board of Commissioners



### REMUNERASI REMUNERATION

#### **Anggota Komisaris:**

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS. Jumlah Remunerasi Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.104.654.000.

#### **Anggota Direksi**

Pembagian remunerasi kepada anggota Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS. Jumlah Remunerasi Anggota Direksi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp9.264.884.000.

#### **Board of Commissioners**

Remuneration shared to the Board of Commissioners according to the AGMS result. The Remuneration total of the Board of Commissioners ended on 2021, amounted Rp2,104,654,000.

#### **Board of Directors**

Remuneration shared to the Board of Direction according to the AGMS result. The Remuneration total of the Board of Directors ended on 2021, amounted Rp9,264,884,000



**Direksi**

Board Of Directors

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: level range, is as follows:

**Kelompok Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

**Total Remuneration Group for the Board of Commissioners and the Board of Directors**

<b>Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)</b> Remuneration Total per person in 1 year *)	<b>Jumlah Direksi</b> Total number of Board of Director	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b> Total Number of Board of Commissioner
Di atas Rp2 miliar Above 2 billion IDR	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above 1 billion IDR to 2 billion IDR	4	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above 500 million IDR to 1 billion IDR	-	-
Rp500 juta ke bawah Under 500 million IDR	-	5



## Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

### Committees Supporting The Board Of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, serta Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan wajib membentuk Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

#### KOMITE AUDIT

##### Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tertanggal 19 Juni 2019. Berdasarkan Piagam, Komite Audit terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

##### Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

Pursuant to Financial Services Authority Regulation (OJK) No.43/POJK.05/2019 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, and Circular Letter of OJK No. 14/SEOJK.05/2019 concerning Establishment, Membership Composition, and Term of Office of Committees of the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, it is stated that the Company is obliged to establish a Committee that is responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of duties of the Board of Commissioners.

#### AUDIT COMMITTEE

##### Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter used as a guideline in carrying out its duties that have been adjusted to the applicable Regulations. The Charter was revised and approved by the Board of Commissioners on June 7th, 2014. Based on the Charter, the Audit Committee consists of at least 3 (three) members made up of at least 1 (one) Independent Commissioner who acts as Head of the Committee and at least 2 (two) other members from outside of the Company.

##### Duties & Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, which include:

1. Preparing an annual activity plan approved by the Board of Commissioners.
2. Reviewing financial information that will be released by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information.
3. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations and other laws and regulations that have a significant impact on the sustainability of the Company's activities.
4. Providing independent opinion in the event of differences of opinion between the management and public accountant for the services they provide.



### Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Committees Supporting The Board Of Commissioners

5. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal.
  6. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan piagam audit internal.
  7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik.
  8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
  9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
  10. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik.
  11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.
  12. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
  13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan.
  14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
  15. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit.
5. Giving consideration to the proposed appointment and termination of Head of Internal Auditor.
  6. Analyzing work plan and conducting audit by internal auditor and reviewing the adequacy of the internal audit charter.
  7. Reviewing the effectiveness of the company's internal control and giving opinion in the process of selecting a public accountant.
  8. Reviewing the independence and objectivity of a public accountant.
  9. Reviewing the adequacy of audit conducted by a public accountant to ensure that all important risks have been considered.
  10. Reviewing and monitoring the follow-up of the audit findings by internal auditor and public accountant.
  11. Evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information conducted by the Public Accounting Firm and Public Accountants.
  12. Reviewing and reporting to the Commissioner for complaints relating to the Company.
  13. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflict of interest with the Company.
  14. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.
  15. Preparing, reviewing, and renewing the Audit Committee Charter

### WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit internal dan eksternal.

### AUTHORITIES OF AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the following authorities:

1. Having full, free and unlimited access to records, employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the implementation of their duties.
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and parties who carry out the functions of internal audit, risk management, and accounting related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members required to assist in carrying out their duties (if needed).
4. Examining the results of internal and external audit.



## Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Committees Supporting The Board Of Commissioners

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.</li> <li>6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</li> <li>7. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Auditor Internal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Receiving complaints and reports in connection with violations related to financial reporting.</li> <li>6. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.</li> <li>7. In exercising their authorities, the Audit Committee is obliged to cooperate with the Internal Auditor.</li> </ul> |
|--|---|

### CAKUPAN TUGAS KOMITE AUDIT

1. Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan kepada (OJK) adalah Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi. Walaupun Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, Perseroan dan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi merupakan satu kesatuan pelaporan keuangan dalam perspektif otoritas pasar modal.
2. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Perseroan. Sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, tugas Komite Audit dapat mencakup pengawasan terhadap manajemen risiko yang mempengaruhi pelaporan keuangan.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### SCOPE OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

1. The Company's financial statements submitted to OJK are Consolidated Financial Statements which cover Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries. Although the Company and its Subsidiaries are separate legal entities, the Company and its Subsidiaries are consolidated as a single unit of financial reporting in the perspective of capital market authorities.
2. The Board of Commissioners has a general and/or special supervisory function to the Company. As an organ formed by the Company's Board of Commissioners, the duties of the Audit Committee can include oversight of risk management that affects financial reporting.

The structure and composition of the Audit Committee during 2021 are as follows:

No.	Nama Anggota Member Name	Jabatan Job Title	Masa Kerja Work Period	SK Pengangkatan Decree of Appointment
1.	Chaerul Djakman	Ketua Chair	3 tahun 3 years	No.001/ S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2019
2.	Yan Rahadian	Anggota Member	3 tahun 3 years	No.001/ S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2019
3.	Taufik Hidayat	Anggota Member	3 tahun 3 years	No.001/ S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2019

### PROFIL KOMITE AUDIT PERUSAHAAN:

**Dr. Chaerul Djusman Djakman, CA, CSRS, AMRP**  
Daftar riwayat hidup Chaerul Djusman Djakman dapat dilihat di Riwayat Hidup Dewan Komisaris

**Dr. Taufik Hidayat, CA**

Anggota Komite Audit - 14 Agustus 2019 – 13 Agustus 2022

### PROFILE OF THE COMPANY'S AUDIT COMMITTEE

**Dr. Chaerul Djusman Djakman, CA, CSRS, AMRP**  
Curriculum vitae of Chaerul Djusman Djakman can be seen in the Curriculum Vitae of the Board of Commissioners

**Dr. Taufik Hidayat, CA**

Audit Committee Member - August 14th, 2019 – August 13th, 2022



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang tanggal 26 Juni 1975 (46 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 Agustus 2013. Pada tahun 1999, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), gelar Magister Manajemen dari MM FEB UI di tahun 2005 dan Doktor Ilmu Akuntansi dari PPIA FEB UI tahun 2019. Beliau juga pemegang gelar CA. Pada tahun 1999-2001, beliau pernah menjadi Auditor di Deloitte Touche & Tohmatsu (HTM). Pada tahun 2007-2009 sebagai Kepala Laboratorium Akuntansi FEB UI. Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2002. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi keuangan dan menulis beberapa buku ajar di bidang Akuntansi Keuangan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama tahun 2021 adalah webinar “PSAK Update Per 1 Januari 2022”, yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2021.

**Yan Rahadian, M.S.Ak., CA, CSRS, CACP**  
Anggota Komite Audit - Periode: 14 Agustus 2019 – 13 Agustus 2022

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 29 Juni 1977 (44 tahun), berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 Agustus 2013. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dan gelar Master di bidang Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2000. Selama di FEB UI beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Departemen Akuntansi FEB UI (2000-2005), Koordinator Program Akuntansi Sektor Publik Diploma 3 FEB UI (2007-2008), Kepala Pusat Akuntansi Sektor Publik Departemen Akuntansi FEUI (2008-2009), Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI (2009-2013) dan Kepala PPA FEUI (2013-2018). Beliau juga pemegang gelar CA, CSRS, dan CACP. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi, tata kelola, dan keberlanjutan. Sejak tahun 2020 beliau juga menjadi anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Indonesian citizen, born in Padang on June 26th, 1975 (45 years old), domiciles in Jakarta. He has served as a Member of the Audit Committee since August 2nd, 2013. In 1999, he earned his Bachelor of Economics degree from Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI), Master's degree in Management from MM FEB UI in 2005 and a Doctoral degree in Accounting from PPIA FEB UI in early 2019. He also holds the CA title. In 1999-2001, he worked as an Auditor at Deloitte Touche & Tohmatsu (HTM) and as Head of Accounting Laboratory of FEB UI in 2007-2009. He has been working as lecturer and researcher at FEB UI since early 2002. Aside from being a teaching staff and researcher, he actively provides training and consulting services in the financial accounting sector and writes several reference books in the Financial Accounting.

Trainings and education he attended in 2021 include “PSAK Update as of January 1, 2022”, held on August 27, 2021.

**Yan Rahadian, M.S.Ak., CA, CSRS, CACP**  
Audit Committee Member - August 14th, 2019 – August 13th, 2022

Indonesian citizen, born in Bandung on June 29th, 1977 (43 years old), domiciles in Depok. He has served as a Member of the Audit Committee since August 2nd, 2013. He earned his Bachelor of Economics degree and a Master's degree in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI). He has worked as a teaching staff and researcher at FEB UI since early 2000. During his time at FEB UI, he served as Head of the Accounting Laboratory Department of FEB UI (2000-2005), Coordinator of Public Sector Accounting Program for Diploma 3 of FEB UI (2007-2008), Head of Public Sector Accounting Center of Accounting Department of FEUI (2008-2009), Vice Chairman of Accounting Development Center (PPA) of FEB UI (2009-2013) and Head of PPA FEUI (2013-2018). He also holds a CA and CSRS degree. In addition to being a teaching staff and researcher, he actively provides training and consulting services in the fields of accounting, governance, and sustainability. Since 2020 he has also been a member of the working group of the Government Accounting Standards Committee or Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).



Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama tahun 2021 adalah pelatihan dan sertifikasi profesi komite audit yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).

### INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa Komite Audit memiliki kedudukan dan bertindak secara independen, obyektif, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam sebagai berikut:

- Ketua dan Anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan; dan
- Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan yang tercantum dalam Piagam Komite serta Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama tahun 2021, Komite Audit mengadakan sebanyak 13 (tigabelas) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Chaerul Djusman Djakman	Ketua Chair	13	100
Taufik Hidayat	Anggota Member	13	100
Yan Rahadian	Anggota Member	13	100

Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib didokumentasikan dengan baik.

Education and trainings he attended in 2021 include training and certification for audit committee profession, held by Indonesia Association of Audit Committee (IKAI).

### INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

In accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, it is stated that the Audit Committee has a position and acts independently, objectively, and professionally in carrying out its duties and responsibilities as set out in the Charter as follows:

- Head and Members of the Audit Committee must be free from the influence of the Board of Directors and other parties used by the Company; and
- The Audit Committee only accepts assignments from the Board of Commissioners and reports to the Board of Commissioners.

### POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING

As regulated in OJK Regulation No.55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and those stipulated in the Committee Charter, as regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.05/2019 concerning the Establishment, Membership Structure, and Term of Office of the Committee of the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company, the audit committee must hold regular meetings at least once in 3 (three) months

During 2021, the Audit Committee held 13 (thirteen) meetings with attendance details as follows:

The results of the Audit Committee meeting must be stated in minutes of meetings and must be well documented.





**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

**LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT**

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Laporan tersebut diberikan kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi akuntan publik (jika ada).

**PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT SELAMA TAHUN 2021**

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi Kegiatan Komite Audit selama tahun 2021:

**REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES**

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to prepare a report to the Board of Commissioners for the implementation of the assigned duties. The report is given to the Board of Commissioners periodically at least once in 3 (three) months. The Audit Committee prepares annual reports to the Board of Commissioners regarding the implementation of the Audit Committee activities and is included in the company's annual report, which among others related to the following matters:

- a. Violation committed by the Company to the provisions of applicable laws and regulations (if any); and
- b. Errors in the preparation of financial statements, internal control, and the independence of a public accountant (if any).

**IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF AUDIT COMMITTEE DURING 2021**

The following are details of the implementation of the Audit Committee Work Program and the Realization of the Audit Committee Activities during 2021:

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Evaluasi Kinerja Keuangan Financial Performance Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan dampak Covid-19 terhadap proses bisnis dan kinerja perusahaan. (19 Maret 2021)</li> <li>• Pembahasan kinerja keuangan dan operasional tahun 2020 dengan Manajemen. (19 Maret 2021)</li> <li>• Pembahasan kinerja keuangan Januari s.d. Juni tahun 2021 dengan Manajemen. (15 September 2021)</li> <li>• Pembahasan kinerja keuangan s.d. September tahun 2021 dengan Manajemen. (29 Desember 2021)</li> <li>• Discussion on impact of COVID-19 on business processes and company performance. (March 19, 2021)</li> <li>• Discussion on 2020 financial and operational performance with the Management. (March 19, 2021)</li> <li>• Discussion on financial performance from January to June 2021 with the Management (September 15, 2021)</li> <li>• Discussion on financial performance until September 2021 with the Management (December 29, 2021)</li> </ul>
2	Pembahasan Laporan Keuangan Auditan Audited Financial Report Discussions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan perkembangan proses dan hasil audit laporan keuangan tahun 2020 dengan Auditor Eksternal (KAP). (19 Maret 2021)</li> <li>• Pembahasan laporan keuangan auditan tahun 2020 (Exit Meeting dengan Auditor Eksternal). (15 Juni 2021)</li> <li>• Pembahasan tindak lanjut temuan dalam Management Letter atas audit tahun 2020 (15 September 2021)</li> <li>• Discussion on the development of audit process and results on 2020 financial statement with External Audit (KAP). (March 19, 2021)</li> <li>• Discussion on 2020 audited financial statement (Exit Meeting with External Auditor). (June 15, 2021)</li> <li>• Discussion on the follow-up to the findings in the Management Letter for 2020 audit (September 15, 2021)</li> </ul>



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
3	Laporan Kegiatan Audit Internal Internal Auditing Activity Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review rencana kerja internal audit berbasis risiko (05 Maret 2021)</li> <li>Pembahasan perkembangan internal audit Januari s.d. Maret 2021 (5 Maret 2021).</li> <li>Penilaian kinerja Audit Internal (7 September 2021)</li> <li>Pembahasan perkembangan internal audit s.d. Juni 2021 (15 September 2021).</li> <li>Pembahasan perkembangan internal audit s.d. Desember 2021 (22 Desember 2021).</li> <li>Review of the risk-based internal audit work plan (05 March 2021)</li> <li>Discussion on internal audit developments from January to January. March 2021 (March 5, 2021).</li> <li>Internal Audit performance assessment (7 September 2021)</li> <li>Discussion on the development of internal audit to d. June 2021 (15 September 2021).</li> <li>Discussion on the development of internal audit to d. December 2021 (December 22, 2021).</li> </ul>
4	Penyusunan Laporan Komisaris Independen ke OJK Independent Commissarial Report Preparation for OJK Evaluation	Pembahasan Laporan Tahunan Komisaris Independen kepada OJK. (17 April 2021) Discussion on Annual Report of Independent Commissioner to OJK. (April 17, 2021)
5	Penelaahan peraturan baru New regulations reviewings	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan perkembangan persiapan penyusunan laporan keberlanjutan berdasarkan POJK 51. (19 Maret 2021)</li> <li>Pembahasan peraturan terbaru OJK tahun 2021. (7 September 2021)</li> <li>Discussion on the progress of the preparation of the sustainability report based on POJK 51. (March 19, 2021)</li> <li>Discussion on the latest OJK regulations for 2021. (September 7, 2021)</li> </ul>
6	Penyusunan Laporan Kegiatan Komite Audit Audit Committee Activity Report Preparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan penyusunan Laporan Tahunan Komite Audit 2020 (05 Maret 2021)</li> <li>Penyusunan Laporan Komite Audit TW-1 2021 (13 Juni 2021)</li> <li>Penyusunan Laporan Komite Audit TW-2 2021 (07 September 2021)</li> <li>Penyusunan Laporan Komite Audit TW-3 2021 (11 Oktober 2021)</li> <li>Preparation of the 2020 Audit Committee Annual Report (March 5, 2021)</li> <li>Preparation of Audit Committee Report Q1 2021 (June 13, 2021)</li> <li>Preparation of the Audit Committee Report TW-2 2021 (September 7, 2021)</li> <li>Preparation of the TW-3 2021 Audit Committee Report (October 11, 2021)</li> </ul>
7	Penilaian terhadap Auditor Eksternal Rating for External Auditors	Pembahasan tentang Penilaian Auditor Eksternal (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun 2020. (14 Juni 2021) Discussion on the External Auditor Assessment (KAP) for the 2020 financial statement audit (June 14, 2021)
8	Persiapan Pemilihan Auditor Eksternal Preparations for External Auditor Selection	Kick-off Meeting Kantor Akuntan Publik (KAP) dan proses audit untuk tahun buku 2021. (27 Desember 2021) Discussion on the External Auditor Assessment (KAP) for the 2021 financial statement audit (December 27, 2021)
9	Rencana Kerja tahunan Komite Audit Audit Committee Annual Work Planning	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2022. (22 Desember 2021) Discussion on the External Auditor Assessment (KAP) for the 2022 financial statement audit (December 22, 2021)



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

## **KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

### **Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam tersebut, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Perasuransian Syariah, dan pihak yang memiliki keahlian keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian dan perasuransian syariah dan yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang hukum.

### **Tugas & Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

1. Mengkaji dan menilai serta memastikan konsistensi fungsi tata kelola perusahaan yang disusun oleh Direksi telah berjalan dengan baik pada setiap departemen / divisi di Perusahaan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
3. Mengevaluasi struktur dan tata kelola serta kesesuaian kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan;
4. Memberikan saran dan arahan kepada Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

### **Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

1. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

## **GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE**

### **Good Corporate Governance Committee Charter**

Good Corporate Governance Committee has a Good Corporate Governance Committee Charter which is used as a guideline in carrying out its duties and has been adjusted to the applicable Regulations. The Charter was revised and approved by the Board of Commissioners on August 19th, 2016. Based on the Charter, the Good Corporate Governance Committee consists of at least 3 (three) people with 1 (one) Independent Commissioner acting as a Head of the Committee and at least 2 (two) other members who understand the applicable principles and provisions regarding Good Corporate Governance for Insurance and Sharia Insurance Companies, and parties that have expertise in finance, economy, and/or insurance and sharia insurance, and those having educational background and expertise in law.

### **Duties & Responsibilities of Good Corporate Governance Committee**

1. Reviewing and assessing as well as ensuring that corporate governance functions prepared by Board of Directors runs well and consistently in every department/division in the Company, including issues related to Business Ethics and Corporate Social Responsibility;
2. Conducting evaluation on the Company's compliance with regulations and discussing solutions if a violation occurs;
3. Evaluating the structure and governance as well as the compatibility of Good Corporate Governance policy of the Company;
4. Giving advice and direction to the Company in relation to the implementation of Good Corporate Governance;
5. Providing reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Good Corporate Governance Committee to Board of Commissioners.

### **Authorities of Good Corporate Governance Committee**

1. Good Corporate Governance Committee works collectively and is independent in performing its duties and reports to Board of Commissioners;



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan;</p> <p>3. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Direksi;</p> <p>4. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> | <p>2. Good Corporate Governance Committee has the authority to obtain Company information related to the implementation of corporate governance carried out by the Company;</p> <p>3. Good Corporate Governance Committee has the authority to review the Corporate Governance policies prepared by Board of Directors;</p> <p>4. Good Corporate Governance Committee has the authority to assess the consistency of the implementation of Corporate Governance, including those relating to business ethics and corporate social responsibility.</p> |
|---|---|

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan sebagai berikut :

Structure and Composition of Membership of Good Corporate Governance Committee of the Company are as follows:

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Tanggal Pengangkatan</b> Date of Appointment	<b>Dasar Pengangkatan</b> Basis of Appointment	<b>Periode</b> Period	<b>Masa Jabatan</b> Tenure
Krishna Suparto	Ketua Chair	20 Desember 2019 December 20, 2019	SK No.017/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	II	3 Tahun 3 Years
Chaerul D. Djakman	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20, 2019	No.017/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	II	3 Tahun 3 Years
Mulia Nugraha	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20, 2019	No.017/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	I	3 Tahun 3 Years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik:

The following is a short profile of Good Corporate Governance Committee:

**Krishna Suparto**

Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Masa Jabatan: 2019 – 2022

**Krishna Suparto**

Head of the Good Corporate Governance Committee  
Term: 2019 – 2022

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

His short profile can be seen in the Curriculum Vitae section of Board of Commissioners.

**Chaerul Djusman Djakman**

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Masa Jabatan: 2019 – 2022

**Chaerul Djusman Djakman**

Member of the Good Corporate Governance Committee  
Term: 2019 – 2022

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

His short profile can be seen in the Curriculum Vitae section of Board of Commissioners.

**Mulia Nugraha**

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Masa Jabatan: 2019 – 2022

**Mulia Nugraha**

Member of the Good Corporate Governance Committee  
Term: 2019 – 2022



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 16 April 1974 (usia 47 tahun), berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2010. Beliau mengawali karirnya di Asuransi Bintang sebagai Management Trainee di tahun 1999-2000, dilanjutkan tahun 2000-2003 sebagai Koordinator Underwriting & Marketing Cabang Bandung. Di tahun 2003-2005 Beliau diangkat sebagai Asisten Manager Underwriting, tahun 2005-2009 sebagai Kepala Grup Underwriting. Melanjutkan karirnya di Asuransi Bintang, pada tahun 2009-2011 sebagai Kepala Departemen Broker Service dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Grup Kepatuhan & Manajemen Risiko. Tahun 2012-2013 beliau juga merangkap jabatan sebagai Kepala Group Klaim.

Tahun 2005 meraih gelar Ahli Asuransi Indonesia (A2IK) dari Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia, tahun 2015 meraih gelar Certified Risk Management Profesional dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Profesi Manajemen Risiko, tahun 2019 meraih gelar Qualified Chief Risk Officer dari Lembaga Sertifikasi Profesi - MKS.

Beliau mengikuti pelatihan dan seminar di dalam dan luar negeri diantaranya. Insurance School of Japan - General Course tahun 2007, Insurance School of Japan - Advanced Course tahun 2011, Risk Management Course, Reinsurance Plus Course di Singapore Collage of Insurance, Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques by Munich Re - Singapore

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah

Pelatihan/seminar yang diikuti selama tahun 2021:

1. Membangun Human Capital Development Berbasis KPI dan Manajemen Risiko di Perusahaan Perasuransian yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha pada tanggal 26 Maret 2021
2. Managing Market Risk in Insurance Industry yang diselenggarakan oleh GRC Management pada tanggal 29 Juni 2021
3. Company Strategic Planning yang diselenggarakan oleh PPM management pada tanggal 27-30 Juli 2021
4. Enhancing Your ERM yang diselenggarakan oleh pada tanggal 30 Agustus 2021.

An Indonesian citizen, born in Jakarta on April 16th, 1974, (47 years old), domiciles in Jakarta. He earned his Bachelor of Physics Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1999 and a Masters in Management from Gadjah Mada University in 2010. He began his career at PT Asuransi Bintang Tbk as Management Trainee in 1999-2000, and as Bandung Branch Underwriting & Marketing Coordinator in 1999-2000. In 2003-2005 he was appointed as Assistant Manager of Underwriting and Head of the Underwriting Group in 2005-2009. Continuing his career at PT Asuransi Bintang Tbk, in 2009-2011 he served as Head of the Broker Service Department and as Head of the Risk Management and Compliance Group from 2011 up to now. In 2012-2013 he also holds concurrent position Head of the Claim Group.

In 2005 he earned the Indonesian General Insurance Expert (A2IK) title from Indonesian Insurance Management Association and in 2015 he earned Certified Risk Management Professional title from The Institution of Certified Management for Risk Management Profession and in 2019 he earned Qualified Chief Risk Officer title from The Institution of Certified Profession - MKS.

He participates in trainings and seminars inside and outside the country. Among others, Insurance School of Japan - General Course in 2007, Insurance School of Japan - Advanced Course in 2011, Risk Management Course, Reinsurance Plus Course in Singapore Collage of Insurance, Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques by Munich Re - Singapore.

Currently he also serves as a Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Trainings/seminars attended in 2021:

1. Building KPI-Based Human Capital Development and Risk Management in Insurance Companies organized by Widya Dharma Artha on March 26, 2021
2. Managing Market Risk in Insurance Industry organized by GRC Management on June 29, 2021
3. Company Strategic Planning organized by PPM management on July 27-30, 2021
4. Enhancing Your ERM which will be held on August 30, 2021.



### Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan.
2. Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan- peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan.

### Kebijakan Dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang pembentukan, susunan keanggotaan dan masa kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Tata Kelola Perusahaan dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selama tahun 2021, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Krishna Suparto	Ketua Chair	1	100%
Chaerul D, Djakman	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%

### Pengungkapan dan Pelaporan Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Komite Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### Independency Of Good Corporate Governance Committee

1. Good Governance Committee of the Company must be free from any intervention from the Company's stakeholders.
2. Good Corporate Governance Committee of the Company must be free from any conflict of interest and influence or pressure from any party that is against the laws and regulations in the field of insurance and ethical values as well as standards, principles and healthy practices of insurance and sharia insurance business, as well as policies that may occur during the implementation of the duties and responsibilities of Good Corporate Governance Committee of the Company.

### Policy and Implementation of Good Corporate Governance Committee Meetings

In accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 concerning formation, membership structure, and term of office of Committees of Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies, Good Corporate Governance Committee may conduct meeting as needed by the Company. During 2020, Good Corporate Governance Committee held 1 (one) meetings with the following details:

### Disclosure And Reporting Of Good Corporate Governance Committee

1. The Corporate Governance Committee submits a report on the activities of Good Corporate Governance Committee of the Company at least once a year to the Board of Commissioners.
2. The report of the Good Governance Committee of the Company is part of the report of the implementation of duties of Board of Commissioners and shall be submitted at the General Meeting of Shareholders.



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan.</li> <li>b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan dalam buku tahunan.</li> </ol> | <p>3. The implementation of functions of Good Governance Committee of the Company must be included in the annual report on the Company's website, which at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statement that the Company has a Corporate Governance Committee Charter.</li> <li>b. A brief description of the implementation of duties and responsibilities of Good Governance Committee of the Company in the annual report.</li> </ol> |
|--|---|

**Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Selama Tahun 2021**  
**Implementation of Good Corporate Governance Committee Activities in 2021**

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	<p>Pelaksanaan ketentuan terkait dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik</p> <p>Implementation of provisions related to Good Corporate Governance regulations</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan self assessment Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK yang berlaku.</li> <li>• Pemenuhan syarat keberlanjutan bagi pihak utama sebagaimana tercantum dalam POJK 73/POJK.05/2016 dan No.43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.</li> <li>• Pelaksanaan RUPS sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020.</li> <li>• Pelaksanaan Public Expose sesuai dengan Kep-360/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi dan Surat Edaran No. SE-00003/BEI/05-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Public Expose Secara Elektronik.</li> <li>• Pemenuhan Laporan-laporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</li> <li>• Carry out a self-assessment of Corporate Governance in accordance with the applicable Financial Services Authority Regulation (POJK).</li> <li>• Fulfillment of sustainability requirements for the main parties as stated in POJK 73/POJK.05/2016 and No.43/POJK.05/2019, concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.</li> <li>• Implementation of the GMS in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020.</li> <li>• Implementation of the Public Expose in accordance with Kep-360/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004 concerning Regulation point I-E regarding Obligations to Submit Information and Circular Letter No. SE-00003/BEI/05-2020 regarding Procedures for Electronic Public Expose.</li> <li>• Fulfillment of reports in accordance with applicable regulations.</li> </ul>

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**Piagam Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas- tugasnya, yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam, Komite Pemantau Risiko terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang berasal dari luar Perseroan

**RISK MONITORING COMMITTEE**

**Risk Monitoring Committee Charter**

The Risk Monitoring Committee has a Risk Monitoring Committee Charter which serves as a guideline in carrying out its duties and has been adjusted to the applicable regulations. The charter has been revised and approved by the Board of Commissioners on August 19th, 2016. Based on the Charter, the Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) members with a composition of 1 (one) Independent Commissioner who acts as Head of the Committee and at least 2 (two) other members who are external to the Company who have expertise, knowledge, and experience in the



yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen Risiko atau Aktuaria dan juga pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian dan perasuransian Syariah.

### **Tugas & Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

1. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah berjalan dengan baik pada setiap departemen/divisi di Perusahaan;
2. Melakukan review atas pemetaan exposure risiko dan mendiskusikannya dengan Underwriter dan Direksi;
3. Melakukan review atas produk-produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, produk baru, serta ekspansi usaha yang strategis;
4. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
5. Melakukan review atas delegasi wewenang beserta eskalasi yang berlaku dan melakukan pemantauan atas delegasi wewenang yang diberikan oleh Direksi tersebut, serta mendiskusikan jalan keluar jika terjadi pelanggaran kewenangan;
6. Memastikan bahwa sistem pengelolaan klaim telah dilakukan dengan baik dan efisien;
7. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional maupun pengembangan usaha Perusahaan;
8. Membantu evaluasi kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal;
9. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

### **Wewenang Komite Pemantau Risiko**

1. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung;
2. Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Apabila diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat mempekerjakan tenaga ahli dan / atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Risiko terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

field of Risk management or Actuary and also parties who have expertise in the fields of finance, economics and/or Sharia insurance and insurance.

### **Duties & Responsibilities of The Risk Monitoring Committee**

1. Ensuring that the risk management function runs properly in every department/division in the Company;
2. Reviewing risk exposure mapping and discussing it with the Underwriters and Directors;
3. Reviewing products marketed by the Company, new products and strategic business expansion;
4. Conducting evaluation of the Company's compliance with regulations and discussing solutions if violations occur;
5. Reviewing the delegation of authority along with the applicable escalation and monitoring the delegation of authority granted by the Board of Directors, as well as discussing the solution if there is a violation of authority;
6. Ensuring that the claim management system has been carried out properly and efficiently;
7. Evaluating risk management policies and strategies both in operational and business development of the Company;
8. Assisting the evaluation of policies and risk management implementation strategies and its mitigation on the Company's business and investment plans as well as operational implementation in terms of financial and legal aspects;
9. Reporting the results of monitoring and evaluation and providing recommendations on matters that require attention of the Board of Commissioners.

### **Powers of Risk Monitoring Committee**

1. The Risk Monitoring Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is responsible to the Board of Commissioners;
2. The Risk Monitoring Committee has the authority to obtain the Company's information related to the implementation of risk management implemented by the Company;
3. If necessary, the Risk Monitoring Committee may hire experts and/or consultants to assist the Risk Monitoring Committee in relation to the Company's business development plans upon written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense which is allocated from the Board of Commissioners' budget.





**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

Susunan Komposisi Komite Pemantau Risiko selama 2021:

Composition of the Risk Monitoring Committee in 2021:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Tenure
Ronald Waas	Ketua Chair	14 Agustus 2019 August 14, 2019	004/S.Kep/P.Kom-SLP/ VIII/2019	3 Tahun 3 Years
Danny Kirpalani	Anggota Member	14 Agustus 2019 August 14, 2019	004/S.Kep/P.Kom-SLP/ VIII/2019	3 Tahun 3 Years
Abdulloh	Anggota Member	14 Agustus 2019 August 14, 2019	004/S.Kep/P.Kom-SLP/ VIII/2019	3 Tahun 3 Years
Windrarta	Anggota Member	14 Agustus 2019 August 14, 2019	004/S.Kep/P.Kom-SLP/ VIII/2019	3 Tahun 3 Years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Pemantau Kebijakan Risiko:

The following are short profiles of Risk Policy Monitoring Committee:

**Ronald Waas**

Ketua Komite Pemantau Risiko  
Masa Jabatan: 2019 - 2022  
Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

**Ronald Waas**

Head of Risk Monitoring Committee  
Term of Office: 2019-2022  
His short profile, education history and work experience can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Commissioners section.

**Danny Kirpalani**

Anggota Komite Pemantau Risiko  
Masa Jabatan : 2019 - 2022  
Daftar Riwayat Danny Kirpalani dapat dilihat di bagian Komite Pengembang Produk Asuransi & Sharia.

**Danny Kirpalani**

Risk Monitoring Committee Member  
Term of Office: 2019-2022  
Curriculum Vitae of Danny Kirpalani can be seen in the Insurance & Sharia Product Development Committee section.

**Abdulloh**

Anggota Komite Pemantau Risiko  
Masa Jabatan : 2019 - 2022  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 1974, berdomisili di Depok.

**Abdulloh**

Risk Monitoring Committee Member  
Term of Office: 2019-2022  
Indonesian citizen, born in Jakarta on January 26, 1974, per December 31, 2021 aged 47 years old, domiciled in Depok.

Meraih gelar Sarjana Matematika dari jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam- Universitas Indonesia pada tahun 1998. Beberapa Sertifikasi Ahli yang dimiliki yaitu: Fellow Aktuaris, Ajun Ahli Asuransi, dan Wakil Manajer Investasi. Beliau memiliki pengalaman 17 tahun di bidang Asuransi. Adapun pengalaman dan keahlian yang dimiliki meliputi bidang Aktuaria, Reasuransi, Pengembangan Produk, dan Investasi.

He earned a Bachelor's degree in Mathematics from the Department of Mathematics and Natural Sciences- University of Indonesia in 1998. Some of the Expert Certifications he received are: Actuary Fellow, Insurance Expert Adjunct, and Deputy Investment Manager. He has 17 years of experience in the insurance sector. His experience and expertise covers the fields of Actuarial, Reinsurance, Product Development, and Investment.

Adapun Jabatan yang pernah diduduki adalah (i) sebagai Assistant manager di PT Asuransi Sinar Mas (2000-2006); (ii) sebagai Senior Executive Actuary di PT Prudential Assurance (2006-2007); (iii) sebagai Senior Manager di PT Sunlife

His past job titles were (i) as Assistant manager at PT Asuransi Sinar Mas (2000-2006); (ii) as Senior Executive Actuary at PT Prudential Assurance (2006-2007); (iii) as Senior Manager at PT Sunlife Indonesia (2007-2012); (iv) as Head of Product



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

Indonesia (2007-2012); (iv) sebagai Kepala Pengelolaan dan Pengembangan Produk di PT Great Eastern Indonesia (2012-2013); (v) sebagai Aktuaris dan Wakil Manajer Investasi di Cigna Indonesia (2013-2017); (vi) sebagai Kepala Divisi Aktuarial dan Pengembangan Produk di PT Asuransi Bintang Tbk hingga saat ini.

Beliau pernah mengikuti pelatihan di bidang Aktuarial, produk, reasuransi dan investasi baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Beliau juga aktif di organisasi Persatuan Aktuaris Indonesia membawahi bidang Asuransi Umum.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Berikut seminar/pelatihan yang diikuti selama tahun 2021:

Management and Development at PT Great Eastern Indonesia (2012-2013); (v) as Actuary and Investment Manager Representative at Cigna Indonesia (2013-2017); and (vi) as Head of Actuarial and Product Development Division at PT Asuransi Bintang Tbk (current)

He has attended training in the fields of Actuarial, product, reinsurance and investment both domestically and abroad. He is also active in the Association of Indonesian Actuaries in charge of General Insurance.

Currently he also serves as a Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Seminar/ trainings attended in 2021 are as follows:

No	Topik PPL PPL Topic	Kegiatan PPL   PPL Activities			
		Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organized By	Total Hours
1	Pendidikan Profesional Lanjutan Aktuaris Advanced Professional Actuary Education	Jakarta	23-30 September 2021 September 23-30, 2021	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)	5 jam 5 hours
2	Actuarial Role & Contribution to Law Case Studies in the UK	Jakarta	17 Juni 2021 June 17, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	2 jam 2 hours
3	Actuarial System and Modeling	Jakarta	22 Juli 2021 July 22, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	2 jam 2 hours
4	Fungsi Aktuarial di Asuransi Umum Actuary Function in General Insurance	Jakarta	21 Juli 2021 July 21, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	2 jam 2 hours
5	Measurements in IFRS 17- General Insurance	Jakarta	4, 11 dan 18 Agustus 2021 August 4, 11 and 18, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	6 jam 6 hours
6	Webinar Actuarial Joint Regional Seminar	Jakarta	8 dan 13 September 2021 September 8, 13, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	7 jam 7 hours
7	Sinergi Profesi Aktuarial Membangun Jaminan Purna Karya yang Andal menuju Indonesia Emas 2045 Synergy of Actuary in Building Excellent Post-Work Allowance towards Indonesia Emas 2045	Jakarta	13 Oktober 2021 October 13, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	2 jam 2 hours
8	Pelatihan Pembuatan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Dalam Rangka Implementasi PSAK 74(IFRS 17) tentang Kontrak Asuransi Create Gap Analysis Training in Implementing PSAK 74 (IFRS 17) on Insurance Contract	Jakarta	8, 9, 11 dan 12 November 2021 November 8, 9, 11, and 12, 2021	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	16 jam 16 hours



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

**Windrarta**

Anggota Komite Pemantau Risiko  
Masa Jabatan: 2019 - 2022

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 2 Januari 1971 (usia 40 tahun), berdomisili di Permata Puri "Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1953, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Kebijakan Risiko sejak tanggal 5 Juni 2015. Beliau meraih gelar di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Inti Samudera Prakarsa Telecommunication Infra Structure Provider dan tahun 1994 sebagai Direktur di PT Branusa – Quantity Surveyors and Construction Cost Consultant.

Selama tahun 2021 tidak terdapat pelatihan/ seminar yang diikuti

**Rangkap Jabatan**

Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Assindo Perniagaan Internasional, sebagai Komisaris pada PT Samudera Indonesia Tangguh dan PT Kosa Ikibari Wira."

**Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko memiliki kedudukan dan bertindak secara Independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan;
2. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan- peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Kebijakan Risiko

**Windrarta**

Risk Monitoring Committee Member  
Term of Office: 2019 - 2022

Indonesian citizen, born in Jakarta on January 2, 1971 (aged 40 years old), domiciles in Permata Puri. Indonesian citizen, born in Jakarta on July 28, 1953, domiciles in Jakarta. Serving as a Risk Policy Monitoring Committee member since June 5th, 2015. Earned his degree in Mathematics from Bandung Institute of Technology in 1985. He once served as a Director at PT Inti Samudera Prakarsa Telecommunication Infra Structure Provider and in 1994 served as a Director in PT Branusa - Quality Surveyor and Construction Cost Consultant.

In 2021, there is no training/ seminar attended.

**Concurrent Positions**

Currently, he still serves as President Director at PT AssindoPerniagaan Internasional, as Commissioner at PT Samudera Indonesia Tangguh and PT Kosa Ikibari Wira.

**Independency Statement Of Risk Monitoring Committee**

Risk Monitoring Committee has a position and acts independently, objectively and professionally in carrying out its duties and responsibilities as stipulated in the Charter as follows:

1. Risk Monitoring Committee must be free from any intervention from the Company's stakeholders;
2. Risk Monitoring Committee must be free from all conflicts of interest and the influence or pressure of any party that is not in accordance with the laws and regulations in the field of insurance and sharia insurance, and code of conduct, principles, and practices in conducting insurance and sharia insurance business as well as Company policies that may occur during the implementation of the duties and responsibilities of Risk Policy Monitoring Committee.



### Kebijakan Dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Kebijakan Risiko

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan juga tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Kebijakan Risiko mengadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

### Policy and Implementation of the Meeting of Risk Policy Monitoring Committee

As regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.05/2019 concerning the Establishment, Membership Structure, and Term of Office of the Committee of the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company and as set out in the Risk Monitoring Committee Charter, the Committee is required to hold regular meetings at least once (1) in 3 (three) months.

During 2021, the Risk Policy Monitoring Committee held 4 (four) meetings with attendance details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Ronald Waas	Ketua Chair	4	100
Danny Kirpalani	Anggota Member	4	100
Abdulloh	Anggota Member	4	100
Windrarta	Anggota Member	4	100

No	Program Kerja Work Plan	Realisasi Realization
1	Review atas program treaty tahun 2021 - 2022 Treaty program review for year 2021-2022	Komite menilai bahwa Perusahaan telah memiliki program-program treaty yang sesuai dan memadai untuk setiap lini usaha asuransi yang dijalankan, baik perlindungan atas setiap risiko maupun atas risiko katastrofik. Besarnya retensi sendiri dan penggunaan dukungan reasuransi dalam negeri dinilai telah memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK yang berlaku. The Committee considers that the Company has appropriate and adequate treaty programs for each insurance business line, both protection for each risk and for catastrophic risk. The amount of self-retention and the use of domestic reinsurance support are considered to have complied with the provisions of the applicable Financial Services Authority regulations.
2	Review atas penerapan akuntansi PSAK 74 ("IFRS 17") terhadap dampak operasional perusahaan Review on the implementation of PSAK 74 ("IFRS 17"), on the operational impact of the Company.	Komite telah melakukan review atas penerapan PSAK 74 ("IFRS 17") terhadap dampak operasional perusahaan. Berdasarkan keputusan Dewan Standar Akuntansi (DSAK) bahwa PSAK 74 ("IFRS 17") akan mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2025 Review dilakukan atas portofolio perusahaan dengan menggunakan model pengukuran IFRS 17 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premium Allocation Approach Measurement (PAA)</li> <li>• General Model Measurement (GMM)</li> </ul> Review juga dilakukan pada dampak dan tantangan pada penerapan PSAK 74 ("IFRS 17") pada kesiapan sumberdaya manusia, manajemen risiko, system infrastruktur, sumber daya operasional.



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

No	Program Kerja Work Plan	Realisasi Realization
		<p>Based on the decision of the Accounting Standards Board (DSAK) that PSAK 74 ("IFRS 17") will be enacted on January 1, 2025 The review is carried out on the company's portfolio using the IFRS 17's measurement model</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premium Allocation Approach Measurement (PAA)</li> <li>• General Model Measurement (GMM)</li> </ul> <p>A review is also carried out on the impacts and challenges of implementing PSAK 74 ("IFRS 17") on the readiness of human resources, risk management, infrastructure systems, and operational resources.</p>
3	<p>Review atas Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Review of the Assessment of Company's Health Level</p>	<p>Komite telah melakukan review atas POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ("LJKNB") Faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan secara individual</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan</li> <li>2. Profil Risiko</li> <li>3. Rentabilitas</li> <li>4. Permodalan</li> </ol> <p>Committee has review POJK No.28/ POJK 05/ 2020 on Assessment of Company's Health Level ("LJKNB"), Factor assessed in company's assessment on Financial Health</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Good Corporate Governance for the Company</li> <li>2. Risk Profile</li> <li>3. Profitability</li> <li>4. Capital</li> </ol>
4	<p>Review atas produk Asuransi Tanaman Berbasis Indeks Index-Based Plant Insurance (ATBI)</p>	<p>Komite telah melakukan review kontrak opsi pada produk Asuransi Tanaman Berbasis Indeks ("ATBI") Pada produk Asuransi Tanaman Berbasis Indeks ("ATBI") yang akan dipasarkan oleh perusahaan telah memiliki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SmartContract Platform, yaitu kontrak berbasis elektronik blockchain rule code.</li> <li>• SmartContrak Custodian, yaitu AAUI.</li> <li>• Penggunaan data satelit NOAA &amp; Copernicus bagi pengukuran indeks kelembaban tanah (soil moisture index).</li> <li>• Penggunaan variable peristiwa pemicu (triggering event) berdasarkan kajian dan riset dari berbagai pihak (tim peneliti AAUI, MAIPARK dsb) dimana pada kajian telah menggunakan model black-scholes dan ARIMA.</li> </ul> <p>The Committee has reviewed the option contract on Index-Based Plant Insurance ("ATBI") products In Index-Based Plant Insurance ("ATBI") product, which will be marketed by the company, the company already has:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• smart Contract Platform, which is a blockchain rule code based on electronic contract.</li> <li>• smart Custodian Contract, namely AAUI.</li> <li>• c) Use of NOAA &amp; Copernicus satellite data for soil moisture index measurement.</li> <li>• The use of triggering event variables based on studies and research from various parties (AAUI research team, MAIPARK, etc.) where the study has used black-scholes and ARIMA models.</li> </ul>



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang juga telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di sumber daya manusia; pejabat eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi ini diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris.

### Tugas & Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dibedakan dalam hal Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

#### Dalam Hal Nominasi:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan;
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Mencari dan mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
4. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi.

#### Dalam hal Remunerasi:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable;

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

### Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee holds a Nomination and Remuneration Committee Charter that guides the execution of their duties which has also been adjusted to the regulation. The charter has been revised and verified by Board of Commissioners dated August 19th, 2016. According to the charter, the Nomination and Remuneration Committee must consist of at least 3 (three) people from the member of Board of Commissioners, independent parties with expertise, knowledge, and experience in human resources field; an executive officer that manages the human resources division. The Nomination and Remuneration Committee is headed by member of Board of Commissioners.

### Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

The committee carries duties and responsibilities that are divided into Nomination and Remuneration as follows:

#### In Nomination:

1. Compile selection criteria and nomination procedure for members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and Executive Officers;
2. Create evaluation system and give recommendations on the required numbers of members of Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Search for and propose candidates for Board of Directors and members of Board of Commissioners to obtain a decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the Company's Articles of Association;
4. Recommend independent parties that will become members of Nomination and Remuneration Committee.

#### In Remuneration

1. Study the laws and regulations that are applicable to remuneration policies;
2. Ensure the company has a transparent remuneration system which includes permanent salary or honorarium, allowances, fixed facilities, and variable incentives;



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

3. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris, Direksi, apabila diperlukan untuk usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Melakukan evaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya.

3. Assist Board of Commissioners in formulating and deciding remuneration policies including permanent salary or honorarium, allowances, fixed facilities, and variable incentives Board of Commissioners, Board of Directors when required in proposing to General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Evaluates employees benefit system, allowances, and other incentives.

**Wewenang Komite Nominasi Dan Remunerasi**

1. Komite Nominasi Dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi Dan Remunerasi memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Komite Nominasi Dan Remunerasi berwenang memberikan rekomendasi mengenai nominasi dan remunerasi kepada Perusahaan.

**Authority of Nomination and Remuneration Committee**

1. The Nomination and Remuneration Committee works collectively and independently in fulfilling their responsibilities towards Board of Commissioners;
2. The Nomination and Remuneration Committee holds the authority to acquire company's information pertaining to the application of nomination and remuneration implemented by the Company;
3. The Nomination and Remuneration Committee is authorized to give recommendation on nomination and remuneration to the Company.

**Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi:**

**Structure and composition of Members of Nomination and Remuneration Committee:**

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Tanggal Pengangkatan</b> Date of Appointment	<b>Dasar Pengangkatan</b> Basis of Appointment	<b>Periode</b> Period	<b>Masa Jabatan</b> Tenure
Shanti L. Poesposoetjipto	Ketua Chair	20 Desember 2019 December 20, 2019	SK No.018/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	III	3 Tahun 3 Years
Petronius Saragih	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20, 2019	SK No.018/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	III	3 Tahun 3 Years
Ronald Waas	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20, 2019	SK No.018/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	III	3 Tahun 3 Years
Heru Prioyotomo	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20, 2019	SK No.018/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019	I	3 Tahun 3 Years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Below are the short profiles of the Members of Nomination and Remuneration Committee

**Shanti L. Poesposoetjipto**

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi  
Masa Jabatan : 2019-2022  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

**Shanti L. Poesposoetjipto**

Head of Nomination and Remuneration Committee  
Office Term: 2019 - 2022  
The short profile can be seen in Board of Commissioner's Curriculum Vitae.

**Petronius Saragih**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
  
Masa Jabatan : 2019-2022  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

**Petronius Saragih**

Member of Nomination and Remuneration Committee  
Office Term: 2019 - 2022  
The short profile can be seen in Board of Commissioner's Curriculum Vitae.



### **Ronald Waas**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan : 2019-2022

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

### **Heru Priyotomo**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan : 2019-2022

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 2 Januari 1971 (49 tahun), berdomisili di Permata Puri Laguna Blok C2 Nomor 10 Cimanggis Depok. Meraih gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma (1989 – 1993).

Beberapa Sertifikat Ahli yang dimiliki yaitu: Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) dari LSP MSDM, Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari LSP MKS.

Berpengalaman dalam tim multikultural terkemuka di Information & Communication Technology (ICT), dan menggabungkan keterampilan dalam Human Resources, Management, Marketing dan Corporate selama 29 tahun.

Adapun jabatan yang pernah diduduki adalah (i) sebagai staff di R&D Division Gunadarma di Universitas Gunadarma, Jakarta (1991-1994); (ii) sebagai Manager di KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) sebagai COO (Chief Operating Officer) di PT. Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008-2009); (iv) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009-2011); (v) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011 – Agustus 2011); (vi) sebagai IT Group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011- 2013); (vii) sebagai Human Resources & General affair group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011 – hingga saat ini).

Kegiatan pendidikan/pelatihan yang diikuti selama tahun 2021:

1. Membangun Human Capital Development Berbasis KPI dan Manajemen Risiko di Perusahaan Perasuransian pada tanggal 29 April 2021 yang dilaksanakan oleh Widya Dharma Artha
2. Sosialisasi Vaksin Mandiri Gotong Royong pada tanggal 29 April 2021 yang dilaksanakan oleh AAUI

### **Ronald Waas**

Member of Nomination and Remuneration Committee

Office Term: 2019 - 2022

The short profile, can be seen in Board of Commissioner's Curriculum Vitae.

### **Heru Priyotomo**

Member of Nomination and Remuneration Committee

Office Term: 2019 - 2022

Indonesian citizen, born in Banjarbaru, South Kalimantan, on January 2nd, 1971, domiciles in Permata Puri Laguna Blok C2 Number 10 Cimanggis Depok. Earned a bachelor's degree in Computer Engineering from Universitas Gunadarma (1989 – 1993).

Some Expert Certificates owned are the following: Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) from LSP MSDM, Qualified Risk Officer (QCRO) from LSP MKS.

Experienced in famed multicultural team in Information & Communication Technology (ICT), and combined skills in Human Resources, Management, Marketing, and Corporate for 29 years.

As for the positions that have been occupied are as such (i) staff in R&D Division Gunadarma in Universitas Gunadarma, Jakarta (1991-1994); (ii) Manager in KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) COO (Chief Operating Officer) in PT. Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008-2009); (iv) CCO (Chief Corporate Officer) in PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011 – August 2011); (vi) IT Group Head in PT. Asuransi Bintang Tbk (2011-2013); (vii) Human Resources & General Affair Group Head in PT Asuransi Bintang Tbk (2011-present).

Education/training activities attended during 2021:

1. Building KPI-Based Human Capital Development and Risk Management in Insurance Companies on April 29, 2021 carried out by Widya Dharma Artha
2. Socialization of the Independent Mutual Cooperation Vaccine on April 29, 2021 which was carried out by AAUI





### Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Committees Supporting The Board Of Commissioners

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. Assessment For Heru C. Priyotomo pada tanggal 03 Mei 2021 yang dilaksanakan oleh Daya Dimensi Indonesia</li><li>4. Training Penilaian Kualitatif atas Kinerja Pegawai 2021 pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh Perusahaan</li><li>5. Webinar ISJ Overseas Seminar (Online) Jakarta 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh AAUI</li><li>6. HR Gathering AAUI Program Aktuaris 2022 pada tanggal 07 Oktober 2021 yang dilaksanakan oleh AAUI</li><li>7. Persiapan Perusahaan Asuransi sebagai Pengusaha Kena Pajak - Implikasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dilaksanakan oleh AAUI;</li><li>8. RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) pada tanggal 24 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Perusahaan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Assessment For Heru C. Priyotomo on May 3, 2021 conducted by Daya Dimensi Indonesia</li><li>4. Qualitative Assessment Training on Employee Performance 2021 on July 13, 2021 conducted by the Company</li><li>5. Webinar ISJ Overseas Seminar (Online) Jakarta 2021 on August 31, 2021 held by AAUI</li><li>6. HR Gathering AAUI Actuary Program 2022 on 07 October 2021 held by AAUI</li><li>7. Preparation of Insurance Companies as Taxable Entrepreneurs - Implications of the Law on Harmonization of Tax Regulations on October 21, 2021 implemented by AAUI;</li><li>8. RAKB (Sustainable Financial Action Plan) on December 24, 2021,</li></ol> |
|---|--|

### Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan;
2. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi.

### Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sesuai kebutuhan Perusahaan.

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan sebanyak 1 (satu) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

### Independence Statement Of The Nomination And Remuneration Committee

1. The Nomination and Remuneration Committee has to be free from all intervention from the Company's stakeholder.
2. The Nomination and Remuneration Committee must be free from all conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations in the field of insurance and Islamic insurance and ethical values as well as standards, principles, and healthy practices in implementing insurance and Islamic insurances, as well as Company policies that may occur during the implementation of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee.

### Policy and Implementation of Nomination and Remuneration Meetings

As regulated by circular letter from Financial Service Authority (OJK) No. 14/SEOJK.05/2019 on Committee of Board of Commissioners of Insurance Company, Islamic Insurance Company, Reinsurance Company, and Islamic Reinsurance Company, the Nomination and Remuneration Committee is obliged to hold meetings according to the needs of the Company.

During 2021, the Nomination and Remuneration Committee held 1 (one) meeting with attendance details as follows:



## Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Committees Supporting The Board Of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Shanti L. Poesposoetjipto	Ketua Chair	1	100
Petronius Saragih	Anggota Member	1	100
Ronald Waas	Anggota Member	1	100
Heru Priyotomo	Anggota Member	1	100

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat, serta wajib didokumentasikan secara baik. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

### Pengungkapan dan Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi Dan Remunerasi menyampaikan laporan atas aktifitas Komite Nominasi Dan Remunerasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan Komite Nominasi Dan Remunerasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi Dan Remunerasi wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:
  - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi;
  - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam buku tahunan.

The result of Nomination and Remuneration Committee meeting must be included in the minutes of meeting and initialed by all members of Nomination and Remuneration Committee and signed by the Chairman of the meeting, and it also must be well documented. It is obligatory for the minutes of meeting of Nomination and Remuneration Committee to be presented in writing to Board of Commissioners.

### Disclosure and Report of Nomination and Remuneration Committee

1. Nomination and Remuneration Committee submits periodical report on the activities of Nomination and Remuneration Committee at least once in one (1) year, or as requested by Board of Commissioners on the work results report;
2. The report of Nomination and Remuneration Committee is a part of report of duties implementation of Board of Commissioners and is presented on General Meeting of Shareholders (GMS);
3. The implementation of Nomination and Remuneration Committee must be included in the annual report on the Company's website that at least consist of:
  - a. A statement, stating that the Company has had Nomination and Remuneration Committee Charter;
  - b. A short description on duties and responsibilities implementation of the Nomination and Remuneration Committee in the annual report



**Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris**  
Committees Supporting The Board Of Commissioners

**Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Selama Tahun 2021**  
**Implementation Of The Nomination And Remuneration Committee Activities In 2021**

No	Program Kerja Work Plan	Realisasi Realization
1.	<p>Mengkaji dan mengusulkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.</p> <p>Review and recommends the remuneration of Members of Board of Commissioners and Board of Directors.</p>	<p>Penetapan usulan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS yang diselenggarakan pada bulan Juli 2021</p> <p>Determination of the proposed amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors at the GMS held in July 2021</p>
2.	<p>Memonitor pemenuhan syarat berkelanjutan bagi seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi</p> <p>Monitoring the compliance toward sustained requirements for all Board of Commissioners and Directors.</p>	<p>Pemenuhan seluruh syarat berkelanjutan bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana laporan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>Fulfillment of all sustainable requirements for the Board of Commissioners and the Board of Directors as reported by the Company to the Financial Services Authority</p>
3.	<p>Memonitor komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>Monitoring the composition of Board of Commissioners and Directors in accordance with applied laws and regulations.</p>	<p>Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan peraturan terkait komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sehingga komposisi yang ada masih memenuhi peraturan yang berlaku.</p> <p>There was no regulation change related to the composition of Board of Commissioners and Directors therefore the existing composition are still complied with applicable regulations.</p>



## Komite - Komite Penunjang Direksi

### Committees Supporting Board Of Directors

Sesuai dengan Peraturan OJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan sesuai dengan Peraturan OJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank maka, PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite – Komite dibawah Direksi yaitu:

1. Komite Investasi; dan
2. Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah
3. Komite Manajemen Risiko

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah dan Komite Manajemen Risiko:

#### KOMITE INVESTASI

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Investasi yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi dan Aktuaris atau Tenaga ahli Perusahaan.

#### Tugas & Tanggungjawab Komite Investasi

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
3. Memberikan arahan investasi, sebagai pedoman pengelolaan investasi;
4. Menelaah tingkat kepatuhan terhadap arahan investasi dan peraturan dari Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kegiatan investasi;
5. Melakukan penelaahan atas pengelolaan investasi yang sifatnya khusus.

Berikut ini adalah susunan dan komposisi Komite Investasi selama 2021 :

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Tenure
Jenry Cardo Manurung	Ketua Chair	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	I	5 tahun years

In accordance with OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, then PT Asuransi Bintang Tbk has Committees under the Board of Directors, namely:

1. Investment Committee; and
2. Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.
3. Risk Management Committee

Details on Investment Committee, Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee and Risk Management Committee are described below:

#### INVESTMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has an Investment Committee consisting of a Board of Directors who supervise the function of investment management and Actuaries or Company experts.

#### Duties and Responsibilities of Investment Committee

1. Assisting Board of Directors in formulating investment policies;
2. Supervising the implementation of investment policies that has been determined;
3. Providing investment guidelines as the rules for investment management;
4. Reviewing the level of compliance between investment guideline and regulations related to investment activities from the Minister of Finance;
5. Reviewing special investment portfolio management

The following is structure and composition of Investment Committee in 2021:



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Tenure
Abdulloh	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/ IV/2021	I	5 tahun years
Fajar Setiawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/ IV/2021	I	5 tahun years
Rahmat Hermawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/ IV/2021	II	5 tahun years
Pahrudin	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/ IV/2021	II	5 tahun years
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/ IV/2021	I	5 tahun years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Investas:

The following are short profiles of the Investment Committee:

**Jenry Cardo Manurung**

Ketua Komite Investasi  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Jenry Cardo Manurung**

Head of Investment Committee  
Short profile can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

**Hastanto Sri Margi Widodo**

Anggota Komite Investasi  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Hastanto Sri Margi Widodo**

Member of Investment Committee  
Short profile can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

**Reniwati Darmakusumah**

Anggota Komite Investasi  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Reniwati Darmakusumah**

Member of Investment Committee  
Short profile can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

**Zafar Dinesh Idham**

Anggota Komite Investasi  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Zafar Dinesh Idham**

Member of Investment Committee  
Short profile can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

**Abdulloh**

Anggota Komite Investasi  
Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko

**Abdulloh**

Member of Investment Committee  
Short profile can be seen in the Risk Monitoring Committee.

**Fajar Setiawan**

Anggota Komite Investasi

**Fajar Setiawan**

Member of Investment Committee

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 November 1985, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar sarjananya dari Universitas Trisakti pada tahun 2009 dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Indonesian citizen, born in Jakarta on November 22nd, 1985, domiciles in Tangerang. He earned his bachelor's degree from Trisakti University in 2009 and obtained his Masters in Management at Trisakti University in 2012.



## Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

Mulai karirnya pada tahun 2010 di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata (PKF International) dan terakhir di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens International Limited). Memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun memberikan jasa audit, konsultasi, dan akuntansi, dan berpengalaman dalam audit dan praktek pelaporan keuangan terutama untuk industri Asuransi, Dana Pensiun, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2019, Beliau telah memiliki sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan menjadi anggota aktif serta pada tahun 2020 meraih gelar Qualified Chief Risk Officer dari Lembaga Sertifikasi Profesi – MKS.

### Rahmat Hermawan

Anggota Komite Investasi

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup di bagian Pengendalian Internal.

### Pahrudin

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1972, berdomisili di Jakarta. Pada tahun 2003, beliau pernah menyelesaikan pendidikan asuransi di Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dan pendidikan di Universitas Islam Azzahra jurusan Perbankan.

Tahun 1993 beliau pernah bekerja di PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai Accounting and Finance Staff. Memulai karirnya di tahun 1994 bekerja di PT. Asuransi Bintang Tbk sebagai Finance Staff, pada tahun 2000 menjadi Finance supervisor, tahun 2006 menjadi Asisten Manager Finance dan tahun 2015 menjabat Treasury and Investment Department Head hingga saat ini.

Tahun 2014, beliau mendapatkan sertifikat "Certificate in General Insurance", tahun 2015 lulus dari pendidikan Capital Market Training and Education dalam Program Fund Manager Training dan lulus pada ujian Keahlian Syariah Tingkat Dasar tahun 2015. Selama tahun 2016, Beliau mengikuti Pendidikan dan berbagai seminar tentang treasury dan Investasi di beberapa lembaga pendidikan.

Started his career in 2010 at Paul Hadiwinata Public Accounting Firm (PKF International) and most recently at Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (Moore Stephens International Limited). Having more than 9 years of experience in providing auditing, consulting and accounting services, and experience in audit and financial reporting practices, especially in the Insurance industry, Pension Funds, BPJS Health, and BPJS Employment.

In 2019, he obtained Certified Public Accountant (CPA) certification, which is the highest certification of the public accountant profession in Indonesia. The certificate is issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) where he became an active member therein.

### Rahmat Hermawan

Member of Investment Committee

Short profile, education background, and work experience can be seen in the Curriculum Vitae described under Internal Control section.

### Pahrudin

Member of Investment Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on February 2nd, 1972, domiciles in Jakarta. In 2003, he completed his insurance education at Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia and at Universitas Islam Azzahra majoring in Banking.

In 1993 he worked at PT Asuransi Jasa Indonesia as an Accounting and Finance Staff. Started his career in 1994 at PT. Asuransi Bintang Tbk as Finance Staff, in 2000 became a Finance supervisor, and became Assistant Manager of Finance in 2006, while in 2015 he served as Treasury and Investment Department Head up to present.

In 2014, he received a Certificate in General Insurance, while in 2015 he graduated from the Capital Market Training and Education in the Fund Manager Training Program and passed the Basic Level of Sharia Expertise test in 2015. During 2016, he attended Education and various seminars on treasury and investment in several educational institutions



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

**Ronni Nugrihyan Noor**  
Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 4 Oktober 1988, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Dharma Bumiputera pada tahun 2019. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang investasi dan keuangan untuk Perusahaan Asuransi, dengan pengalaman terakhir sebelumnya pada PT MNC Life Assurance. Memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi dengan izin OJK Nomor KEP-113/PM.211/WMI/2020 dan menjadi anggota asosiasi Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PwMII) dengan Nomor anggota 2020002418. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk. sejak 15 April 2021 sebagai Finance & Investment Group Head.

**Independensi Komite Investasi**

1. Komite Investasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan;
2. Komite Investasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi.

**Kebijakan Dan Pelaksanaan Rapat Komite Investasi**

Selama tahun 2021, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Jenry Cardo Manurung	Ketua Chair	1	100%
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100%
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100%
Abdulloh	Anggota Member	1	100%
Fajar Setiawan	Anggota Member	1	100%

**Ronni Nugrihyan Noor**  
Investment Committee Member

Indonesian citizen, born in Jakarta 4 October 1988, domiciled in Jakarta. Earned his Bachelor of Economics degree at STIE Dharma Bumiputera in 2019. He has more than 10 years of experience in investment and finance for Insurance Companies, with his last experience being at PT MNC Life Assurance. Has an Investment Manager Representative certification with OJK license Number KEP-113/PM.211/WMI/2020 and is a member of the Association of Investment Manager Representatives (PwMII) with member number 2020002418. Joined PT Asuransi Bintang Tbk. since 15 April 2021 as Finance & Investment Group Head.

**Independency of Investment Committee**

1. The Investment Committee must be free from any intervention from the Company's stakeholders;
2. The Investment Committee must be free from all conflicts of interest and influence or pressure from any party that is against the laws and regulations in the field of insurance and ethical values as well as standards, principles, and practices in the implementation of healthy sharia insurance and insurance business as well as Company policies that may occur during the implementation of duties and responsibilities of the Investment Committee.

**Policy and Implementation of Investment Committee Meeting**

During 2021, the Investment Committee has held 1 (one) meetings with the following details:



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Rahmat Hermawan	Anggota Member	1	100%
Pahrudin	Anggota Member	1	100%
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	1	100%

### Pengungkapan and Pelaporan Komite Investasi

- Komite Investasi menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Investasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Direksi melaporkan hasil kerja kepada Direksi;
- Laporan Komite Investasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

### Disclosure And Reporting Of Investment Committee

- The Investment Committee periodically submits a report on the activities of the Investment Committee at least once a year, or at the request of Board of Directors to report the work to Board of Directors;
- The Investment Committee Report is part of the report on the implementation of the duty of Board of Directors and shall be presented at the General Meeting of Shareholders;

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Penetapan target investasi tahun 2022 dan evaluasi kinerja investasi tahun 2021 Stipulation for 2022 investment target in investment performance evaluation for 2021	Ditetapkan target investasi 2022 dan evaluasi kinerja investasi tahun 2021 2022 investment target is set and investment performance evaluation for 2021
2.	Memenuhi ketentuan regulator mengenai investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sesuai POJK No. 1 tahun 2017 Fulfilling regulatory provisions about investment on Surat Berharga Negara (SBN) based on POJK No. 1 year 2017	Setiap bulan memonitor dan menyesuaikan dengan batasan minimal sebesar 20% dari total aset investasi Monthly monitoring and adjustment with minimum limit in the amount of 20% from the total of investment assets.
3.	Memonitor dana investasi agar tersedia untuk liabilitas teknis perusahaan Investment fund monitoring so that it is available for the company's technical liability	Menjaga ketersediaan dana investasi terhadap liabilitas teknis yang dimiliki oleh Perusahaan yang disesuaikan dengan jatuh tempo-nya Keeping the availability of investment fund towards the technical liability that the company possess adjusted with the due date
4.	Peningkatan tata kelola investasi untuk pencapaian hasil optimal Investment management improvement to achieve optimum results	Mereview dan memberi masukan atas rekomendasi strategis investasi Keuangan, mengambil keputusan untuk mencapai hasil investasi yang optimal dengan pengelolaan yang prudent. Review and giving advice on behalf of the financial recommendation strategy, taking decisions to achieve the optimal investment result with prudent management.





**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

**KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

**Tugas & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko**

1. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah susunan dan komposisi Komite Manajemen Risiko selama 2021 :

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE**

PT Asuransi Bintang Tbk has a Risk Management Committee consisting of the Board of Directors in charge of the compliance function.

**Duties & Responsibilities of Risk Management Committee**

1. formulation of policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management and its changes, including the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance, Risk Management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. improvement or adjustment of the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation of the implementation of Risk Management, among others improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's Risk profile, and the ineffectiveness of the implementation of Management Risk based on evaluation results; and
3. determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding the number of significant investment placements compared to the Company's previously determined business plan or taking positions or risk exposures that exceed the predetermined limits.

The following is the composition and composition of the Risk Management Committee for 2021:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Tenure
Zafar Dinesh Idham	Ketua Chair	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir-HW/VII/2021		5 tahun / years
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir-HW/VII/2021		5 tahun / years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir-HW/VII/2021		5 tahun / years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir-HW/VII/2021		5 tahun / years
Mulia Nugraha	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir-HW/VII/2021		5 tahun / years



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Tenure
Danny Kirpalani	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir- HW/VII/2021		5 tahun / years
Rahmat Hermawan	Anggota Member	04 Juli 2021 July 4, 2021	SK No. 010/S,Kep/P.Dir- HW/VII/2021		5 tahun / years

Berikut adalah profil singkat Komite Manajemen Risiko:

The following is a brief profile of the Risk Management Committee:

**Zafar Dinesh Idham**

Ketua Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Zafar Dinesh Idham**

Head of Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

**Hastanto Sri Margi Widodo**

Anggota Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Hastanto Sri Margi Widodo**

Member of the Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

**Jerry Cardo Manurung.**

Ketua Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Jerry Cardo Manurung.**

Head of Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

**Reniwati Darmakusumah**

Anggota Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

**Reniwati Darmakusumah**

Member of the Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

**Mulia Nugraha**

Anggota Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah dan Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

**Mulia Nugraha**

Member of the Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae List of the Insurance Product Development and Sharia Insurance Committee and the Good Corporate Governance Committee.

**Danny Kirpalani**

Anggota Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

**Danny Kirpalani**

Member of the Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Curriculum Vitae List of the Insurance Product Development and Sharia Insurance Committee and the Good Corporate Governance Committee.

**Rahmat Hermawan**

Anggota Komite Manajemen Risiko  
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Audit Internal

**Rahmat Hermawan**

Member of the Risk Management Committee  
A brief profile can be seen in the Internal Audit History List section



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

**Independensi Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko Perseroan memiliki independensi terhadap tanggung jawab dan fungsi sebagai Komite Manajemen Risiko. Perseroan tidak memiliki kewenangan atau melakukan tekanan terhadap Komite Manajemen Risiko dalam keterkaitan penentuan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.

**Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko**

Selama tahun 2021, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Zafar Dinesh Idham	Ketua Chair	1	100%
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	1	100%
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100%
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100%
Rahmat Hermawan	Anggota Member	1	100%

**Pengungkapan and Pelaporan Komite Manajemen Risiko**

Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen resiko Perseroan melalui pengawasan aktif terhadap setiap kebijakan bisnis Perseroan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja dan rapat dengan Direksi Perseroan.

**Risk Management Committee Independence**

The Company's Risk Management Committee is independent of the responsibilities and functions of the Risk Management Committee. The Company does not have the authority or exert pressure on the Risk Management Committee in relation to determining risk management policies and the Company's internal control.

**Policy and Implementation of Risk Management Committee Meetings**

During 2021, the Investment Committee has held 1 (one) meeting with the following details:

**Disclosure and Reporting of Risk Management Committee**

During 2021, the Risk Management Committee has carried out a supervisory function on the Company's risk management through active supervision of each of the Company's business policies. Active supervision is also carried out through working visits and meetings with the Company's Board of Directors.



## **KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH**

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi Pemasaran.

### **Tugas & Tanggung Jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah**

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah serta mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya;
4. Memberikan rekomendasi atas kelayakan pemasaran suatu produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
5. Melakukan evaluasi dan kajian kelayakan atas usulan pengembangan dan/atau pembuatan produk baru maupun atas produk-produk yang telah berjalan;
6. Menyusun prosedur kerja Komite untuk memastikan proses kerja Komite dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kaidah-kaidah perasuransian termasuk prinsip-prinsip syariah yang benar serta dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien;
7. Membuat model aplikasi perhitungan suku premi untuk semua jenis produk guna memastikan suku premi ditetapkan secara layak berdasarkan analisis potensi risiko dan parameter-parameter lainnya yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu;
8. Memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan, baik itu produk yang sedang berjalan, produk hasil pengembangan maupun produk yang baru dibuat oleh Komite, telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator maupun Dewan Syariah Nasional;
9. Mendokumentasikan semua proses pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukannya.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah, Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

## **INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE**

PT Asuransi Bintang Tbk has an Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee consisting of a Director supervising Marketing function.

### **Duties and Responsibilities of Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee**

1. Preparing strategic plans for the development and marketing of insurance and/or sharia insurance products as part of the Company strategic business plan;
2. Evaluating the compatibility of new insurance products that will be marketed with development and marketing of insurance and/or sharia insurance product strategic plan;
3. Evaluating the performance of insurance and/or sharia insurance products, proposing changes of the product as well as stopping product from the market;
4. Providing recommendation for the marketing feasibility of insurance and/or sharia insurance products;
5. Evaluating and conducting the feasibility-study proposal for creating new products as well as enhancing existing products;
6. Establishing Committee standard operation to ensure the working process of the Committee is carried out consistently in accordance with the principles of risk management and insurance standards, including the correct sharia principles and carried out in an effective and efficient manner;
7. Creating an application for premium rates calculation modeling for all types of products to ensure premium rates are set properly based on analysis of risk potential and other parameters that can be evaluated from time to time;
8. Ensuring that all products are marketed, either existing, developed, or new products created by the Committee, have fulfilled the requirements set by the Regulator and the National Sharia Board;
9. Making documentation for all process of task implementation.

Based on Decree No. 006A/S.Kep/P.DIR-HW/IV/2021 concerning Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee, the composition of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee is as follows:



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Pemasaran sebagai ketua</li> <li>2. Group Head Product Dev. &amp; Actuary sebagai wakil ketua</li> <li>3. Group Head HR &amp; GA sebagai anggota</li> <li>4. Group Head Operation &amp; ICT sebagai anggota</li> <li>5. Group Head Underwriting &amp; Reinsurance sebagai anggota</li> <li>6. Group Head Risk Management &amp; Compliance sebagai anggota</li> <li>7. Group Head Internal audit sebagai anggota</li> <li>8. Group Head Business Dev. &amp; Strategic Partnering sebagai anggota</li> <li>9. Group Head Claim sebagai anggota</li> <li>10. Group Head Accounting &amp; Tax sebagai anggota</li> <li>11. Group Head Finance &amp; Investment sebagai anggota</li> <li>12. Group Head National Sales sebagai anggota</li> <li>13. Group Head Corporate Secretary &amp; Legal sebagai anggota</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marketing Director as head</li> <li>2. Group Head Product Dev. &amp; Actuary as deputy of head</li> <li>3. Group Head HR &amp; GA as member</li> <li>4. Group Head Operation &amp; ICT as member</li> <li>5. Group Head Underwriting &amp; Reinsurance as member</li> <li>6. Group Head Risk Management &amp; Compliance as member</li> <li>7. Group Head Internal audit as member</li> <li>8. Group Head Business Dev. &amp; Strategic Partnering as member</li> <li>9. Group Head Claim as member</li> <li>10. Group Head Accounting &amp; Tax as member</li> <li>11. Group Head Finance &amp; Investment as member</li> <li>12. Group Head National Sales as member</li> <li>13. Group Head Corporate Secretary &amp; Legal as member</li> </ol> |
|---|---|

Berikut ini Susunan dan komposisi Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah selama tahun 2021:

The following is a short profile of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Tenure
Reniwati Darmakusumah	Ketua Chair	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Abdulloh	Wakil Ketua Deputy Chair	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Heru C. Priyotomo	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Danny Kirpalani	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Mulia Nugraha	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Rahmat Hermawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Murdianto Mustafa	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Herdi Ruspandi	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Fajar Setiawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Ronni Nugrihyani Noor	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	I	5 tahun years
Alma Fatrizal	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Bob Setyanegara	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SKEP 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021	I	tahun



## Komite - Komite Penunjang Direksi Committees Supporting Board Of Directors

Berikut ini adalah profil singkat Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah:

### **Reniwati Darmakusumah**

Ketua Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

### **Abdulloh**

Wakil ketua Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko

### **Heru Priyotomo**

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 2 Januari 1971, berdomisili di Permata Puri Laguna Blok C2 Nomor 10 Cimanggis Depok.

Meraih gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma (1989 – 1993).

Beberapa Sertifikat Ahli yang dimiliki yaitu: Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) dari LSP MSDM, Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari LSP MKS.

Berpengalaman dalam tim multikultural terkemuka di Information & Communication Technology (ICT), dan menggabungkan keterampilan dalam Human Resources, Management, Marketing dan Corporate selama 29 tahun.

Adapun jabatan yang pernah diduduki adalah (i) sebagai staff di R&D Division Gunadarma di Universitas Gunadarma, Jakarta (1991-1994); (ii) sebagai Manager di KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) sebagai COO (Chief Operating Officer) di PT. Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008-2009); (iv) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009-2011); (v) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011

The following is a short profile of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee:

### **Reniwati Darmakusumah**

Head of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

Her short profile, education history, and work experience can be seen in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

### **Abdulloh**

Deputy of Head of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee Member

His Curriculum Vitae can be seen in the Risk Monitoring Committee section

### **Heru Priyotomo**

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

Indonesian citizen, born in Banjarbaru, South Kalimantan, on January 2nd, 1971, domiciles in Permata Puri Laguna Blok C2 Number 10 Cimanggis Depok.

He earned his Bachelor of Computer Engineering degree from Gunadarma University (1989 - 1993).

Several Certificates of Expertise include Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) from LSP MSDM, Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from LSP MKS.

Experienced in leading multicultural teams in Information & Communication Technology (ICT), and combines Human Resources, Management, Marketing and Corporate skills for 29 years.

Previously he served in a number of positions, namely as (i) staff in the Gunadarma R&D Division at Gunadarma University, Jakarta (1991-1994); (ii) as Manager at KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) as COO (Chief Operating Officer) at PT. Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008-2009); (iv) as CCO (Chief Corporate Officer) at PT. Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009-2011); (v) as CCO (Chief Corporate Officer) at PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011 - August 2011); (vi) as IT



### Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

– Agustus 2011); (vi) sebagai IT Group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011-2013); (vii) sebagai Human Resources & General affair group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011 – hingga saat ini).

Beliau pernah mengikuti pelatihan di Bidang Public Speaking, Management, Human Resources, General Affairs dan General Insurance baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

#### **Danny Kirpalani**

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 30 September 1973, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 1998. Dimulai tahun 1999 sebagai Management Trainee, tahun 2000-2006 penempatan di cabang Semarang, dengan posisi yang pernah diduduki sebagai Underwriter, Claim Officer, Kepala Seksi Teknik dan terakhir sebagai Kepala Bagian Teknik.

Tahun 2006 pindah ke Kantor Pusat sebagai Underwriter, tahun 2010 sebagai Underwriting Group Head, tahun 2014-2016 merangkap sebagai Underwriting & Reinsurance Group Head, tahun 2016-2020 sebagai Underwriting Group Head dan pada tanggal 20 Januari 2020 kembali diangkat sebagai Underwriting dan Reinsurance Group Head.

Pada tahun 2011 meraih sertifikasi Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K) dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia dan tahun 2019 meraih gelar Qualified Chief Risk Officer dari Lembaga Sertifikasi Profesi – MKS Kursus.

Seminar yang pernah diikuti antara lain pada tahun 2012 mengikuti kursus tentang Marine Insurance, tahun 2013 tentang Marine Hull Insurance, serta pada tahun 2016 seminar Reinsurance Plus dan Social Media & Cyber Risk Insurance yang semuanya diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Group Head at PT Asuransi Bintang Tbk (2011-2013); (vii) as Human Resources & General affair group Head at PT Asuransi Bintang Tbk (2011 - present).

He joined training in Public Speaking Field, Management, Human Resources, General affairs and General Insurance both domestically and abroad.

Currently serving as a member of Nomination & Remuneration Committee.

#### **Danny Kirpalani**

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Indonesian citizen, born in Surabaya on September 30th, 1973, domiciles in Jakarta. He earned his Bachelor's degree from the International Relations department of Airlangga University in 1998. Starting in 1999, he served as a Management Trainee, and was placed in the Semarang branch in 2000-2006 to hold several positions, namely Underwriter, Claim Officer, Head of Technical Section and finally as Head of Technical Department.

In the year 2006 moved to the Central Office as an Underwriter, in the year 2010 as Underwriting Group Head, from 2014-2016 concurrently as Underwriting & Reinsurance Group Head, from 2016-2020 as Underwriting Group Head and on the 20th of January, 2020 reappointed as Underwriting and Reinsurance Group Head.

In 2011 he received the Indonesian Insurance Expert certification in the Loss Sector (AAI-K) from the Association of Indonesian Insurance Management Experts and in 2019 he received the title of Qualified Chief Risk Officer from the Professional Certification Institute – MKS Course.

In 2012, he took a course on Marine Insurance, in 2013 about Marine Hull Insurance, and in 2016 participated in Reinsurance Plus and Social Media seminar & Cyber Risk Insurance seminar that was all held by Singapore College of Insurance.

Currently serving as a member of Risk Monitoring Committee and Risk Management Committee.



## Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

### Mulia Nugraha

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Daftar riwayat hidup dapat dilihat pada Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

### Rahmat Hermawan

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 8 September 1965, berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Magister of Management dari Prasetya Mulya Business School pada tahun 2003. Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk dan diangkat sebagai Group Head Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 066/S. KEP/HRD/PDIR-ZDI/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Pada tahun 1999-2000 Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Direktur Keuangan, Sistem dan Prosedur untuk membantu penyusunan dan implementasi Kode Akun Asuransi (KODASI) di PT Asuransi Bintang Tbk. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, dari tahun 1995-1999, Beliau pernah bekerja di Bank Uppindo sebagai Internal Audit untuk bidang Corporate Audit dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tim asistensi Bank Uppindo (BBKU). Lulusan terbaik Pendidikan Audit Internal Bank Angkatan 56 di Institut Bankir Indonesia (LPPI) dan memiliki sertifikasi sebagai Certified Fraud Examiners (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE); Qualified Risk Governance Profesional (QRGP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No.70209 2421 0000489 2017; Certified Enterprise Risk Governance (CERG – Certificate ID 3120201) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore dan Wakil Penjamin Emisi Efek (Underwriter Representative) dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal .

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko.

### Murdianto Mustafa

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Irian Jaya tanggal 15 Maret 1982, berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Business Dev. & Strategic Partnering Group Head sejak tanggal 01 Juni 2019. Pada tahun 2004, meraih gelar Sarjana

### Mulia Nugraha

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

His Curriculum Vitae can be seen on the Good Governance Committee section

### Rahmat Hermawan

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Indonesian citizen, born in Bandung on September 8th, 1965, domiciles in Jakarta. He earned his Master of Management degree from Prasetya Mulya Business School in 2003. He joined PT Asuransi Bintang Tbk and was appointed as Group Head of Internal Audit based on Decree No. 066/S. KEP/HRD/PDIR-ZDI/VI/2008 dated June 5, 2008. In 1999-2000 he served as Assistant Director of Finance, Systems and Procedures to assist in the preparation and implementation of Insurance Account Code (KODASI) at PT Asuransi Bintang Tbk. Before working at PT Asuransi Bintang Tbk, from 1995-1999, he worked at Bank Uppindo as Internal Audit for Corporate Audit and the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) as a Bank Uppindo (BBKU) assistance team. He became the best graduate of Bank Internal Audit Education Batch 56 at Institut Bankir Indonesia (LPPI) and holds certification as a Certified Fraud Examiners (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE); Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from the National Professional Certification Agency (BNSP) No.70209 2421 0000489 2017; Certified Enterprise Risk Governance (CERG -Certificate ID 3120201) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore and Underwriter Representative from the Capital Market Professional Standards Committee.

Currently serving as a member of Risk Management Risk.

### Murdianto Mustafa

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Indonesian citizen, born in Irian Jaya on March 15th, 1982, domiciles in Bogor. He served as Business Dev. & Strategic Partnering Group Head since June 1st, 2019. In 2004, he obtained his Bachelor of Agriculture degree from the Faculty of Agriculture,





### Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta - IPB) dengan program studi Manajemen Agribisnis. Pada tahun 2007 memulai karir di Bidang Asuransi dengan bergabung bekerja di PT Asuransi Sinarmas di Bagian Marketing dengan jabatan terakhir Sebagai Kepala Cabang Duri pada tahun 2011. Pada tahun 2011-2013 menjabat Business Associate PT Asuransi Adira Dinamika untuk divisi Bank BUMN dan Swasta National. Pada tahun 2013 - 2019 menjabat sebagai East Area Coordinator di PT Asuransi Bintang Tbk.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam hal manajemen risiko, tahun 2020 mengikuti Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/ Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

#### **Herdi Ruspandi**

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 26 Juni 1982, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Claim Group Head sejak tanggal 14 Nopember 2013. Pada tahun 2005, meraih gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT- UI) dengan program studi Teknik Mesin. Pada tahun 2011 meraih sertifikasi Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K) dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, pada tahun 2017 meraih gelar profesi Asuransi Syariah Tingkat Ajun Ahli (AIIIS) dari Islamic Insurance Society, dan Pada 2019 meraih . Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/ Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada tahun 2005-2010 pernah bekerja di PT Asuransi Purna Artha Nugraha di Bagian Klaim dan Underwriting dengan jabatan Kabag. Pada tahun 2010 pernah menjabat sebagai Manager Risk Management di PT Tugu Reasuransi Indonesia. Pada tahun 2012 pernah menjabat sebagai Senior Manager Underwriting dan Reasuransi di PT KSK Insurance Indonesia.

Bogor Agricultural University (Faperta - IPB) majoring in Agribusiness Management study program. In 2007 he began his career in the Insurance Field as he worked at PT Asuransi Sinarmas in Marketing Field with his last position as Head of Duri Branch in 2011. In 2011-2013 he served as Business Associate for the SOE and Private Bank divisions at PT Asuransi Adira Dinamika. In 2013 - 2019, he served as East Area Coordinator at PT Asuransi Bintang Tbk.

To improve the skills in management risk, in the year 2020 he participated in Risk Management Competency Certificate with Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

#### **Herdi Ruspandi**

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

Indonesian citizen, born in Bandung, June 26th, 1982, domiciles in Jakarta. Served as Claim Group Head since November 14, 2013. Earned his Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Faculty of Engineering of University of Indonesia (FT-UI) in 2005. In 2011, he received his Indonesian General Insurance Expert certification (Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K)) from the Indonesian Insurance Institute (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia). In 2017, he received professional certification of Sharia Insurance Expert (Associate) from the Islamic Insurance Society and Risk Management Competency Certificate with Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from the National Professional Certification Agency (BNSP). In 2005-2010, he worked at PT Asuransi Purna Artha Nugraha at Claim and Underwriting Division as Head of Division. In 2010, he served as Risk Management Manager at PT Tugu Reasuransi Indonesia. In 2012, he served as Underwriting and Reinsurance Senior Manager at PT KSK Insurance Indonesia.



## Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

### Fajar Setiawan

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Komite Investasi.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Investasi.

### Ronni Nugrihyan Noor

Anggota Komite Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 4 Oktober 1988, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Dharma Bumiputera pada tahun 2019. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang investasi dan keuangan untuk Perusahaan Asuransi, dengan pengalaman terakhir sebelumnya pada PT MNC Life Assurance. Memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi dengan izin OJK Nomor KEP-113/PM.211/WMI/2020 dan menjadi anggota asosiasi Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PVMII) dengan Nomor anggota 2020002418. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk. sejak 15 April 2021 sebagai Finance & Investment Group Head.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Investasi

### Alma Fatrizal

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang tanggal 28 November 1977, berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai National Sales & Agency Management sejak tanggal 01 Juni 2019. Pada tahun 2012, meraih Gelar Sarjana Ekonomi Asuransi Kerugian dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Pada tahun 2000-2006 pernah bekerja di PT Asuransi Tri Pakarta untuk bagian Marketing. Pada tahun 2011 - 2013 bekerja di PT. Asuransi Adira Dinamika menjabat sebagai Marketing Head. Pada tahun 2013 - 2019 menjabat sebagai West Area Coordinator di PT Asuransi Bintang Tbk.

### Fajar Setiawan

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

His short profile, education history and work experience can be seen in the Curriculum Vitae of the Investment Committee Section.

Currently serving as a member of Investment Committee.

### Ronni Nugrihyan Noor

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Indonesian citizen, born in Jakarta 4 October 1988, domiciled in Jakarta. Earned his Bachelor of Economics degree at STIE Dharma Bumiputera in 2019. He has more than 10 years of experience in investment and finance for Insurance Companies, with his last experience being at PT MNC Life Assurance. Has an Investment Manager Representative certification with OJK license Number KEP-113/PM.211/WMI/2020 and is a member of the Association of Investment Manager Representatives (PVMII) with member number 2020002418. Joined PT Asuransi Bintang Tbk. since 15 April 2021 as Finance & Investment Group Head.

Currently he serves as a Member of the Investment Committee.

### Alma Fatrizal

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

Indonesian citizen, born in Padang on November 28th, 1977, domiciles in Bogor. He served as National Sales & Agency Management since June 1st, 2019. In 2012, he earned his Bachelor of Economics degree in Insurance from Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. In 2000-2006, he worked at PT Asuransi Tri Pakarta in Marketing. In 2011 - 2013, he worked at PT. Asuransi Adira Dinamika as Marketing Head. In 2013 - 2019, he served as West Area Coordinator at PT Asuransi Bintang Tbk.



### Komite - Komite Penunjang Direksi

Committees Supporting Board Of Directors

#### **Bob Setyanegara**

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 04 Januari 1986, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2008 dan gelar Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2014.

Memulai karir sebagai Associate Lawyer di bidang Commercial Litigation pada tahun 2008 di Law Offices of Remy & Partners dan beberapa perusahaan multinasional lainnya serta terakhir di PT Bank Artha Graha International Tbk. Berpengalaman lebih dari 11 tahun memberikan jasa hukum litigasi (perdata, pidana), non litigasi (arbitrase), legal opinion, dan konsultasi untuk industri oil & gas, penerbangan, konstruksi, perbankan, dan asuransi.

Pada tahun 2009, beliau telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan menjadi anggota serta di angkat sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2013.

Beliau pernah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama - sama dengan Mantan Hakim Agung Republik Indonesia (M. Yahya Harahap, S.H.) untuk bergabung dalam Tim Ahli penanganan perkara Arbitrase Internasional antara Rafat Rizvi dan Hesham Al Warraq (pemegang saham Bank Century) melawan Pemerintah Republik Indonesia di Maxwell Chambers Singapura dan pada Pengadilan Tinggi Hongkong pada periode tahun 2014 s/d 2015 sebagai bagian dari penanganan perkara Bank Century pada saat itu dengan berkolaborasi dengan beberapa firma hukum nasional dan internasional (KarimSyah Lawfirm, Frans Winarta & Partners, Hendra Soenardi, dan Lipman Karas Hongkong) yang mana pada akhirnya Majelis Hakim Arbitrase Internasional memenangkan Pemerintah Republik Indonesia atas gugatan yang diajukan oleh pemegang saham Bank Century dalam perkara tersebut.

#### **Bob Setyanegara**

Member of the Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee.

An Indonesian citizen, born in Jakarta, on January 4th 1986 (34 years old), domiciles in Jakarta. Acquired a bachelor title from Universitas Pelita Harapan in 2008 and Master of Law postgraduate title from Pelita Harapan University in 2014.

Starting his career as Associate Lawyer in Commercial Litigation Field in 2008 at Law Offices of Remy & Partners and lately in PT Bank Artha Graha International Tbk. Having more than 11 years of experience giving services in litigation law (criminal, civil), non-litigation (arbitrary), legal opinion, and consultation for oil & gas industry, aviation, construction, banking, and insurance. In the year 2009, he had participated in Indonesian Advocates Association (PERADI) and became a member and also took an oath as an Advocate by The High Court of DKI Jakarta in 2013.

In 2009, he attended the Special Education for the Advocate Profession of the Indonesian Advocates Association (PERADI) and became a member and was sworn in as an advocate by the DKI Jakarta High Court in 2013.

He was appointed by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights together with the former Supreme Court Justice of the Republic of Indonesia (M. Yahya Harahap, SH) to join the Expert Team for handling International Arbitration cases between Rafat Rizvi and Hesham Al Warraq (shareholder). Century Bank) against the Government of the Republic of Indonesia at Maxwell Chambers Singapore and at the Hong Kong High Court in the period 2014 to 2015 as part of the handling of the Century Bank case at that time in collaboration with several national and international law firms (KarimSyah Lawfirm, Frans Winarta & Partners, Hendra Soenardi, and Lipman Karas Hongkong) which in the end the International Arbitration Panel of Judges won the Government of the Republic of Indonesia for the lawsuit filed by the shareholders of Century Bank in the case.



## Komite - Komite Penunjang Direksi Committees Supporting Board Of Directors

Pada tahun 2021 beliau mendapatkan Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/ Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk sejak tahun 2018 hingga saat ini dengan posisi Legal & Corporate Secretary Group Head.

### Independensi Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah

- Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan;
- Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

### Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pengembangan Produk Asuransi Dan Asuransi Syariah

Selama tahun 2021, Komite Pengembangan Produk Asuransi Dan Asuransi Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Reniwati Dharmakusumah	Ketua Head	1	100
Abdulloh	Wakil Ketua Deputy Head	1	100
Heru C. Priyotomo	Anggota Member	1	100
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100
Rahmat Hermawan	Anggota Member	1	100

In 2021 he received a Risk Management Competency Certificate with a Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Competency from the National Professional Certification Agency (BNSP).

He joined PT Asuransi Bintang Tbk since 2018 until now with the position of Legal & Corporate Secretary Group Head

### Independency of Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

- The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee must be free from any intervention from the Company's stakeholders;
- The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee must be free from any conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations in the insurance field and ethical values, as well as standards, principles, and healthy practices in the implementation of insurance and sharia insurance business. This also includes the Company's policies that may be established during the implementation of the duties and responsibilities of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

### Policy and Implementation of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee

During 2021, the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee held 1 (one) meeting with the following details:



**Komite - Komite Penunjang Direksi**  
Committees Supporting Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Murdianto Mustafa	Anggota Member	1	100
Herdi Ruspandi	Anggota Member	1	100
Fajar Setiawan	Anggota Member	1	100
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	1	100
Alma Fatrizal	Anggota Member	1	100
Bob Setyanegara	Anggota Member	1	100

**Pengungkapan dan Pelaporan Komite Pengembangan Produk Asuransi Dan Asuransi Syariah**

- a. Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah secara berkala tahun, atau atas permintaan Direksi melaporkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hasil kerja kepada Direksi;
- b. Laporan Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Disclosure And Reporting Of Insurance And Sharia Insurance Product Development Committee**

- a. The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee submits a report on the activities of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee at least once in a year, or at the request of the Board of Directors to report the work results to the Board of Directors;
- b. The report of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee is part of the report on the implementation of the duties of the Board of Directors and submitted at the General Meeting of Shareholders.



**Pelaksanaan Kegiatan Komite  
Pengembangan Produk Asuransi &  
Asuransi Syariah Selama Tahun 2021**

**Implementation of Insurance Product  
Development and Sharia Insurance  
Committee Activities in 2021**

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Result
1	PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi) – penyesuaian dokumen dan operasional terhadap DSEOJK PAYDI terbaru. PAYDI (Investment-Linked Insurance Product) - document and operational adjustments to the latest DSEOJK PAYDI.	Dokumen Perizinan Produk Product Licensing Document	Menunggu SEOJK PAYDI Final Waiting for the Final SEOJK PAYDI
		Wording Polis Policy Wording	Sudah tersedia Provided
		Formulir-formulir Pengajuan Application forms	Sudah tersedia Provided
		Marketing tools	Sudah tersedia Provided
		SOP & Guideline	Sudah tersedia Provided
		Training tools	Sudah tersedia Provided
		Sertifikasi/pelatihan produk Product certification/training	Sudah dilakukan (batch 1) Provided (batch 1)
		Sistem IT Training tools	Tahap UAT UAT stage
		Aplikasi Sales Illustration Sales Illustration Application	Sudah tersedia Provided
		Penerbitan Polis, dll Policy issuance, etc	Sudah tersedia Provided
		Pencatatan Pembukuan, dll Bookkeeping, etc	Sudah tersedia Provided
		Manajer Investasi Investment Manager	Sudah tersedia Provided
		Penunjukan Manajer Investasi Investment Manager Appointment	Sudah dilakukan (PT. BNP Paribas Investment Partners) Done (PT. BNP Paribas Investment Partners)
		Bank Kustodian Custodian Bank	Bank CIMB NIAGA
		Penunjukan Bank Kustodian Custodian Bank Appointment	Sudah dilakukan (PT. CIMB Niaga Tbk) Done (PT. CIMB Niaga Tbk)
Perijinan / Licensing Agen Pemasaran produk PAYDI Marketing licensing agent for PAYDI products	Sudah dilakukan Ujian beberapa Agen Pemasaran PAYDI. Trials have been done some PAYDI Marketing Agencies		
Pendaftaran produk Product Registration	Menunggu penerbitan SEOJK PAYDI Waiting for SEOJK issuance for PAYDI		



# Penilaian Terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

## Assessment Of The Performance Of Committees That Support

## The Implementation Of Duties Of Board Of Directors And Board Of Commissioner

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite-komite yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

In implementing their duties and responsibilities for the supervision of the management of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners are assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, Good Corporate Governance Committee, Investment Committee, Product Development Committee, and Risk Management Committee. Committees formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners:

Pada Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi & Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

The Board of Commissioners is assisted in executing its duties by 4 (four) Committees, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination & Remuneration Committee
4. Committee on Good Corporate Governance

Pada Direksi, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Komite yaitu:

1. Komite Investasi;
2. Komite Pengembangan Produk Asuransi & Asuransi Syariah;
3. Komite Manajemen Risiko.

The Board of Directors is assisted in carrying out their duties by 3 (three) Committees, namely:

1. Investment Committee;
2. Insurance Product Development & Sharia Insurance Committee;
3. Risk Management Committee.

### KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

### COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

#### Prosedur Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun setiap akhir tahun buku.

#### Performance Assessment Procedure

The procedure for evaluating the performance of the Committees under the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners periodically, which is carried out 1 (one) time in a year at the end of each financial year.

Pelaksanaan Program/Rencana kerja komite-komite dilakukan melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi-divisi/ satuan kerja terkait serta penelaahan/ evaluasi/ review secara mendalam oleh masing-masing komite di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris

Implementation of the Committees' Programs/ Work Plans carried out through the mechanism of committee meetings including by inviting the Directorate or divisions/units related work as well as report/ evaluation/ in depth review by each committee outside the forum meeting, the results of which are submitted in writing to Board of Commissioners



## Penilaian Terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Assessment Of The Performance Of Committees That Support The Implementation Of Duties Of Board Of Directors And Board Of Commissioner

### Kriteria yang Digunakan

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan rapat, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Berdasarkan realisasi penyelesaian seluruh program/rencana kerja serta pelaksanaan tugas dapat dilihat bahwa Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2021 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dengan memberikan masukan dan arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

## KOMITE DIBAWAH DIREKSI

### Prosedur Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi melalui rapat Direksi secara berkala. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite di bawah Direksi yaitu berdasarkan pelaksanaan tugas masing-masing Komite di bawah Direksi.

### Kriteria yang Digunakan

Direksi melakukan penilaian atas kinerja komite-komite dibawah Direksi yaitu Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk dan Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal berdasarkan beberapa kriteria antara lain jumlah rapat, kecukupan informasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

### Referred Criteria

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Committees of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, Good Corporate Governance Committee based on meetings, reports of duties and responsibilities submitted by each committee on a regular basis. Based on the realization of finalizing all programs/work plan and execution of job, it can be seen that the performance of the committees of the Board of Commissioners during 2021 was considered good by the Board of Commissioners and contributed to supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in particular by providing input and direction to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

## COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

### Performance Assessment Procedure

The procedure for evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors is carried out by the Board of Directors through regular Board of Directors meetings. The criteria used in the Board of Directors' assessment of the performance of the Committees under the Board of Directors are based on the performance of the duties of each Committee under the Board of Directors.

### Referred Criteria

The Board of Directors evaluates the performance of the committees under the Board of Directors, namely the Investment Committee, Product Development Committee and Risk Management Committee. Throughout 2021, the Board of Directors assessed that the committee had carried out its duties properly and optimally based on several criteria, including the number of meetings, the adequacy of information in decision making and the implementation of the committee's duties and responsibilities.





## Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

PT Asuransi Bintang Tbk dengan prinsip Syariah telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan diterbitkannya Surat No. S-973/BL/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Salinan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan prinsip syariah.

### TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis;
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;
3. Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

### HAK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

PT Asuransi Bintang Tbk has obtained license for conducting Sharia business from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution with the issuance of Letter No. S-973/BL/2007 dated March 2nd, 2007 concerning Copies of the Decree of the Minister of Finance concerning the Granting of License for Opening Sharia Branch Offices.

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board is part of the Insurance Company Organ that organizes business activities based on sharia principles that carries out the supervisory function of the implementation of insurance and reinsurance business to conform to sharia principles. The Sharia Supervisory Board is also part of the Organ of the Company that performs the supervisory function of insurance business operations and provides advice to the Board of Directors in implementing the management of the company in accordance with sharia principles.

### DUTIES & RESPONSIBILITIES OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Ensure effective, appropriate and quick decision making and able to act independently, have no interests that may interfere with their capability to carry out their tasks independently and critically;
2. Conduct supervisory duties and provide inputs and advice to the Board of Directors so that the company activities are in accordance with sharia principles;
3. Strive to maintain the balance of interests of all parties, especially the interests of policyholders, participants, and/or beneficiaries.

### RIGHTS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Members of the Sharia Supervisory Board are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding any part of the Company's business operating based on Sharia Principles in a complete and timely manner.



## **LARANGAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

1. Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama;
2. Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya;
3. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
4. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
5. Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi syariah dan Perusahaan asuransi atau Perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

## **KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Berdasarkan dengan Surat Rekomendasi dan Penetapan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI No. U-475/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang Tbk adalah sebagai berikut:

## **PROHIBITION FOR MEMBERS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD**

1. Prohibited from concurrently serving as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners of a Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company and an Insurance Company or Reinsurance Company that conducts part of their businesses based on the same Sharia Principles;
2. The Sharia Supervisory Board can only hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board in a maximum of 4 (four) other financial service institutions;
3. Conduct transactions having Conflicts of Interests with the activities of the Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company and Insurance Company or Reinsurance Company that conduct part of their business based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving;
4. Misuse his position for the personal, family's and/or other party's interests which may cause company's losses or reduce the profit of the Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company, and Insurance Company or Reinsurance company that conducts part of their businesses based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving;
5. Take and/or receive personal benefit from Sharia insurance company, Sharia reinsurance company and Insurance company or Reinsurance company that conducts part of their business based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS resolution.

## **COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD**

Based on the Letter of Recommendation and Determination of Sharia Supervisory Board from the National Sharia Council of MUI No. U-475/DSN-MUI/VIII/2017 dated August 16th, 2017, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang Tbk is as follows:



**Dewan Pengawas Syariah**  
Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan Dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan Sesuai Sk Date of Appointment According To Decision Letter
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Chair	KEP-255/NB.1/2015 Tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 dated February 13th 2015	21 Agustus 2017 August 21st, 2017
Amin Musa, SE	Anggota Member	KEP-256/NB.1/2015 Tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 dated February 13th 2015	21 Agustus 2017 August 21st, 2017

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian dengan nomor ketetapan sebagai berikut:

In accordance with OJK Regulation No. 4/POJK.05/2013 concerning Fit and Proper Test for Main Parties in Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang has passed the Capability and Propriety Assessment for the First Party in Insurance Company with the following assignment number:

No.	Nama Name	No.Ketetapan OJK OJK Assignment number
1	DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	KEP-255/NB.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 dated February 13th 2015
2	Amin Musa, SE	KEP-255/NB.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 dated February 13th 2015

**PROFIL PENGURUS DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 19 November 1952, berdomisili di Jakarta. Pada tahun 1982, Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah/Muamalah PTIQ Jakarta dan dari Fakultas Syariah/ Muamalah IAIN Jakarta, serta tahun 1992 meraih gelar Master of Art (MA) dan meraih gelar Doktor dari IAIN Jakarta tahun 1998.

Di bidang Pendidikan, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1982-1984 sebagai Kabag Pengajaran Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). Pada tahun 1994 - 1997 dan 2001 - 2006 Beliau menjabat sebagai Ketua LPPI IIQ Jakarta. Tahun 1982-1990 menjabat Sekpri Bidang Ilmiah Rektor IIQ Jakarta. Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta tahun 1985 - 1990. Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta tahun 1997 - 2001. Purek I/Bidang Akademik IIQ Jakarta pada tahun 1984 - 1994 dan 2006 - 2014. Direktur Pasca Sarjana IIQ Jakarta 2013 - 2017. Beliau juga

**PROFILE OF THE MANAGEMENT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD**

**DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA**  
Head of Sharia Supervisory Board

Indonesian citizen, born in Semarang, on September 19th, 1952, domiciles in Jakarta. In 1982 he obtained his Bachelor's degrees from Sharia/Muamalah Faculty of PTIQ, Jakarta, and from Sharia/Muamalah Faculty of IAIN, Jakarta, prior to earning his Master of Art (MA) degree from IAIN Jakarta in 1992 and his Doctoral degree from IAIN Jakarta in 1998.

In the Education field, he began his career in 1982 - 1984 as Head of Teaching Department of Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). In 1994 - 1997 and 2001 - 2006 he served as Head of LPPI of IIQ Jakarta. In 1982-1990, he served as Secretary of the Science Division of Chancellor of IIQ Jakarta, Dean of the Faculty of Syari'ah IIQ Jakarta in 1985 - 1990, Dean of the Faculty of Ushuluddin of IIQ Jakarta in 1997 - 2001, Vice Chancellor I/Academic Department, IIQ Jakarta in 1984 - 1994 and 2006 - 2014. He was also Director of Postgraduate of IIQ Jakarta in 2013 -



menjadi Pembina Yayasan NURUZZAHROH Jakarta tahun 1985 sampai dengan sekarang. Pembina Yayasan Binaumma Jakarta tahun 2007 sampai dengan sekarang. Salah satu pendiri Pondok Pesantren BINAUMMA Cianjur Jabar dan Pengasuh Pondok Pesantren NURUZZAHROH Kota Depok tahun 1990 sampai dengan sekarang.

Beliau juga adalah seorang Dosen pada Universitas Pembangunan Indonesia 1984-1989, Dosen PTIQ 1985-1993, Dosen S1 dan S2 pada IIQ Jakarta dari tahun 1983 sampai dengan saat ini. Serta sebagai Narasumber dan pengajar tetap kajian ilmiah di beberapa Masjid Jabodetabek dari tahun 1985 – saat ini sebagai pengajar tetap Pesantren Nuruzzahroh dari tahun 1990 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua DPS pada PT. Philips Asset Management sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Beliau merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1985 sampai dengan sekarang.

Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT. Bank Panin Dubai Syariah Jakarta. Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRD Wakalumi di tahun 1990 - 2015. Pada tahun 1992-2017 sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT. Trust Finance Indonesia Tbk. Sekarang sudah tidak aktif di kedua Lembaga keuangan tersebut.

Beliau diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk Nomor 011/S. Kep/PDIR-HW/VIII/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Bintang Tbk tanggal 21 Agustus 2017.

Pelatihan/seminar yang diikuti pada tahun 2021 :

1. Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021. Bidang Pasar Modal Syariah tanggal 4 dan 6 Oktober 2021.
2. Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021. Bidang Perbankan Syariah tanggal 4 - 5 Oktober 2021.
3. Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 tanggal 2-3 Desember 2021.

2017. He also served as Trustee of NURUZZAHROH Foundation, Jakarta, up until now, and Binaumma Foundation, Jakarta, up to present. He was also one of the founders of the BINAUMMA Islamic Boarding School in Cianjur, West Java, and Board Member of the NURUZZAHROH Islamic Boarding School in Depok City from 1990 to present.

He was also a Lecturer at Universitas Pembangunan Indonesia from 1984 to 1989, PTIQ Lecturer from 1985-1993, Lecturers of Undergraduate and Post-graduate studies at IIQ Jakarta from 1983 to present. He has served as keynote speaker and permanent teacher in scientific study groups in several mosques in the capital city and Greater Jakarta from 1985 - now and permanent lecturers of the Nuruzzahroh Islamic Boarding School from 1990 to present and as the DPS Chief in PT. Philips Asset Management from 2020 until present.

He was a Member of Fatwa Commission of Central MUI from 1985 to present.

From 2010 until now, he has served as Head of the Sharia Supervisory Board at PT. Bank Panin Dubai Syariah Jakarta, Head of the Sharia Supervisory Board at PT. BPRD Wakalumi in 1990 – 2015, and Head of the Sharia Supervisory Board at PT. Trust Finance Indonesia Tbk in 1992-2017. However, he was no longer active in those two financial institutions.

He was appointed as Head of the Sharia Supervisory Board in accordance with the Decree of the President Director of PT Asuransi Bintang Tbk Number 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017 concerning the Determination of the Sharia Supervisory Board of PT. Asuransi Bintang Tbk dated August 21, 2017.

Trainings/seminars attended in 2021:

1. Webinars for the 2021 Pre-Ijtima' Sanawi Workshop (Annual Meeting) for the Sharia Supervisory Board. The Sharia Capital Market Sector on October 4 and 6, 2021.
2. Pre-Ijtima' Sanawi Workshop Webinar (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2021. Sharia Banking Sector October 4 - 5, 2021.
3. Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2021 on December 2-3, 2021.



## Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

### Amin Musa, SE

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Pemalang, 19 April 1963, berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah. Beliau meraih Gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.

Beliau mengawali karirnya pada tahun 1997 sebagai Accounting Manager di Asuransi Takaful Umum, kemudian dilanjutkan sebagai Konsultan dalam hal profit sharing banking System di BPD Bank Jabar dan Bank Bukopin di tahun 2000. Pada tahun 2002, sebagai Konsultan di bidang Islamic Insurance di BRIngin Life dan tahun 2004 di Asuransi Bumiputera. Pada tahun 2005, Beliau menjadi Pengajar mulai dari tingkat Basic, Ajun dan Ahli Asuransi Syariah di LPKG, sebagai konsultan mengenai Integrated Accounting Application di Asuransi Takaful Keluarga, sebagai Konsultan dalam hal Islamic Insurance di Allianz Life Insurance dan sejak per Januari 2020 beliau sudah tidak menjabat sebagai DPS di PT. Asuransi ASEI.

Sejak Januari 2019 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Life (unit Syariah) dan saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Amanah Gita, dan PT Jasa Gadai .

Beliau diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk Nomor 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Bintang Tbk tanggal 21 Agustus 2017.

Pelatihan/seminar yang diikuti pada tahun 2021 :

1. Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tanggal 21 April 2021 oleh Bank Indonesia.
2. Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021. Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah tanggal 4 dan 9 Oktober 2021.
3. Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 tanggal 2-3 Desember 2021.

### Amin Musa, SE

Member of the Sharia Supervisory Board

Indonesian citizen, born in Pemalang, on April 19th, 1963 (55 years old), domiciles in Pemalang, Central Java. He earned his Bachelor's degree in Economics from Indonesian College of Economics (STEI) Jakarta.

He began his career in 1997 as an Accounting Manager at Asuransi Takaful Umum, then continued as a Consultant in profit sharing banking System at BPD Bank Jabar and Bank Bukopin in 2000. In 2002, he served as a Consultant in the field of Islamic Insurance at BRIngin Life and Asuransi Bumiputera in 2004. In 2005, he served as a Teacher starting from the Basic, Associate and Expert of Sharia Insurance at LPKG, as a consultant on Integrated Accounting Application in Asuransi Takaful Keluarga, as a Consultant in Islamic Insurance field at Allianz Life Insurance and since January 2020 he has not served as a DPS at PT. ASEI Insurance.

From January 2019 until Present he has served at the Sharia Supervisory Board at the Allianz Life Financial Institution Pension Fund (Sharia Unit) and currently he also serves as the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Amanah Gita, and PT Jasa Gadai.

He was appointed as a member of the Sharia Supervisory Board in accordance with the Decree of the President Director of PT Asuransi Bintang Tbk Number 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017 concerning the Determination of the Sharia Supervisory Board of PT. Asuransi Bintang Tbk dated August 21st, 2017.

Trainings/seminars attended in 2021:

1. National Seminar on Islamic Economy and Finance on April 21, 2021 by Bank Indonesia.
2. Pre-Ijtima' Sanawi Workshop Webinar (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2021. Financing, Guarantee, Venture Capital, Pawnshops and Sharia Fintech on October 4 and 9, 2021.
3. Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2021 on December 2-3, 2021.



## TATA CARA PEMBERIAN NASEHAT

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan;
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan; dan
- d. Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya.

## RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan di tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda
1	13 Februari 2021 February 13, 2021	Diskusi melalui WA Discussion via WA	Penyusunan laporan pengawasan DPS tahun 2020 Preparation of 2020 DPS supervisory report
2.	1 April 2021 April 1, 2021	info melalui WA Info through WA	Penyampaian draft laporan keuangan Triwulan 1 2021 Submission of draft of financial statement for Q1 2021
3.	1 Juli 2021 July 1, 2021	Info melalui WA Info through WA	Penyampaian draft laporan keuangan Triwulan 2 2021 Submission of draft of financial statement for Q2 2021
4.	30 September 2021 September 30, 2021	Info melalui WA Info through WA	Penyampaian info progress pengalihan portfolio unit syariah Submission of information on progress of diversion of sharia unit portfolio
5.	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Info melalui WA Info through WA	Penyampaian draft laporan keuangan Triwulan 3 2021 Submission of draft of financial statement for Q3 2021
6.	22 November 2021 November 22, 2021	Info melalui WA Info through WA	Penyampaian info progress pengalihan portfolio unit syariah Submission of information on progress of diversion of sharia unit portfolio

## PROCEDURE OF GIVING ADVICE

The implementation of supervisory task and the giving of advice and suggestion by the Sharia Supervisory Board is carried out on the following matters:

- a. Company activities in the management of wealth and liabilities, both tabbaru' funds, tanahud funds, company funds and participant investment funds;
- b. Sharia insurance products marketed by the company;
- c. Marketing practice of sharia insurance products conducted by the company; and
- d. Operational activities of other sharia insurance and reinsurance businesses.

## SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

In accordance with POJK No. 2/POJK.05/2014 as amended by No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board is required to hold periodical meetings at least 6 (six) times in 1 (one) year and in 2021, the Sharia Supervisory Board has convened as many as 6 (six) times meetings with attendance details as follows:



**Dewan Pengawas Syariah**  
Sharia Supervisory Board

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN  
PENGAWAS SYARIAH**

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan Pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/ usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah PT Asuransi Bintang Tbk selama tahun 2021, sebagaimana diamanatkan pada pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, serta kegiatan operasional lainnya. Sehubungan dengan telah diterimanya surat permohonan pengembalian izin unit usaha syariah PT Asuransi Bintang, Tbk oleh OJK maka DPS juga ikut berperan serta dalam hal memberikan saran serta masukan untuk proses pengalihan portfolio.

Dari hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf di atas, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

**REPORT ON DUTY OF IMPLEMENTATION  
OF SHARIA SUPERVISORY BOARD**

The Sharia Supervisory Board has supervised the implementation of the basic principles of implementing insurance/reinsurance business based on sharia principles carried out by Sharia Business Unit of PT Asuransi Bintang Tbk during 2021, as mandated in Article 16 of the Regulation of the Minister of Finance Number 18/PMK.010/2010 concerning the Implementation of Basic Principles for the Implementation of Insurance Business and Reinsurance Business based on Sharia Principles.

In carrying out such supervision, the Sharia Supervisory Board conducts an assessment of the Company's operations which includes aspects of management of wealth and liabilities, aspects of marketed products, aspects of the marketing practices carried out by the Company and other operational activities.

The supervision reveals there were no operational practices that violated sharia principles.

Thus, based on the evaluation of the aspects in the paragraph above, the implementation of these aspects by the Company is in accordance with the sharia principles.



## Sekretaris Perusahaan

### Corporate Secretary

PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan keterbukaan informasi terkait dengan perubahan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 2 November 2020 sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

Adapun sekretaris Perusahaan saat ini adalah Bapak Bob Setyanegara berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian, penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk Nomor 026/SK/PDIR-HW/XI/2020 tanggal 02 November 2020.

#### **BERIKUT ADALAH PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN**

##### **Bob Setyanegara, S.H, M.H.**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 04 Januari 1986, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2008 dan gelar Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2014.

Memulai karir sebagai Associate Lawyer di bidang Commercial Litigation pada tahun 2008 di Law Offices of Remy & Partners dan beberapa perusahaan multinasional lainnya serta terakhir di PT Bank Artha Graha International Tbk. Berpengalaman lebih dari 11 tahun memberikan jasa hukum litigasi (perdata, pidana), non litigasi (arbitrase), legal opinion, dan konsultasi untuk industri oil & gas, penerbangan, konstruksi, perbankan, dan asuransi.

Pada tahun 2009, beliau telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan menjadi anggota serta di angkat sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2013.

Beliau pernah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama - sama dengan Mantan Hakim Agung Republik Indonesia (M. Yahya Harahap, S.H.) untuk bergabung dalam Tim Ahli penanganan perkara Arbitrase

PT Asuransi Bintang Tbk has applied information transparency related to the changes of Corporate Secretary on November 2, 2020 according to the Financial Services Authority Regulation No.35/POJK.04/2014 on Issuers Corporate Secretary or Public Companies and Indonesia Stock Exchange Regulation No.I-A on Share Listing and Equity Stock Excluding Stock Published by Listed Companies and Indonesia Stock Exchange No. I-E on Obligation to Deliver Information

The current Corporate Secretary is Mr. Bob Setyanegara, appointed based on the Dismissal Decree, appointment and appointment of the Corporate Secretary of PT Asuransi Bintang Tbk Number 026/SK/PDIR-HW/XI/2020 dated November 2, 2020.

#### **HERE IS THE PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY**

##### **Bob Setyanegara, S.H, M.H**

Indonesia citizen, born in Jakarta, January 4th, 1986. Domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's Degree from Universitas Pelita Harapan in 2008 and a Master's Degree in Law from Universitas Pelita Harapan in 2014.

Started his career as an Associate Lawyer in Commercial Litigation in 2008, at Law Offices of Remy & Partners, then he worked in PT Bank Artha Graha International Tbk. More than 11 years of experience giving litigation law services (criminal and civil), non-litigate (arbitration), legal opinion and consulting in oil & gas industry, aviation, construction, banking and insurance.

In 2009 he received a Special Education for Advocates by PERADI and became a member while also taken oath as an advocate by the High Court of DKI Jakarta in 2013.

He was appointed by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights together with the former Supreme Court Justice of the Republic of Indonesia (M. Yahya Harahap, SH) to join the Expert Team for handling International Arbitration cases between





## Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Internasional antara Rafat Rizvi dan Hesham Al Warraq (pemegang saham Bank Century) melawan Pemerintah Republik Indonesia di Maxwell Chambers Singapura dan pada Pengadilan Tinggi Hongkong pada periode tahun 2014 s/d 2015 sebagai bagian dari penanganan perkara Bank Century pada saat itu dengan berkolaborasi dengan beberapa firma hukum nasional dan internasional (KarimSyah Lawfirm, Frans Winarta & Partners, Hendra Soenardi, dan Lipman Karas Hongkong) yang mana pada akhirnya Majelis Hakim Arbitrase Internasional memenangkan Pemerintah Republik Indonesia atas gugatan yang diajukan oleh pemegang saham Bank Century dalam perkara tersebut.

Pada tahun 2021 beliau mendapatkan Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/ Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk sejak tahun 2018 hingga saat ini dengan posisi Legal & Corporate Secretary Group Head.

### TUGAS & TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Rafat Rizvi and Hesham Al Warraq (shareholder). Century Bank) against the Government of the Republic of Indonesia at Maxwell Chambers Singapore and at the Hong Kong High Court in the period 2014 to 2015 as part of the handling of the Century Bank case at that time in collaboration with several national and international law firms (KarimSyah Lawfirm, Frans Winarta & Partners, Hendra Soenardi, and Lipman Karas Hongkong) which in the end the International Arbitration Panel of Judges won the Government of the Republic of Indonesia for the lawsuit filed by the shareholders of Century Bank in the case.

In 2021 he received a Risk Management Competency Certificate with a Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Competency from the National Professional Certification Agency (BNSP).

He has joined PT Asuransi Bintang Tbk since 2018 until now as the Legal & Corporate Secretary Group Head.

### DUTIES & RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

1. Keep up with the development of the Capital Market, especially laws and regulations in force in the Capital Market Sector.
2. Provide inputs for the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies to comply with the provisions of laws and regulation in the Capital Market Sector.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance that includes:
  - a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Website of the Issuers or Public Companies;
  - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
  - c. Implementation and documentation of General Meeting of Shareholders;
  - d. Implementation and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
  - e. Implementation of company orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.



4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. As a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

#### **SEMINAR/ YANG DIKUTI OLEH SEKRETARIS PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2021**

#### **SEMINARS / TRAINING ATTENDED BY THE CORPORATE SECRETARY DURING 2021**

No	Tanggal Date	Seminar /Pelatihan Trainings
1	Senin, 4 Januari 2021 Monday, January 4, 2021	Pembukaan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 Opening of 2021 IDX Trading
2	Kamis, 11 Februari 2021 Thursday, February 11, 2021	Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Bisnis dan Penerapan Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yg baru sesuai POJK 44/2020 Impact of COVID-19 pandemic on Businesses and Implementation of the New Risk Management in Non-Bank Financial Services, pursuant to OJK Regulation 44/2020
3	Jumat, 22 Januari 2021 Friday, January 22, 2021	Sosialisasi e-Proxy and e-Voting Platform eASY.KSEI Socialization of e-Proxy and e-Voting Platform eASY.KSEI
4	Jumat, 22 Januari 2021 Friday, January 22, 2021	Proteksi kepada investor melalui penyampaian informasi notasi khusus dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Nomor: SE-00002/BEI/01-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat; dan</li> <li>Surat Edaran Nomor: SE-00003/BEI/01-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Tampilan Informasi Perusahaan Tercatat pada Kolom Remarks dalam JATS.</li> </ul> Protection for the investors through submission of information on special notation and in relation to the issuance of the Circular Letter of IDX, described as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>Circular Letter No. SE-00002/BEI/01-2021, January 18, 2021 on Additional Display of Special Notation Information on the Registered Company's Code; and</li> <li>Circular Letter No. SE-00003/BEI/01-2021, January 18, 2021 on the Display of Information of Registered Companies in the Remarks Column of JATS.</li> </ul>
5	Kamis, 4 Februari 2021 Thursday, February 4, 2021	Workshop "Berbagi Pengalaman Penerapan Work Home Life Balance dan Pencegahan Kekerasan di Dunia Kerja" pada Industri Asuransi Umum di Indonesia Workshop "Sharing Session on the Application of Work Home Life Balance and Prevention of Abuse in Work Environment within General Insurance Industry in Indonesia".
6	Selasa, 9 Februari 2021 Tuesday, February 9, 2021	Sosialisasi POJK 28/2020 da SEOJK 1/2021 Socialization of POJK 28/2020 and SEOJK 1/2021
7	Rabu, 24 Februari 2021 Wednesday, February 24, 2021	AWARENESS INDUSTRY 4.0 Kepunahan Industri Asuransi merupakan dampak yang akan terjadi jika tidak berubah menuju Insurance 4.0 AWARENESS INDUSTRY 4.0 Extinction of Insurance Industry is the one potential impact of unwillingness to transition into Insurance 4.0
8	Kamis, 25 Februari 2021 Thursday, February 25, 2021	Peluang dan Tantangan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mendukung Pembangunan secara Berkelanjutan Opportunities and Challenges for the Institute for Investment Management (LPI) or Sovereign Wealth Fund (SWF) in Supporting Sustainable Development
9	Kamis, 25 Februari 2021 Thursday, February 25, 2021	Innovative Refinancing Mechanism Through Asset Backed Securities
10	Kamis, 4 Maret 2021 Thursday, March 4, 2021	Sosialisasi LAPSK SJK Socialization of LAPSK SJK



**Sekretaris Perusahaan**

Corporate Secretary

No	Tanggal Date	Seminar /Pelatihan Trainings
11	Jumat, 12 Maret 2021 Friday, March 12, 2021	Topic 1 : "Omnibus Law Job Creation, what are the challenges and opportunities for the Insurance Industry?" Topic 2 : "Building Trust Through The Integration of Governance, Risk and Compliance"
12	Senin, 8 Maret 2021 Monday, March 8, 2021	Pembahasan Program Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2021 Discussion on 2021 Financial Literacy and Education Program
13	Selasa, 30 Maret 2021 Tuesday, March 30, 2021	Transforming Your Data Ecosystem to Deliver Business-Ready Data
14	Selasa, 30 Maret 2021 Tuesday, March 30, 2021	Virtual Gathering AAUI
15	Selasa, 13 April 2021 Tuesday, April 13, 2021	Sosialisasi POJK MRTI LJKNB Socialization of POSK MRTI LJKNB
16	Jum'at, 9 April 2021 Friday, April 9, 2021	Sistem Manajemen Anti Suap Dalam Kaitannya Dengan Manajemen Risiko Menuju Kesiapan Sertifikasi ISO 37001 Anti-Bribery Management System in Relation to Risk Management to Anticipate the Readiness of ISO 37001 Certification
17	Senin, 12 April 2021 Monday, April 12, 2021	Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Nomor I-G Socialization of Implementation of Regulation No. I-G
18	Kamis, 15 April 2021 Thursday, April 15, 2021	sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Socialization of Financial Service Sector Consumer Protection
19	Rabu-Kamis (28-29 April 2021) Wednesday-Thursday (April 28—29, 2021)	Webinar Portfolio Analysis in General Insurance
20	Jumat, 30 April 2021 Friday, April 30, 2021	AAUI International Insurance Seminar
21	Jumat, 23 April 2021 Friday, April 23, 2021	Securities Crowdfunding untuk Pemulihan UMKM Pasca COVID-19 Securities Crowdfunding for Post-COVID-19 MSME Recovery
22	Kamis, 20 Mei 2020 Thursday, May 20, 2021	Halal bihalal Industri Perasuransian Indonesia 1 Syawal 1442 H Gathering of Indonesia Insurance Industry 1 Syawal 1442 H
23	Selasa, 25 Mei 2021 Tuesday, May 25, 2021	How Will P2sk Bill Support The On-Going Development of Insurance and Pension Industries In Indonesia
24	Rabu, 9 Juni 2021 Wednesday, June 9, 2021	Pedoman Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan Standard Agreement Guidelines for Financial Service Sector
25	Selasa-Rabu (22-23 Juni 2021) Tuesday-Wednesday (June 22—23, 2021)	Webinar Portfolio Analysis in General Insurance Batch 2
26	Jumat, 25 Juni 2021 Friday, June 25, 2021	Webinar Reinsurance Market Update
27	Selasa, 29 Juni 2021 Tuesday, June 29, 2021	Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation
28	Selasa, 22 Juni 2021 Tuesday, June 22, 2021	Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Hearing on the Concept of Amendment to Regulation No. I-E on Information Disclosure Requirement



No	Tanggal Date	Seminar /Pelatihan Trainings
29	Selasa, 27 Juli 2021 Tuesday, July 27, 2021	ESG Capital Market Summit 2021
30	Kamis, 29 Juli 2021 Thursday, July 29, 2021	Sosialisasi POJK 9/POJK.05/2021 Socialization of POJK 9/POJK.05/2021
31	Selasa, 10 Agustus 2021 Tuesday, August 10, 2021	Pembukaan Perdagangan HUT ke-44 Pasar Modal Trade Opening, 44th Anniversary of Capital Market
32	Kamis, 30 September 2021 Thursday, September 30, 2021	ESG and Sustainability Leadership and Journey
33	Jumat, 24 September 2021 Friday, September 24, 2021	Exposure Draft Disclosure Requirements in IFRS Standards
34	Kamis, 30 September 2021 Thursday, September 30, 2021	ESG and Sustainability Leadership and Journey
35	Selasa, 5 Oktober 2021 Tuesday, October 5, 2021	Sosialisasi Penerbitan Efek Bersifat Utang dengan Credit Enhancement Socialization of Issuance of Debt Securities with Credit Enhancement
36	Selasa & Kamis (5 & 7 Oktober 2021) Tuesday & Thursday (October 5 & 7, 2021)	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/Qualified Chief Risk Officer ( QCRO) Competency Certification of Risk Management with a Competency in Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
36	Kamis, 14 Oktober 2021 Thursday, October 14, 2021	Sinergi Kebijakan dan Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Synergy of Policies and Strategies on Acceleration of National Economic Recovery
37	Selasa, 09 November 2021 Tuesday, November 9, 2021	Climate Change
38	Selasa, 16 November 2021 Tuesday, November 16, 2021	Gender Equality and Inclusion in the Workplace
39	Selasa, 23 November 2021 Tuesday, November 23, 2021	Managing Waste and Circular Economy
40	Selasa, 30 November 2021 Tuesday, November 30, 2021	Health & Safety
41	Selasa, 16 November 2021 Tuesday, November 16, 2021	CEO Networking 2021
42	Selasa, 16 November 2021 Tuesday, November 16, 2021	CEO Networking 2021
43	Rabu, 1 Desember 2021 Wednesday, December 1, 2021	TCFD in Finance
44	Rabu, 22 Desember 2021 Wednesday, December 22, 2021	Webinar Capital Market Women Empowerment Forum
45	Kamis, 30 Desember 2021 Thursday, December 30, 2021	Acara Penutupan Perdagangan BEI Tahun Trade Closing Ceremony at IDX



**Sekretaris Perusahaan**  
Corporate Secretary

**URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS  
SEKRETARIS PERUSAHAAN**

1. Bertanggung jawab untuk CSR (Corporate Social Responsibility).
2. Menyiapkan dan mendukung dokumentasi perusahaan dan bertanggung jawab dokumen mematuhi peraturan regulator, dokumen-dokumen seperti, lisensi Perusahaan, lisensi Pemerintah, akta Notaris, dan dokumen Pemegang Saham & Komisaris.
3. Mengisi dan menyebarkan semua dokumen yang diterima oleh Sekretariat Perusahaan.
4. Menyiapkan dan mendukung dokumen yang ditandatangani oleh Direksi dengan administrasi yang tepat dan untuk memberikan penomoran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Perusahaan, dokumen seperti, surat Perusahaan, Surat Kuasa, Surat Directive, dan Perjanjian.
5. Penanganan, menjaga dan menindaklanjuti semua Dokumen Perusahaan.
6. Diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah.
7. Berikan pelayanan kepada publik terkait dengan informasi perusahaan.
8. Undang-Undang sebagai jembatan antara perusahaan, OJK (Bappepam LK), dan Investor.
9. Bertanggung jawab untuk setiap masalah hukum perusahaan.

**BRIEF DESCRIPTION OF DUTY  
IMPLEMENTATION OF CORPORATE  
SECRETARY**

1. Responsible for CSR (Corporate Social Responsibility).
2. Prepare and support company documentation and be responsible for documents required to comply with the regulator's regulations, such as Company licenses, Government licenses, Notary deeds, and Shareholders & Commissioners' documents.
3. Fill-in and distribute all documents received by the Corporate Secretariat.
4. Prepare and support documents signed by the Board of Directors with appropriate administration and provide numbering issued by the Corporate Secretariat. The documents include Company letters, Authority Letters, Directive Letter, and Agreement.
5. Handle, maintain and follow up all Company Documents.
6. Updated with Government Regulation.
7. Provide services to the public related to company information.
8. Law as a bridge between the company, OJK (Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency) and Investor.
9. Responsible for every issue.

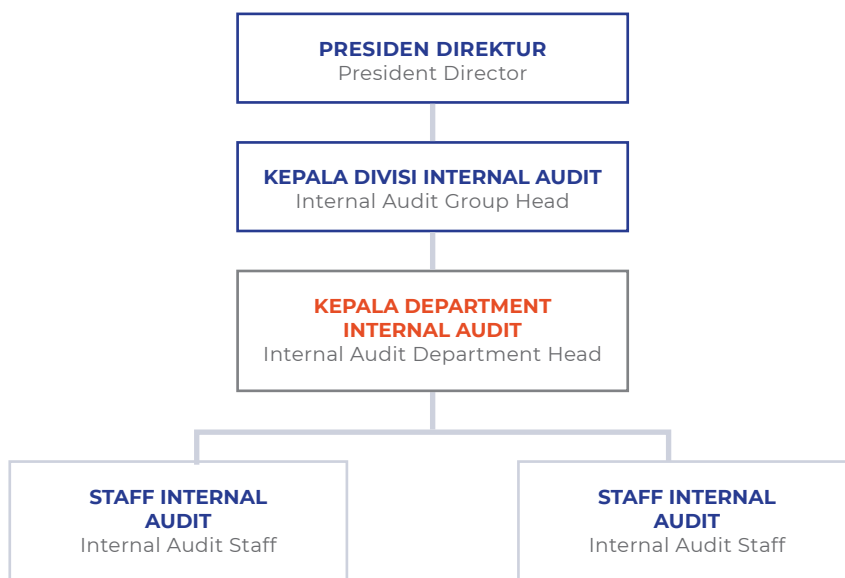


# Pengendalian Internal

## Internal Control

Sumber Daya Divisi Audit Internal pada tahun 2021 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi Audit Internal, 1 (satu) orang Kepala Departemen Audit Internal dan 1 (satu) Staf Internal Auditor.

In 2021, the Audit Division Resource comprises 3 with 1 (one) Head Internal Audit Division Head, 1 (one) Internal Audit Department Head and 1 (one) Internal Auditor Staff.



Ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (internal control) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

The scope of the Internal Auditor's work covers all aspects and elements of an equal company activity, both directly and indirectly predicted to affect how good the implementation of the interests of both shareholders and management. In this regard, the scope of the Internal Auditor's work includes examining and evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of its implementation, including all aspects and elements of the company's organization so as to support optimal analysis in assisting the decision making process of the management.

### STRUKTUR AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

### INTERNAL AUDIT STRUCTURE

1. The Internal Audit Unit is led by the Internal Audit Unit Head.
2. The Internal Audit Unit Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval from the Board of Commissioners.
3. The President Director can dismiss the Internal Audit Unit Head, after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Internal Audit Unit Head does not meet the requirements as an Internal Audit Unit auditor as regulated in this regulation and or fails or is incapable of carrying out his duties.



## Pengendalian Internal

Internal Control

4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
  5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
  6. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. The Internal Audit Unit Head is responsible to the President Director.
  5. Auditors in the Internal Audit Unit are directly responsible to the Internal Audit Unit Head.
  6. Every appointment, replacement, or dismissal of the Internal Audit Unit Head is immediately notified to the Financial Services Authority.

## SYARAT & KOMPETENSI SUMBER DAYA UNIT AUDIT INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## PROFIL AUDIT INTERNAL

### Rahmat Hermawan MM QRGP CERG CFE

Kepala Divisi Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 8 September 1965, berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Magister of Management dari Prasetya Mulya Business School pada tahun 2003. Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk dan diangkat sebagai Group Head Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 066/S.KEP/HRD/PDIR-ZDI/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Pada tahun 1999-2000 Beliau pernah menjabat

## REQUIREMENTS AND COMPETENCY OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

1. Have professional, independent, honest and objective integrity and behavior in carrying out their duties;
2. Have knowledge and experience regarding technical audit and other disciplines relevant to their field of duty;
3. Have knowledge of laws and regulations in the field of capital markets and other relevant laws and regulations;
4. Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
5. Must comply with professional standards issued by the Internal Audit Association;
6. Must comply with the Internal Audit code of ethics;
7. Must maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of Internal Audit unless required by legislation or court decisions;
8. Understand the principles of good corporate governance and risk management; and
9. Willing to increase knowledge, expertise and professionalism skills continuously.

## INTERNAL AUDIT PROFILE

### Rahmat Hermawan MM QRGP CERG CFE

Internal Audit Division Head

Indonesian citizen, born in Bandung on September 8th, 1965 (53 years old), domiciled in Jakarta. Earned his Master of Management from Prasetya Mulya Business School in 2003. He joined PT Asuransi Bintang Tbk and was appointed as Group Head of Internal Audit based on Decree No. 066/S.KEP/HRD/PDIR-ZDI/VI/2008 dated June 5th, 2008. In 1999-2000, he served as Assistant Director of Finance, System and Procedures to assist in the



sebagai Asisten Direktur Keuangan, Sistem dan Prosedur untuk membantu penyusunan dan implementasi Kode Akun Asuransi (KODASI) di PT Asuransi Bintang Tbk. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, dari tahun 1995-1999, Beliau pernah bekerja di Bank Uppindo sebagai Internal Audit untuk bidang Corporate Audit dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tim asistensi Bank Uppindo (BBKU). Lulusan terbaik Pendidikan Audit Internal Bank Angkatan 56 di Institut Bankir Indonesia (LPPI) dan memiliki sertifikasi sebagai Certified Fraud Examiners (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE); Qualified Risk Governance Profesional (QRGP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No.702092421 0000489 2017; Certified Enterprise Risk Governance (CERG - Certificate ID 3120201) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore dan Wakil Penjamin Emisi Efek (Underwriter Representative) dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal.

#### **Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2021 :**

1. Seminar Series Online, dengan tema: Membangun Human Capital Development Berbasis KPI dan Manajemen Risiko di Perusahaan Perasuransian, Diselenggarakan oleh LPMK Widya Dharma Artha, Jakarta, 26 Maret 2021
2. Webinar, Amplifying Business Resilience with Digital Technology: Exploit the Opportunity & Manage the Risk, penyelenggara Enterprise Risk Management Academy dan IRMAPA, 31 Maret 2021
3. Seminar Series Online, dengan tema: SISTEM Pengendalian Internal Berbasis Ti (Teknologi Informasi), Mendukung Implementasi, Peraturan OJK NO44/POJK.05/2020, Tentang : Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Diselenggarakan oleh LPMK Widya Dharma Artha., 3 Juli 2021
4. Webinar, Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You, penyelenggara Enterprise Risk Management Academy, 15 Juli 2021
5. Webinar Program "Enterprise Risk Management: A Pathway toward the Organization's Resilience and Sustainability Post Covid-19", penyelenggara CRMS Indonesia, 16 Juli 2021
6. Belajar Anti Fraud Online "Bad Governance & Corruption" penyelenggara Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 19 Agustus 2021

preparation and implementation of Insurance Account Codes (KODASI) at PT Asuransi Bintang Tbk Before working at PT Asuransi Bintang, Tbk from 1995 to 1999, he had worked at Bank Uppindo as an Internal Audit for Corporate Audit and the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) as Bank Uppindo's (BBKU) assistance team. He was one of the best graduates of Bank Internal Audit Education Batch 56 at the Indonesian Bankers Association (LPPI) and obtained certification as a Certified Fraud Examiners (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE); Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from the National Professional Certification Agency (BNSP) No.702092421 0000489 2017; Certified Enterprise Risk Governance (CERG - Certificate ID 3120201) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Singapore and Underwriter Representative of the Capital Market Professional Standards Committee.

#### **Education/seminars attended during 2021:**

1. Online Seminar Series, with the theme: Building KPI-Based Human Capital Development and Risk Management in Insurance Companies, Organized by LPMK Widya Dharma Artha, Jakarta, March 26, 2021
2. Webinar, Amplifying Business Resilience with Digital Technology: Exploit the Opportunity & Manage the Risk, organizer of the Enterprise Risk Management Academy and IRMAPA, March 31, 2021
3. Online Seminar Series, with the theme: IT-Based Internal Control System (Information Technology), Supporting the Implementation, OJK Regulation NO44/POJK.05/2020, Regarding: Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, Organized by LPMK Widya Dharma Artha., July 3, 2021
4. Webinar, Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You, Organizing Enterprise Risk Management Academy, July 15, 2021
5. Webinar Program "Enterprise Risk Management: A Pathway toward the Organization's Resilience and Sustainability Post Covid-19", organizer of CRMS Indonesia, July 16, 2021
6. Learn Anti-Fraud Online "Bad Governance & Corruption" organizer of the Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, August 19, 2021





## Pengendalian Internal

Internal Control

7. Belajar Anti Fraud Online , “Fraud Risk Assessment” penyelenggara Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 19 Agustus 2021
8. GRC SUmit 2021, Agility Amid Achaotic Word, penyelenggara Enterprise Risk Management Academy dan IRMAPA, 26 Agustus 2021
9. Bincang Anti Fraud Online ,“Fraudulent Document Detection” penyelenggara Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 3 September 2021
10. Riskhub International Webinar, Accelerating Esg: Benefits To Creating The Competitive Advantage, penyelenggara Enterprise Risk Management Academy dan IRMAPA, 27 September 2021
11. Webinar, Sosialisasi Anti Fraud Di Bidang Perasuransian, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan, 1 November 2021
12. National Anti Fraud Conference 2021, penyelenggara Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 26 s/d 27 November 2021

### Rievo Darma SE, QIA, AAIK, AIIS, QRMO

Kepala Bagian Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 14 September 1981, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA), sertifikasi sebagai Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (A2IK) dan Associate of Islamic Insurance Society (AIIS). Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk, sebagai Asisten Manager Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 104/SKEP/HRD/DIR-FRF/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, di tahun 2005-2006 Beliau pernah bekerja di PT Lippo General Insurance Tbk sebagai Staf Internal Auditor dan PT Graha Anugrah Elektrindo sebagai Supervisor Internal Audit sejak tahun 2006-2009.

### Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2021 :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi (Qualified Chief Risk Officer - QCRO) , penyelenggara CRMS, tanggal 27 & 29 Juli 2021
2. Sertifikasi Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi (Qualified Chief Risk Officer - QCRO) tanggal 18 Agustus 2021 penyelenggara CRMS
3. Webminar Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing tanggal 25 Agustus 2021

### Rievo Darma SE, QIA, AAIK, AIIS, QRMO

Internal Audit Division Head

Indonesian citizen, born in Jakarta on September 14th, 1981, domiciled in Jakarta. Earned his Bachelor's degree in Economics from Faculty of Accounting, Gunadarma University. Certified as a Qualified Internal Auditor (QIA), certified as Indonesia Loss Insurance Expert (A2IK) and Associate of Islamic Insurance Society (AIIS). Joined PT Asuransi Bintang Tbk as Assistant Manager of Internal Audit based on Decree No. 104/SKEP/HRD/DIR-FRF/VI/2009 dated June 5th, 2009. Prior to working at PT Asuransi Bintang Tbk, in 2005-2006 he worked at PT Lippo General Insurance Tbk as Internal Auditor Staff and in PT Graha Anugrah Elektrindo as Internal Audit Supervisor since 2006-2009.

### Education/seminars attended during 2021:

1. Education and Training of Qualified Chief Risk Officer (QCRO) , CRMS organizer, July 27 & 29, 2021
2. Competency Certification of Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dated August 18, 2021 CRMS organizer
3. Webinar Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing on August 25, 2021



### **Moh Iskandar Nur SE**

Staff Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes tanggal 12 Januari 1991 berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2014. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk sebagai Senior Internal Auditor berdasarkan Surat Keputusan No. 022/SKEP/HRD/DIR-JCM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Sebelum bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2015 pernah bekerja di KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (sekarang KAP Mirawati Sensi Idris) member dari Moore Stephens International Public Accountant sebagai Junior Auditor dan pada tahun 2016 bekerja di KAP Rama Wendra Member dari McMillan Woods International Public Accountant sebagai Senior Auditor.

#### **Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2021 :**

1. Webinar "SA 500 Bukti Audit – Audit Berbasis ISA. Studi Kasus di Indonesia, Australia, dan Singapura" yang diselenggarakan oleh Ruang Seminar pada tanggal 18 September 2021 di Jakarta.
2. Webinar "Fraud Prevention and Detection For Non-Auditor" yang diselenggarakan oleh EBIF 21 (Economic and Business Indonesian Fair 2021 by BEM FEB UI yang bekerja sama dengan Ruang Seminar) pada tanggal 04 September 2021 di Jakarta.
3. Webinar "Effective Technique For Internal Audit" yang diselenggarakan oleh ATV 21 yang bekerja sama dengan Ruang Seminar dan SPA FEB UI pada tanggal 28-29 Agustus 2021 di Jakarta.
4. Webinar "Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing" yang diselenggarakan oleh KPAP (Komite Profesi Akuntan Publik) pada tanggal 25 Agustus 2021 di Jakarta.
5. Webinar "Artificial Intelligence in Accounting and Auditing : Opportunities and Challenges" yang diselenggarakan oleh KPAP (Komite Profesi Akuntan Publik) pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jakarta.
6. Webinar "How can optimized anti-bribery controls leverage your business sustainability? Lessons learnt from ISO 37001 early implementation & How to enhance your anti-bribery controls" yang diselenggarakan oleh Ernst & Young Indonesia pada tanggal 28 Juli 2021 di Jakarta.

### **Moh Iskandar Nur SE**

Internal Audit Staff

Indonesian citizen, born in Brebes on January 12th, 1991, domiciled in Jakarta. Graduated as a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Diponegoro University, Semarang, in 2014. Joined PT Asuransi Bintang Tbk as a Senior Internal Auditor based on Decree No. 022/SKEP/HRD/DIR-JCM/II/2018 dated February 12th, 2018. Before joining PT Asuransi Bintang Tbk, in 2015 he worked at KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (now KAP Mirawati Sensi Idris), a member of Moore Stephens International Public Accountant, as a Junior Auditor and in 2016 worked at KAP Rama Wendra, a Member of McMillan Woods International Public Accountant as Senior Auditor.

#### **Education/seminars attended during 2021:**

1. Webinar "SA 500 Audit Evidence – ISA-Based Auditing. Case Studies in Indonesia, Australia, and Singapore" organized by the Seminar Room on 18 September 2021 in Jakarta.
2. Webinar "Fraud Prevention and Detection For Non-Auditors" organized by EBIF 21 (Economic and Business Indonesian Fair 2021 by BEM FEB UI in collaboration with the Seminar Room) on September 4, 2021 in Jakarta.
3. Webinar "Effective Technique For Internal Audit" organized by ATV 21 in collaboration with Seminar Room and SPA FEB UI on 28-29 August 2021 in Jakarta.
4. Webinar "Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing" organized by KPAP (Committee for Professional Public Accountants) on August 25, 2021 in Jakarta.
5. Webinar "Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: Opportunities and Challenges" organized by KPAP (Committee for Professional Public Accountants) on August 24, 2021 in Jakarta.
6. Webinar "How can optimized anti-bribery controls leverage your business sustainability? Lessons learned from ISO 37001 early implementation & How to enhance your anti-bribery controls" organized by Ernst & Young Indonesia on July 28, 2021 in Jakarta.



## Pengendalian Internal

Internal Control

7. Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) Tingkat Lanjutan yang diselenggarakan oleh YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit) pada tanggal 7-19 Juni 2021 di Jakarta.
8. Webinar Nasional "Implementasi Forensic Accounting dalam Mendeteksi Fraud" yang diselenggarakan oleh EBIF 21 (Economic and Business Indonesian Fair 2021 by BEM FEB UI yang bekerja sama dengan Ruang Seminar) pada tanggal 05 Juni 2021 di Jakarta.
9. Webinar "Technology-Based Audit: Planning, Assignment, Reporting and Follow Up" yang diselenggarakan oleh Auditor Indonesia pada tanggal 22 Mei 2021 di Jakarta.
10. Webinar "Peran Audit Internal Dalam Mengawal Organisasi Menuju Transformasi Digital di Era Kenormalan Baru" yang diselenggarakan oleh YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit) pada tanggal 17 April 2021 di Jakarta.
7. Advanced Level QIA (Qualified Internal Auditor) certification organized by YPIA (Internal Audit Education Foundation) on 7-19 June 2021 in Jakarta.
8. National Webinar "Implementation of Forensic Accounting in Detecting Fraud" organized by EBIF 21 (Economic and Business Indonesian Fair 2021 by BEM FEB UI in collaboration with Seminar Room) on June 5, 2021 in Jakarta.
9. Webinar "Technology-Based Audit: Planning, Assignment, Reporting and Follow Up" held by Indonesian Auditor on 22 May 2021 in Jakarta.
10. Webinar "The Role of Internal Audit in Escorting Organizations Towards Digital Transformation in the New Normal Era" organized by YPIA (Internal Audit Education Foundation) on April 17, 2021 in Jakarta.

## PIAGAM INTERNAL AUDIT

PT Asuransi Bintang Tbk sudah memiliki Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) sejak tahun 2015 dan diperbaharui pada tahun 2020. Piagam audit internal ("Piagam") merupakan kesepakatan dari manajemen dan Dewan Komisaris/Komite Audit mengenai antara lain: misi, visi, kedudukan organisatoris, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Audit Internal. Piagam ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Auditor Internal PT Asuransi Bintang dan berlaku efektif untuk seluruh organisasi PT Asuransi Bintang Tbk dan Anak Perusahaan.

## TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI INTERNAL AUDIT

### Tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari perusahaan akan dapat dicapai dengan memperhatikan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam hubungan ini Kepala Unit Audit Internal harus mempertanggungjawabkan kegiatannya secara rutin kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

## INTERNAL AUDIT CHARTER

PT Asuransi Bintang Tbk has had an Internal Audit Charter since 2015 and has been renewed in 2020. The internal audit charter ("Charter") is an agreement from the management and the Board of Commissioners/Audit Committee regarding, among others: mission, vision, organizational position, duties, authority, and responsibilities of Internal Audit. This Charter is the basis for the implementation of Internal Auditor's duties of PT Asuransi Bintang and is effective throughout the organization of PT Asuransi Bintang Tbk and its subsidiary.

## DUTIES AND AUTHORITIES OF INTERNAL AUDIT DIVISION

### Duties and responsibilities of the Head of the Internal Audit Division

The Head of the Internal Audit Unit Division is responsible for planning an audit, carrying out audit, managing and directing the audit and evaluating existing procedures to gain assurance that the goals and objectives of the company will be achieved by considering aspects of Good Corporate Governance. In this regard, the Head of the Internal Audit Unit must be held accountable to its routine activities and report to the President Director and the Audit Committee.



### **Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab:**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit.
6. Memantau, menganalisis, memastikan dan meaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Mengkomunikasikan hasil evaluasi manajemen risiko kepada komite audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERNAL**

Ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Pemegang Saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (internal control) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal ini termasuk :

1. Menelaah sistem yang telah dibentuk untuk meyakinkan ketaatan dari kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi perusahaan.
2. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

### **The Head of the Internal Audit Unit is responsible for:**

1. Develop and implement an annual Internal Audit plan.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policies.
3. Review and evaluate the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Provide constructive input and objective information about the activities examined at all levels of the management.
5. Prepare audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners through the audit committee.
6. Monitor, analyze, ensure and report the implementation of follow-up of corrective actions that have been suggested.
7. Communicate the results of risk management evaluation to the audit committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities implemented; and
9. Conduct special examination if needed.

### **SCOPE OF WORK OF INTERNAL AUDIT**

The scope of the Internal Auditor's work covers all aspects and elements of equivalent business activities both directly and indirectly predicted to affect how good the implementation of the interests of both Shareholders and the management. In this regard, the scope of the Internal Auditor's work includes examining and assessing the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of its implementation, including all aspects and elements of the Company's organization so as to support optimal analysis in assisting the decision making process of the management. This includes:

1. Review systems that have been established to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations, which have a significant impact on the company's operations.
2. Review the reliability and integrity of financial and operational information and tools used to identify, measure, clarify, and report such information.



## Pengendalian Internal

Internal Control

3. Menelaah perangkat keamanan aset dan juga memverifikasi keberadaan aset tersebut.
  4. Menelaah kebijakan akuntansi dan laporan keuangan yang penting, termasuk kebijakan akuntansi yang benar atas transaksi yang rumit dan tidak biasa (unusual).
  5. Menelaah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, meneliti apakah laporan tersebut telah disusun secara lengkap, konsisten, sesuai dengan prinsip akuntansi yang tepat.
  6. Menelaah setiap potensi efisiensi dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasinya.
  7. Melaksanakan penugasan khusus dari Presiden Direktur atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Unit Internal Audit.
  8. Membuat laporan hasil audit dan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Review asset security devices and also verify the existence of these assets.
  4. Review important accounting policies and financial statements, including the correct accounting policies for complex and unusual transactions.
  5. Review the annual financial statements and interim financial statements, examining whether the report has been prepared in a complete and consistent manner, in accordance with the right accounting principles.
  6. Review every potential efficiency and cost effectiveness and make recommendations.
  7. Carry out special assignments from the President Director or the Board of Commissioners through the Audit Committee that are relevant to the scope of work of the Internal Audit Unit.
  8. Prepare a report on audit results and recommendations for improvement.

## PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDIT

Untuk peningkatan kompetensi internal auditor dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan dalam bentuk seminar, kursus dan program sertifikasi yang terkait dengan masalah asuransi, auditing dan fraud serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel. Saat ini semua Staf Internal Audit telah memiliki Certified General Insurance (CGI), untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Internal Audit seluruh Staf Internal Audit sedang mengikuti Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) di Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai fraud, internal auditor perusahaan juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA) Indonesia dan Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter.

## HR DEVELOPMENT AND AUDIT PROFESSION DEVELOPMENT

To increase internal auditor competency, participation in various training activities in the form of seminars, courses and certification programs related to insurance, auditing and fraud as well as Risk Management issues carried out by credible institutions is necessary. At present, all Internal Audit Staff have been Certified with General Insurance (CGI), and some of the Staff are currently participating in the Certification program of the Indonesian Insurance Management Expert Association (AAMAI) for AAAIK and AAIK. Meanwhile, to increase knowledge about Internal Audit, all Internal Audit Staff are participating in Qualified Internal Auditors (QIA) Certification program at Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). To increase knowledge about fraud, the company's internal auditors also participated in activities held by The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA) Indonesia and the Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter.



## PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Sehubungan dengan pandemi covid-19 perusahaan sudah mengambil kebijakan untuk memberlakukan work from home dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menyebabkan auditor internal tidak bisa datang langsung ke tempat auditee untuk menjalani proses audit. Untuk itu upaya audit internal, sejak masa pandemi covid 19 dirubah pelaksanaannya dengan cara melakukan proses audit jarak jauh (remote audit).

Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, dengan cara livestreaming dengan mempertimbangkan perangkat digital yang dimiliki oleh organisasi Auditor Internal dalam melakukan teknik audit seperti observasi, wawancara, dan lainnya dilakukan menggunakan Microsoft Team atau Zoom.

Pada tahun 2021 perusahaan telah mengambil kebijakan untuk melakukan serifikasi ISO 9001; 2015 sistim standar manajemen mutu dimana seluruh tim audit internal terlibat langsung mulai dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan audit mutu. Pada bulan Maret 2021 perusahaan telah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 ; 2015.

Dengan adanya peningkatan wabah pandemi covid 19 pada tahun 2021, turut berpengaruh kepada pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Audit Internal untuk tahun 2021 karena ada dari pegawai Auditor Internal maupun dari Auditee yang mengalami sakit akibat Covid 19, yang mengakibatkan kegiatan audit mengalami beberapa penundaan dari rencana sebelumnya. Untuk periode tahun buku 2021 Unit Audit Internal PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta menerbitkan sejumlah Audit Report, yaitu:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Internal ISO 9001 :2015
2. Pemeriksaan terhadap 18 Kantor Point of Sales (PoS)
3. Pemeriksaan khusus
4. Pemeriksaan terhadap kelola dan asset investasi perusahaan
5. Review pelaksanaan sistim antifraud
6. Inventarisasi asset perusahaan
7. Stock opname barang dan inventaris kantor
8. Cash count akhir tahun 2021

## IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES

Due to COVID-19 pandemic, the company has implemented work from home policy. Large Scale Social Restriction has kept our Internal Auditors from visiting the auditees. Therefore, as an alternative to the traditional audit face-to-face process, the method has been adjusted into remote audit since COVID-19 pandemic.

The remote audit is done by utilizing two-way communication technology, with livestreaming considering the digital devices owned by the Internal Auditor organization in conducting audit techniques such as observation, interviews and so on, are done via Microsoft Teams or Zoom.

In 2021, the company has taken policies to perform ISO 9001 certification; In 2015, quality management standard system where the entire internal audit team is directly involved from the preparation implementation process of quality audit. In March 2021, the company has succeeded in achieving ISO 9001 certification; 2015.

With the increase in the COVID-19 epidemic in 2021, it will also affect the implementation of the work plan and Internal Audit activities for 2021. There are Internal Auditor employees and Auditees who are sick due to COVID-19, which results in audit activities experiencing several delays from the previous plan.. For the Financial Year 2021, the Internal Audit Unit of PT Asuransi Bintang Tbk has carried out its duties and responsibilities and published a number of Audit Reports, namely:

1. Preparation and Implementation of ISO 9001: 2015 Internal Audit
2. Examination of 18 Point of Sales (PoS) Offices
3. Special inspection
4. Examination of the management and investment assets of the company
5. Review of the anti-fraud system implementation
6. Company assets inventory
7. Stock opname of goods and office inventory
8. Cash count at the end of 2021



## Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Perusahaan telah menetapkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen telah menyusun, menetapkan, dan berkomitmen menerapkan kebijakan perusahaan mengenai penerapan Pedoman Sistem Pengendalian Internal untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum sistem pengendalian internal di perusahaan meliputi setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian dapat bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan terjadi) atau direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Konsep sistem pengendalian merupakan gabungan komponen kontrol yang terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. pencapaian tujuan penyelenggaraan strategi dan kegiatan operasional yang dilaksanakan PT Asuransi Bintang Tbk yang ekonomis, efektif dan efisien.
2. keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan, Informasi dan kinerja operasional yang disusun oleh PT Asuransi Bintang Tbk
3. pengamanan aset, aset perusahaan yang dikelola oleh PT Asuransi Bintang Tbk
4. kepatuhan/ketaatan terhadap prosedur dan peraturan internal maupun eksternal yang berlaku.

### Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian intern di perusahaan mengadopsi konsep tiga lini pertahanan (Three Lines of Defense) dimana masing-masing unit di organisasi berperan dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal di perusahaan diterapkan melekat pada seluruh bisnis proses yang ada di setiap unit kerja, sehingga semua fungsi yang ada di dalam organisasi memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal untuk tercapainya tujuan perusahaan. Konsep ini membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (owning risks/risk owner) terhadap

The company has established an internal control system as a vital component of supervision in the management of the company. The Management has formulated, established, and committed to implementing company policies regarding the application of Internal Control System Guidelines to achieve good corporate governance system in order to attain company goals. In general, internal control system in the company includes every action taken by the management to improve the opportunity of reaching the predetermined goals and objectives. Control can be preventive (to prevent the occurrence of undesirable event), detective (to detect and correct undesirable event) or directive (to cause or direct undesirable event). The concept of control system is a combination of integrated control components and activities used by an organization that aims to achieve the following objectives:

1. Achieving the objectives of implementing the strategies and operational activities carried out by PT Asuransi Bintang Tbk that are economical, effective and efficient.
2. Accuracy and reliability of financial reporting, Information and operational performance prepared by PT Asuransi Bintang Tbk
3. Securing assets, company assets managed by PT Asuransi Bintang Tbk
4. Compliance with applicable internal and external procedures and regulations.

### Duties and Responsibilities of Internal Control System Implementation

The implementation of internal control system in the company adopts the concept of three lines of defense (Three Lines of Defense) in which each unit in the organization is responsible for creating good internal control system. The internal control system in the company is applied in all existing business processes in each work unit, so that all functions in the organization play an important role in implementing internal control system to achieve the company's goals. This concept distinguishes between business functions as functions of risk owners against functions that manage risks (managing risks), and between functions that oversee risks (overseeing risks) with



fungsi-fungsi yang menangani risiko (managing risks), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (overseeing risks) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (independent assurance). Kesemua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Masing-masing lini memiliki peran sebagai berikut:

- Lini Pertama: Fungsi Pemilik Risiko, adalah semua pihak yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari (bekerja sehari-hari). Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini pemilik risiko diharapkan untuk:
  - a. memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif di unit bisnis mereka.
  - b. menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mencapai pertumbuhan perusahaan. Manajemen unit kerja diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
  - c. mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis Pemilik Risiko, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.
- Lini Kedua: Fungsi Pengawas Risiko, adalah Pihak yang ditunjuk untuk mengawasi Risiko. Pertahanan Lini Kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi yang sudah terstruktur yaitu divisi manajemen risiko dan Quality management yang diharapkan untuk:
  - a. bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Dengan menyusun road-map manajemen risiko, yang sesuai dengan rencana jangka panjang dan strategi perusahaan. Diantaranya dengan mengembangkan dan memastikan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan.
  - b. melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah

functions that provide independent assurance. All of these functions largely contribute to successful implementation of good internal control system. Each line has the following roles:

- First Line: Risk Owner Function, is all parties performing their work every day. First Line of Defense is carried out by a unit or component or business function that carries out the day-to-day operational activities of the company, especially those that are at the front line or become the spearhead of the organization. In this case, the risk owner is expected to:
  - a. ensure a conducive control environment in their business units.
  - b. Implement risk management policy that has been set when carrying out their roles and responsibilities, especially in achieving company growth. Work unit management is expected to be fully aware of the risk factors in their decisions and actions.
  - c. Able to demonstrate the implementation of effective internal control in the Risk Owner business unit, and also the monitoring and transparency of the effectiveness of the internal control.
- Second Line: Risk Oversight Function, is the Party appointed to oversee the Risk. The Second Line of Defense is carried out by the functions of risk management and compliance, especially functions that are already included in the structure, namely risk management and Quality management divisions, which are expected to:
  - a. Be responsible for developing and monitoring the implementation of overall corporate risk management by developing risk management road map that is in accordance with the company's long-term plans and strategies. Among others, by developing and ensuring the implementation of Risk Management System in the Company.
  - b. Overseeing how business functions are carried out in the corridor of risk management policies and standard operating procedures established by the company. Among others by





## Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

ditetapkan oleh perusahaan. Diantaranya dengan memastikan bahwa assessment dan tindak lindung risiko telah dilakukan di Unit Kerja untuk meminimalisir kerugian/mengurangi potensi risiko.

- c. memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan, dengan menyusun Register Risiko Perusahaan.
- Lini Ketiga: Fungsi Pemeriksa Risiko, adalah Pihak yang bertugas untuk memeriksa Risiko. Pertahanan Lini Ketiga dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena Pemeriksa Risiko adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independent terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:
  - a. Melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
  - b. Memastikan bahwa pertahanan lini pertama dan lini kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

PT Asuransi Bintang Tbk menempatkan sistem pengendalian internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja atau kegiatan perusahaan sehari-hari. Sistem Pengendalian Internal mengacu kepada prinsip pemisahan fungsi dalam hal pengendalian keuangan dan operasional serta memastikan semua sistem, prosedur, kaidah, dan norma Perusahaan dijalankan dengan benar.

### Pengendalian Keuangan Dan Operasional Perusahaan

Dalam melaksanakan pengendalian internal terkait keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan investasi yang menjadi panduan bagi Perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi, jenis-jenis instrument yang menjadi prioritas dalam penempatan investasi, serta panduan dalam mengelola kebutuhan jumlah dana operasional yang dibutuhkan selama periode tertentu. Setiap penempatan investasi perusahaan dilakukan atas hasil evaluasi dan persetujuan dari Komite Investasi. Dalam hal pengendalian terkait anggaran, Perusahaan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui pemantauan realisasi dibandingkan dengan anggaran keuangan yang telah ditetapkan, dilakukan dalam rapat secara berkala oleh management minimal satu bulan sekali.

ensuring that assessments and risk protection measures have been carried out in the Work Unit to minimize losses/reduce potential risks.

- c. Monitor and report company risks as a whole to the organ that has the highest accountability in the company, by preparing the Company Risk Register.
- Third Line: Risk Examiner Function, is the Party assigned to examine Risks. The Third Line of Defense is carried out by both internal and external auditors. Internal Auditor has more significant role in this model because Risk Examiner are internal part of the company that are independent to other functions. In this case, the internal auditor is expected to:
  - a. Review and evaluate the overall plan and implementation of risk management, and
  - b. Ensure that both first and second line of defense run properly according to the plan.

PT Asuransi Bintang Tbk puts internal control system as an inseparable part of every day's corporate functions or activities. The Internal Control System refers to the principle of separation of functions in terms of financial and operational controls and ensures that all systems, procedures, rules and norms of the Company are properly carried out.

### Financial and Operational Control of the Company

In implementing internal control related to finance, the Company has a policy in managing investments that serves as guidelines for the Company in conducting investment activities, types of instruments that become priorities in investment placements, as well as guidance in managing the needs for the amount of operational funds needed for a certain period. Every investment placement of the company is carried out based on evaluation results and approval from the Investment Committee. In respect of control related to the budget, the Company has carried out financial control process by monitoring the realization in comparison with the predetermined financial budget, which is conducted at periodical meeting by the management at least once a month.



Pengendalian Operasional, sejak bulan Maret 2021 perusahaan telah memiliki sertifikasi ISO 9001; 2015, melalui penerapan ISO 9001 perusahaan telah memiliki standar mutu untuk setiap bisnis proses di seluruh unit organisasi dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip ISO 9001 juga perusahaan selalu melakukan review dan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dan perkembangan bisnis. Perusahaan secara berkelanjutan melengkapi dan melakukan update seluruh standar operasional dan prosedur (SOP) di setiap Unit kerja yang ada di organisasi perusahaan terkait dengan seluruh kegiatan, aktivitas dan transaksi-transaksi operasional yang ada di perusahaan jika dianggap perlu. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan telah direview oleh unit unit kerja yang terkait untuk memastikan risiko operasional yang mungkin ada dalam setiap business process telah dimitigasi dengan baik.

Asuransi Bintang telah menerapkan sistem pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi keuangan, underwriting dan klaim; serta pembatasan akses ke jaringan sistem informasi perusahaan dan komputer melalui pengendalian penggunaan User ID dan password. Penerapan sistem pengendalian risiko dan aset mencakup: pengamanan aset, catatan, program komputer dan back up file data serta perusahaan telah memiliki disaster recovery plan (DRP)

Asuransi Bintang telah membentuk struktur organisasi dengan baik yang dapat mendukung berjalannya pengendalian operasional seperti pemisahan fungsi (segregation of duties) yang dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest).

### **Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Pada tahun 2021 PT Asuransi Bintang Tbk telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam kerangka tata kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian internal perusahaan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Operational Control is carried out by making and completing all standard operating procedures (SOP) in each work unit in the company organization related to all activities, activities and operational transactions that occur in the company. The establishment of the work procedures is carried out by the Quality Management & Operation Unit (QMO) and has been reviewed by the relevant work units to ensure that any operational risk potential in each business process have been properly mitigated.

Asuransi Bintang has implemented a system of limiting the authority of officers through the determination of limit in conducting financial transactions, underwriting and claims; and restrictions on access to corporate and computer information systems networks by controlling the use of User IDs and passwords. The implementation of risk and asset control system includes asset security, records, computer program, and data file security.

Asuransi Bintang has established good organizational structure that can support the implementation of operational control such as segregation of duties that can prevent conflict of interest.

### **Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System**

In 2021, PT Asuransi Bintang Tbk has implemented an internal control system as part of good corporate governance. In its implementation, the company's internal control system involves coordination with various parties, especially with the Audit Committee and External Auditors.



## Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sepanjang tahun 2021, seluruh Manajemen dan pegawai PT Asuransi Bintang Tbk memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Meskipun demikian, perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang lebih handal agar berjalan beriringan dengan perkembangan bisnis perusahaan demi mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dengan telah dimilikinya sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 :2015 menuntut perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi dan improvement untuk peningkatan dan perbaikan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan menyesuaikan dengan perkembangan model bisnis perusahaan dan tuntutan pelanggan.

### **PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal, termasuk menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level

Throughout 2021, all Management and employees of PT Asuransi Bintang Tbk have roles and responsibilities in improving the quality and implementation of the company's internal control system so that it can run properly. Nevertheless, the company always strives to improve the system of internal control to be more reliable so that it can keep up with the development of the company's business in order to realize the goals that have been set together.

Having the ISO 9001: 2015 quality management certification requires the Company to evaluate themselves consistently, for continuous development and improvement of the internal control system in accordance with the development of the company's business model and customer demands.

### **STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM**

The Board of Commissioners has the responsibility and has supervised the implementation of the Internal Control System, including approving and monitoring the policies of the Board of Directors that determine the internal control. In implementing the duties, powers and responsibilities of supervising, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and the Good Corporate Governance Committee.

The Board of Directors is responsible for the implementation of a reliable and effective Internal Control System and has made efforts to improve an effective risk awareness culture at every level.



## Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Audit Internal telah melakukan evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan, berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan, antara lain melalui kegiatan pemeriksaan terhadap unit maupun aktivitas.

Dengan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang telah dimiliki oleh perseroan, perusahaan telah memiliki standarisasi proses kerja yang terintegrasi, terstruktur dan terorganisir yang lebih memudahkan pengurus perusahaan dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan melakukan evaluasi untuk perbaikan dan pengendalian internal perusahaan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi selalu disampaikan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan monitoring secara konsisten untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah berperan aktif dalam mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal melalui penelaahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit Internal.

Internal Audit has evaluated the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis, related to operational implementation in achieving the targets set by the Company, among others through inspection activities on units and activities.

With the ISO 9001:2015 Quality Management System Certification which is owned by the company, the company has standardized work processes that are integrated, structured and organized which make it easier for company management to carry out supervision, control and evaluate for continuous improvement and internal control of the company.

The results of the evaluation are always submitted to the Board of Directors and related units to be followed up and monitored for implementation. Improvements are always made to problems that arise and consistent monitoring is carried out to ensure that the Internal Control System has been running effectively.

The Board of Commissioners through the Audit Committee has played an active role in evaluating the Internal Control System through a review of the results of the examination conducted by the Internal Audit.



## Akuntan Perseroan/Eksternal Auditor

### Company Account / External Auditor

#### PENUNJUKAN AKUNTAN PERSEROAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021, menyetujui penunjukan Jacinta Mirawati sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bintang Tbk untuk tahun buku 2021. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat fresh eye perspectives yang diperoleh melalui penggantian A);
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

#### APPOINTMENT OF COMPANY ACCOUNT

Based on the Annual General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Bintang Tbk which was held on July 15, 2021, approved the appointment of Jacinta Mirawati as a Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) as KAP registered at the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and the Financial Services Authority to audit the consolidated financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk for the 2021 financial year. As well as determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the AP and KAP by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

The appointment of AP and/or KAP that will provide audit services on annual historical financial information has been decided by the Annual General Meeting of Shareholders taking into account the proposal of the Board of Commissioners. The proposal for the appointment of AP and/or KAP submitted by the Board of Commissioners has taken into account the recommendations of the Audit Committee in accordance with Article 13 Paragraph 4 of the Regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Service Activities Finance.

In preparing recommendations, the Audit Committee has considered:

- Independence of AP, KAP, and people in KAP;
- Scope of audit;
- Fee for audit services;
- Expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team from KAP;
- Methodology, techniques, and audit facilities used by KAP;
- Benefits of fresh eye perspectives obtained through replacement A);
- The potential risk of using audit services by the same KAP in succession for a fairly long period of time.
- The results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.



Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa AP dan/atau KAP yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan (honorarium) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

Audit Period and Fees of AP and/or KAP that provide financial audit services and the value of the fee (honorarium) for the audit, as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Nama Akuntan Name of the Accountant	Biaya Jasa Audit Auditing Fee
2021	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp 255.750.000
2020	Mirawati Sensi Idris	Ahmad Syakir	Rp 255.750.000
2019	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp237.500.000
2018	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp237.500.000
2017	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp237.500.000

### Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan AP dan/atau KAP untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap laporan keuangan PT Asuransi Bintang Tbk telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

- Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional AP yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*).

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

### The Effectiveness of External Audit Implementation.

The Audit Committee reviews the effectiveness of the audit, including ensuring that the audit is carried out in accordance with the provisions and professional standards, the work agreement and the scope of the audit, as well as the independence of the external auditor. The Audit Committee regularly holds meetings with AP and/or KAP to discuss the progress and process of the examination carried out.

The audit carried out by AP and/or KAP on the financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk has been carried out independently, professionally and objectively, including:

- Checks have been carried out on all material accounts based on Professional Standards. The applicable AP and conformity to the applicable Accounting Standards in Indonesia.
- Submission of audited consolidated financial statements accompanied by a letter of Recommendation to Management (*Management Letter*).

The Audit Committee's evaluation of the implementation of the provision of audit services on the annual historical financial information by the AP and/or KAP above is carried out through:

- Conformity of the audit by AP and/or KAP with applicable audit standards;
- Sufficient time for field work;
- Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and
- Recommendations for improvement given by AP and/or KAP.



#### **Akuntan Perseroan/Eksternal Auditor**

Company Account / External Auditor

### **Hubungan Antara Perusahaan, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan**

PT Asuransi Bintang Tbk sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan akses, data dan informasi yang diperlukan oleh AP dan/atau KAP dalam rangka pemeriksaan. Auditor (AP dan/atau KAP) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh AP dan/atau KAP baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Relationship Between Companies, Public Accountants, and the Financial Services Authority**

PT Asuransi Bintang Tbk as the party being audited publicly provides access, data and information required by the AP and/or KAP for the purpose of the audit. Auditors (AP and/or KAP) independently conduct inspections and submit suggestions and suggestions for improvement to Management for follow-up.

Communication and collaboration with external auditors is always carried out related to accounting policy issues and fair presentation of financial statements. The audit results have been communicated by the AP and/or KAP to the Management, the Audit Committee, and the Financial Services Authority.



## Penerapan Manajemen Risiko

### Implementation Of Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko di perusahaan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan Peraturan OJK No 44/ POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui kerangka kerja yang mengikuti tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan evaluasi pada setiap proses bisnis pada setiap unit kerja.

Fokus kerja penerapan manajemen risiko pada perusahaan adalah pada 9 (sembilan) jenis risiko yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

#### RISIKO STRATEGIS

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam penyusunan rencana strategis, Perusahaan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga rencana yang disusun dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana strategis juga menjaga konsistensi dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, keberadaan tahapan dan mekanisme yang jelas.

Perusahaan mempersiapkan strategi alternatif untuk memitigasi risiko jika rencana strategis yang ditetapkan di awal berisiko tinggi untuk tidak tercapai. Antisipasi ini dilakukan terutama untuk rencana strategis yang secara langsung akan memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Perusahaan memiliki tahapan dan mekanisme secara formal dalam penyusunan rencana strategis. Jika terdapat perubahan dalam rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perubahan tersebut akan dilaporkan dalam laporan penyesuaian rencana bisnis di tengah tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan

The implementation of Risk Management in the Company refers to the Financial Services Authority Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning Risk Level Assessment of Non- Bank Financial Services Institutions and OJK Regulation No. 44/ POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.

The implementation of risk management is carried out through a framework that follows the stages of identification, measurement, monitoring, and evaluation processes of each business in every work unit.

The implementation of risk management in the company focuses on 9 (nine) types of risks that have been determined by the Financial Services Authority, namely: Strategic Risk, Operational Risk, Insurance Risk, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk and Reputational Risk.

#### STRATEGIC RISK

Strategic risk is a risk due to the uncertainties in a strategic decision making or implementation and the failure to anticipate changes in business environment.

In constructing strategic plan, the company considers plenty aspects in order to achieve what have been planned. Strategic planning also maintains consistency by putting attention to occurring changes, the existence of stages and clear mechanism.

The company prepare alternative strategy to mitigate any risk if the strategic plan that was decided has a high risk to be unachieved. The anticipation is mainly done for the strategic plans which will directly impact the company's operational activities.

The company formally has the stages and mechanism which has been decided beforehand, so the changes will be reported in the business plan adjustment mid-year report to the Financial Services Authority.





## Penerapan Manajemen Risiko Implementation Of Risk Management

### RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kelangsungan usaha perusahaan. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan sangat didukung oleh sistem teknologi informasi yang sangat adaptif dalam meningkatkan layanan kepada nasabah.

Perusahaan selalu melakukan pembaruan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan operasional yang diakibatkan oleh sistem teknologi informasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur *Business Continuity Plan* telah dibuat untuk mengantisipasi risiko operasional yang diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi atau gangguan lainnya yang berakibat tidak berfungsinya sistem teknologi informasi.

Perusahaan menggunakan layanan *server* di luar kantor serta memiliki *backup server* untuk memastikan operasional perusahaan tetap berlangsung meskipun terjadi peristiwa atau bencana alam yang dapat menghentikan sistem utama dan jaringan yang ada di perusahaan.

### RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko *underwriting*, penetapan premi (*pricing*, penggunaan reasuransi dan penanganan klaim).

Dalam mengelola risiko asuransi, perusahaan telah membuat *manual underwriting* yang dijadikan acuan bagi setiap *underwriter* dalam menerima setiap risiko yang diasuransikan. *Manual underwriting* tersebut diperbaharui setiap tahun untuk setiap lini usaha asuransi. *Manual underwriting* mencakup jenis-jenis risiko yang boleh diterima oleh *underwriter*, risiko yang perlu mendapatkan persetujuan dari *underwriter* di kantor pusat dan risiko yang tidak bisa diterima. Kapasitas akseptasi untuk setiap jenis risiko juga diatur dalam *manual underwriting* tersebut.

### OPERATIONAL RISK

Operational risk is a risk that arises due to the lacking or the disfunction of internal processes, human error, system error or the occurrence of external events to the company.

Along with the growth of the company, Information Technology plays an important role in the sustainability of the company's business. Increased operational efficiency of the company is strongly supported by an information technology system that is very adaptive in improving services to customers.

The company always conducts updates as an anticipation of operational disruption caused by failure in the information technology system. The Business Continuity Plan procedure has been made to anticipate operational risks caused by fire, earthquakes, or other risks resulting in the non-functioning of information technology system.

The company also has a backup server outside the head office to ensure that the company remain in operations despite natural disaster that may shut down the main system and network in the company.

### INSURANCE RISK

Insurance risk is a risk of failure of insurance companies and reinsurance companies to fulfill their obligations to the insured as a result of inadequacy of risk selection processes (*underwriting*), premium setting (*pricing*, reinsurance usage and claim handling).

In managing insurance risk, the company has prepared an underwriting manual that is used as a reference for each underwriter in accepting any insured risk. The underwriting manual is updated every year for each insurance business line. The underwriting manual covers the types of risks that the underwriters may accept, risks that need approval from the underwriters at the head office, and unacceptable risks. Acceptance capacity for each type of risk is also regulated in the underwriting manual.



Portfolio risiko asuransi yang ditanggung oleh perusahaan harus dijaga keseimbangannya antara risiko yang memiliki tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Selain itu jenis lini usaha yang dikembangkan harus seimbang agar tidak ada lini usaha yang terlalu dominan sehingga jika ada perubahan kondisi eksternal yang tidak bisa dihindari yang mempengaruhi salah satu lini usaha, tidak mengganggu portfolio perusahaan secara keseluruhan.

Perusahaan juga melakukan manajemen risiko dengan cara mereasuransikan risikoyang melebihi retensi sendiri perusahaan baik dengan menggunakan mekanisme reasuransi otomatis (*treaty*) ataupun dengan menggunakan reasuransi fakultatif. Perjanjian reasuransi otomatis (*treaty*) diperbaharui setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan atas jenis risiko yang akan *discover* dan kapasitas asuransi yang dibutuhkan. Selain kapasitas per risiko perusahaan juga memerlukan *back up* atas risiko yang bersifat katastrofik seperti risiko banjir dan gempa bumi yang biasanya akan mengakibatkan kerusakan atas banyak risiko di suatu area.

## **RISIKO KREDIT**

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.

Dalam penempatan aset investasi dan reasuransi, Perusahaan mempertimbangkan kredibilitas dan/atau rating dari pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran investasi, Perusahaan juga telah memperhatikan diversifikasi dalam penempatan aset investasi. Penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terdiversifikasi memiliki tingkat risiko inheren yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu.

## **RISIKO PASAR**

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

The balance of insurance risk portfolio that is borne by the company must be maintained among risks that have low, medium and high-risk level. In addition, the type of business line developed must be balanced to ensure that there is no business line that is too dominant so that if there are changes in unavoidable external conditions that affect one business line, it does not interfere with the company's overall portfolio.

The company also conducts risk management by reinsuring risks that exceed the company's own retention, either by using an automatic reinsurance mechanism (*treaty*) or by using facultative reinsurance. An automatic (*treaty*) reinsurance agreement is renewed every year by considering the need for the type of risk to be covered and the required insurance capacity. In addition to capacity per risk, the company also needs to back up catastrophic risks, such as the risk of floods and earthquakes which usually may cause damage to many risks in an area.

## **CREDIT RISK**

Credit Risk is the risk of failure of the other party in fulfilling their responsibility to the company.

In planning of investment asset placement and reinsurance, the company would assess the credibility or rating of the third party to minimize the risk of failed investment payment. The company has also put attention on diversifying investment asset placement. Investment asset placement, billing and reinsurance that has been diversified, has lower inherent risk compared to the placement that concentrated to certain party only.

## **MARKET RISK**

Market risk is the risk on asset position, liabilities, equities and/or administrative account including derivative transaction due to the whole market condition change.



## Penerapan Manajemen Risiko

Implementation Of Risk Management

Perusahaan menempatkan investasi pada jenis investasi yang tidak memiliki volatilitas yang tinggi, dengan demikian aset perusahaan tidak terlalu terdampak pada volatilitas harga instrumen investasi.

Perusahaan cenderung menggunakan strategi pasif yakni tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli dan tahan (*buy and hold*).

## RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Risiko likuiditas berkaitan dengan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kewajiban perusahaan asuransi yang utama adalah kewajiban pembayaran klaim kepada tertanggung. Klaim harus sudah dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak besaran klaim disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung. Kewajiban lain adalah pembayaran premi reasuransi *treaty* yang umumnya dibayarkan setiap triwulan. Kemampuan membayar klaim dan premi reasuransi dengan tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan, kepercayaan dari para *stakeholder* dan kepastian dukungan para reasuradur.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional perusahaan dan anak perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual termasuk jadwal jatuh tempo hutang, dan secara terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Untuk menjaga likuiditas yang sehat perusahaan selalu menerapkan pengelolaan piutang premi yang efektif. Karena itu kebijakan penentuan umur piutang premi menjadi sangat penting. Saat ini kebijakan umur piutang premi maksimal 60 (enam puluh) hari secara konsisten diterapkan.

The company invests on low volatilities investment, so that the company's assets are not significantly impacted by investment instruments price volatility.

Companies tend to use passive strategy that is not reactive to the market dynamics and implement the buy and hold strategy.

## LIQUIDITY RISK

Liquidity Risk is the risk that might arise due to the company incapability to fulfill the liabilities that has been due from the cash flow financing source and/or from liquid assets that are easily converted to cash without impacting company's financial condition.

Liquidity risk is related with sufficient budget to pay all the due payment. The main obligation of insurance companies is to pay the claim to the insured. Claim must be paid no longer than 30 (thirty) days from when the claim has been aligned between the insurer and the insured. Other obligation is to pay the treaty reinsurance premium which generally is paid quarterly. The ability to pay claims and premiums punctually is highly crucial to maintain the company's reputation, trust from the stakeholders and firm support from reinsurers.

In running the liquidity risk, management will also monitor and keeping the budget amount and equal to budget which are deemed sufficient to fund the company's operational activities and the sub companies, in order to counter the cash flow fluctuation impact. Management also conduct regular evaluation on cash flow projection vs actual cash flow includes the due date of debt payment, while continuously examine the finance market to get optimum funding source.

To keep the healthy liquidity level, the company has always implemented effective premium account receivable management. Therefore, the policy in deciding the age of premium account receivable became crucial. As of now, the age of premium account receivable of 60 days is consistently implemented.



## RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum

Perusahaan selalu melakukan *review* secara berkala atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga terkait dengan aspek hukum yang tertera dalam perjanjian. Pelaksanaan *review* ini untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundangan yang berlaku. Sebelum dipasarkan kepada calon tertanggung perusahaan juga telah memastikan bahwa produk yang dipasarkan tersebut telah didaftarkan kepada otoritas yang berwenang.

## RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.

Perusahaan telah memiliki direksi yang membawahi fungsi kepatuhan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan di perusahaan memastikan bahwa seluruh peraturan perundangan yang berlaku telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Perusahaan juga memastikan keberadaan *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di perusahaan. Keberadaan unit kerja yang membawahi fungsi kepatuhan juga untuk memastikan bahwa seluruh SOP yang telah dibuat masih relevan terhadap fungsi dan proses kerja yang ada.

Sebagai bagian dari kewajiban kepada regulator, perusahaan selalu menyampaikan kewajiban pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

## RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari perspsi negatif terhadap perusahaan.

## LEGAL RISK

Legal risk is the risk that may arise from lawsuit and/or weak legal aspect.

The company has regularly conduct reviews on the terms of agreement that was made with third parties, related with legal aspects written on the terms. This review is to ensure that the agreement is already following the standards and regulations.

The company also ensures that the marketed products have passed the regulation and rules. Before being marketed to the future insureds, the company also made sure that the marketed products are registered to authorized regulator.

## COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk that the company doesn't and/or not implementing the legislation rules and the rules that's applied to the company.

The company already has Director of Compliance to fulfill the legislation rules. Compliance function in the company is to ensure that all the applied legislation rules have been implemented and complied to, consistently in every working unit. The company also ensures the standard operating procedure (SOP) that has been decided and implemented by every working unit in the company. The presence of working unit for compliance function also serves to make sure that all the SOP are still relevant with the current functions and working process.

As the part of obligation to the regulator, the company always submits the mandatory reports accurately and punctually.

## REPUTATIONAL RISK

Reputational Risk is the risk that arise due to the declining trust from stakeholders which may come from a negative perception towards the company.



### Penerapan Manajemen Risiko

Implementation Of Risk Management

Untuk melayani keluhan pelanggan, perusahaan telah memiliki *contact center* yang dapat diakses oleh tertanggung yang memiliki keluhan atau pertanyaan terhadap layanan yang terkait dengan penutupan polis, pembayaran premi ataupun layanan penyelesaian klaim. Setiap keluhan yang disampaikan oleh tertanggung akan dicatat dan diselesaikan oleh unit terkait sesuai dengan *standard* layanan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kepercayaan tertanggung atas pelayanan jaminan asuransi yang dimiliki, perusahaan memastikan bahwa tertanggung akan mendapatkan layanan klaim sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam perjanjian polis. Layanan klaim yang mudah dan cepat akan meningkatkan kepercayaan tertanggung kepada perusahaan.

### PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai yang tercermin dari hasil review atas kelengkapan dan keakuratan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko serta kecukupan atas mitigasi yang telah diterapkan untuk setiap skenario risiko yang melekat di setiap unit kerja di perusahaan.

To take care of our customers input, the company has a contact center that is accessible by the insured with complaints or queries related to policy issuance, premium payment or Claim settlement services. Each of the complaint by the insured will be recorded and solved by relevant units accordingly to the standard of service.

To increase the insured trust on the insured service they are provided with, the company ensures that the insured will get the claim service as stated in the policy agreement. Easy and fast claim service will increase the insureds trust to the company.

### STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee assess that the adequacy of the risk management system has been running adequately, as reflected in the results of a review of the completeness and accuracy of the risk identification, measurement, monitoring, control and reporting processes as well as the adequacy of the mitigations that have been implemented for each risk scenario. Attached to every work unit in the company



## Perkara Hukum yang Dihadapi selama Tahun Buku 2021

### Legal Cases Faced During Fiscal Year 2021

1. Gugatan Wanprestasi PT Artha Karya Sejahtera kepada PT Asuransi Bintang Tbk akibat tenggelamnya kapal beserta muatan yang diasuransikan:
  - a. Pokok perkara/gugatan:
    - Gugatan wanprestasi dari Eks Tertanggung PT Artha Karya Sejahtera ("Penggugat") akibat tenggelamnya kapal beserta muatan yang diasuransikan kepada PT Asuransi Bintang Tbk ("Tergugat"). Namun demikian, berdasarkan fakta yang ada dilapangan ditemukan bahwa kapal tidak tenggelam, melainkan digelapkan oleh nahkoda kapal yang juga telah ada putusan Pidana berdasarkan Putusan No.1011 K/PID/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
    - Petitum Gugatan: pembayaran claim Rp21.810.800.000 dan denda 10%/bulan dari jumlah pembayaran claim sampai dengan claim dibayar.
  - b. Status penyelesaian perkara/gugatan:

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.655PK/Pdt/2021 tanggal 11 Oktober 2021 pada tingkat Peninjauan Kembali menolak memori Peninjauan Kembali dari Penggugat.
  - c. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan:
    - PT Asuransi Bintang Tbk dinyatakan tidak melakukan wanprestasi.
1. Default claim from PT Artha Karya Sejahtera to PT Asuransi Bintang Tbk on the sinking of the insured ship and all its contents:
  - a. Principal case/claim:
    - Default claim from Ex-Insured PT Artha Karya Sejahtera ("Plaintiff") on the sinking of ship and all its contents to PT Asuransi Bintang Tbk ("Defendant"). However, based on the fact in the field, it was found that the ship did not sink, yet embezzled by the ship captain who also had been declared Offender based on Judgment No.1011 K/PID/2017 dated October 12th, 2017;
    - Petitum Claim: claim payment of Rp21,810,800,000 and a penalty of 10%/month from the total claim payment until the claim is paid.
  - b. Case/claim settlement status:

Based on Indonesia Republic Supreme Court Verdict No. 655PK/Pdt/2021 dated October 11, 2021 was rejecting Plaintiff's cassation memory on the cassation level.
  - c. Impact on company conditions:
    - PT Asuransi Bintang Tbk was declared not to experience default.



**Perkara Hukum yang Dihadapi selama Tahun Buku 2021**  
Legal Cases Faced During Fiscal Year 2021

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Eks Tertanggung Henry Yuwono kepada PT Astra International Tbk akibat kerugian kecelakaan kendaraan yang melibatkan PT Asuransi Bintang Tbk sebagai pihak asuransi
  - a. Pokok perkara/gugatan:
    - Gugatan wanprestasi dari Eks Tertanggung Henry Yuwono (“Penggugat”) kepada PT Astra International Tbk (“Tergugat I”) akibat kecelakaan kendaraan yang diasuransikan kepada PT Asuransi Bintang Tbk (“Tergugat II”). Namun demikian, berdasarkan fakta yang ada bahwa PT Asuransi Bintang Tbk telah membayar lunas biaya claim yang diajukan PT Astra International Tbk atas kendaraan milik Henry Yuwono sehingga PT Asuransi Bintang Tbk tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
    - Petitum Gugatan : pembayaran kerugian materiil Rp295.000.000 dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000.
  - b. Status penyelesaian perkara/gugatan:

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2908K/Pdt/2020 tanggal 23 November 2020 pada tingkat Kasasi menolak memori Kasasi dari Penggugat.
  - c. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan: PT Asuransi Bintang Tbk dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Claim for Unlawful acts of the Ex-Insured Henry Yuwono to PT Astra International Tbk on the loss arising from vehicle accident involving PT Asuransi Bintang Tbk as the insurer
  - a. Principal case/claim:
    - Default claim from Ex-Insured Henry Yuwono (“Plaintiff”) to PT Astra International Tbk (“Defendant I”) on vehicle accident insured to PT Asuransi Bintang Tbk (“Defendant II”). However, based on the fact, PT Asuransi Bintang Tbk has fully paid the claim filed by PT Astra International Tbk for Henry Yuwono’s vehicle. Therefore, PT Asuransi Bintang Tbk did not commit unlawful act;
    - Petitum Claim: payment of material loss of Rp295,000,000 and immaterial loss of Rp1,000,000,000.
  - b. Case/claim settlement status:

Based on Indonesia Republic Supreme Court Verdict No.2908K/Pdt/2020 dated November 23rd, 2020 was rejecting Plaintiff’s cassation memory on the cassation level.
  - c. Impact on company conditions: PT Asuransi Bintang Tbk was declared not to commit to unlawful acts.



## Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

### Code of Ethics and Code of Conducts

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Insan Perusahaan, Masyarakat Umum, Nasabah, Pemasok, Kontraktor, Mitra Kerja, Mitra Usaha dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perusahaan telah menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.

#### **Pernyataan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan**

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh Insan Bintang, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai diwajibkan untuk membaca dan mematuhi Pedoman Perilaku ini. Selain itu, pihak lain yang menjalankan jasa bagi perusahaan harus tunduk pada Kode Etik ini berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya.

The Company realizes the importance of the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) as one of the tools to sustainably increase the value and long-term business growth, not only for Shareholders but also for all other stakeholders. This means that business management is done not merely to seek for profit, but also to pursue trustworthiness, transparency, and accountability.

The trust of stakeholders such as Company Individuals, the Society, Customers, Suppliers, Contractors, Working Partners, Business Partners, and other stakeholders is critical to the development and sustainability of the Company's business. The Company's credibility and stakeholders' trust are closely related to the Company's behavior in any interaction with the stakeholders. The management of the Company not only shall be in line with the prevailing laws and regulations, but also uphold norms and ethical values. The awareness of carrying out good ethics will enhance and strengthen the Company's reputation.

With this in mind, the Company has prepared Code of Ethics and Code of Conduct to better adapt to the development of the business world and the applicable regulations. This Code of Ethics and Code of Conduct governs the policy of ethical values that are explicitly stated as an ethical standard and behavior that must be adhered to and applicable to all Company Individuals.

#### **Statement on the Code of Ethics Being Applicable to Member of Board of Directors, Members of Board of Commissioners, and Employees**

This Code of Ethics and Code of Conduct applies to all Bintang People, from the Board of Commissioners, Board of Directors, Structural and Functional Officials, and all employees. The Board of Commissioners, Board of Directors, Structural and Functional Officials, and all employees are required to read and comply with this Code of Conduct. In addition, other parties that implement services for the company shall adhere to this Code of Ethics based on contracts or other agreements.





## Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Code of Ethics and Code of Conducts

### Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakkannya

Perusahaan berkomitmen mensosialisasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku melalui program orientasi Calon Insan Bintang, pengembangan dalam kebijakan dan Perjanjian Kerja Bersama, penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi guna membangun sistem serta memantau penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, termasuk sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan Bintang tahunan dengan penandatanganan “Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bintang” oleh seluruh pegawai setiap tahun.

Kepatuhan terhadap standar etika tertinggi (Kode Etik dan Pedoman Perilaku) merupakan unsur penting dalam tanggung jawab Insan Bintang. Perusahaan sangat menganjurkan Insan Bintang untuk peduli terhadap masalah- masalah atau pertanyaan-pertanyaan terkait etika, diskriminasi atau pelecehan, dan melaporkan dugaan/tindakan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan maupun Undang- Undang lain yang berlaku untuk Perusahaan. Pengenalan dini dan penyelesaian atas masalah- masalah tersebut penting dilakukan guna menjaga komitmen Perusahaan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Pelanggaran Kode Etik meliputi namun tidak terbatas pada:

- Ketidakdisiplinan;
- Penggelapan;
- Penyampaian data, dokumen baik kepada *Stakeholders* internal maupun eksternal yang merupakan rahasia Perusahaan;
- Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perusahaan baik materiil maupun non-materiil;
- Penyalahgunaan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, kerabat atau saudara atau pihak lain, di luar kepentingan Perusahaan.

Pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku diatur tersendiri dalam suatu Kebijakan, yakni Kebijakan Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Selama tahun 2021, tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

### Socialization of Code of Ethics and Its Enforcement

The Company is committed to disseminating the Code of Ethics and Code of Conduct through an orientation program of Bintang Employee Candidates, development in policies, Collective Labor Agreements, and imposition of sanctions for violations that occur in order to build a system and monitor the implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct, including the dissemination to all Asuransi Bintang employees with the signing of “Statement of Compliance with Bintang Code of Ethics and Code of Conduct” by all employees every year.

Compliance with the highest ethical standards (Code of Ethics and Code of Conduct) is a vital element in the responsibility of Bintang Employees. The Company strongly encourages Bintang employees to care about problems or questions related to ethics, discrimination or harassment, and report allegations/violations of the applicable policies, regulations or other laws in the Company. Early recognition and resolution of these problems are important to maintain the Company’s commitment to the Code of Ethics and the Code of Conduct.

Violation to the Code of Ethics includes but are not limited to:

- Indisciplinary act;
- Fraud;
- Submission of confidential data and documents of the Company to both internal and external stakeholders;
- Forgery of financial statements for personal gains which may jeopardize the Company both materially and non-materially;
- Misuse of the Company’s assets for personal, group, relatives or other parties’ interests, outside the interests of the Company.

The reporting of violation to Code of Ethics and Code of Conduct is regulated in a separate policy, namely Whistleblowing System.

During 2021, there were no violations to Code of Ethics and Code of Conduct.



Di dalam Kode Etik PT Asuransi Bintang Tbk terdapat Kebijakan dan prosedur untuk menghindari adanya korupsi dan praktek korupsi termasuk namun tidak terbatas dalam hal:

1. Tanggung jawab barang dan/atau jasa
2. Kesehatan dan keselamatan konsumen
3. Informasi barang dan/atau jasa
4. Pengaduan Konsumen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sarana:

*Customer* dapat menyampaikan pengaduannya melalui beberapa sarana yang tersedia:

- Telepon ke *Call Center* di nomor 1500481
- Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Cabang Asuransi Bintang terdekat
- Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Pusat Asuransi Bintang
- Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (APPK)
- *SMS Center* di nomor 0838 888 4581
- *Email* di alamat [cs@asuransibintang.com](mailto:cs@asuransibintang.com)
- Media sosial Facebook dan Twitter

b. Cara Penanggulangan atas pengaduan konsumen terdiri dari 2 cara yaitu:

- Penanggulangan atas pengaduan konsumen secara langsung:
  - ◊ Validasi atas data yang diterima/disampaikan oleh *customer*
  - ◊ Penelusuran data internal, di bagian terkait, sesuai pengaduan yang disampaikan
  - ◊ Pengajuan pengaduan dari *Customer Service* ke bagian terkait untuk pengambilan keputusan
  - ◊ Konfirmasi dari *Customer Service* ke customer mengenai keputusan yang diberikan atas pengaduannya
- Penanggulangan atas pengaduan konsumen melalui APPK OJK:
  - ◊ Customer membuka web browse baik menggunakan Google Chrome atau Mozilla dan pastikan terhubung ke internet dan memasukan link APPK yaitu <https://kontak157.ojk.go.id>
  - ◊ Customer melakukan pengisian pengajuan pengaduan sesuai arahan aplikasi dan customer akan mendapatkan pin/tiket layanan dari APPK, Pin tersebut akan digunakan untuk cek status pengaduan

Code of Ethics of PT Asuransi Bintang Tbk set outs Policies and procedures to avoid corruption and corrupt practices, including but not limited to:

1. Product and/or service responsibilities
2. Consumer health and safety
3. Information on goods and/or services
4. Consumer Complaints, with the following explanation:

a. Facilities:

Customers can submit their complaints through the available facilities:

- Call the Call Center at 1500481
- Telephone/come (Walk In) to the nearest Asuransi Bintang Branch Office
- Telephone/come (Walk In) to Asuransi Bintang Headquarter
- Consumer Protection app of OJK
- SMS Center at 0838 888 4581
- Email at [cs@asuransibintang.com](mailto:cs@asuransibintang.com)
- Facebook, Twitter social media

b. Handling of consumer complaints consists of two methods:

- Direct handling:
  - ◊ Validation of data received/submitted by the customer
  - ◊ Internal data searches, in the relevant section, according to complaints submitted
  - ◊ Submission of complaints from Customer Service to the relevant section for decision making
  - ◊ Confirmation from Customer Service to the customer regarding the decision given for the complaint
- Through consumer report via Consumer Protection Portal Application :
  - ◊ Customer opens a preferred web browser and is connected to the internet to look up app link at: <https://kontak157.ojk.go.id>
  - ◊ Customer fills out a complaint form as per the directives on the app and customer will obtain a pin/service ticket from the app, to be used upon checking on the status of complaints.



### Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

Code of Ethics and Code of Conducts

- ◇ Perusahaan akan melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Customer
  - ◇ Perusahaan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima
- c. Jumlah Pengaduan konsumen hingga 31 Desember 2021 adalah 37 pengaduan.
- ◇ The Company will verify by reviewing completeness of documents submitted by the customer.
  - ◇ The Company will follow-up and settle the complaint verbally no more than five business days and in written form no more than twenty business days since the receipt date of the complaints.
- c. Total of customer complaints until December 31, 2021 was 37.



## Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

### Employee/Management Share Ownership Program

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

For the period ended December 31, 2021, the Company did not offer ESOP/MSOP.

## Kebijakan Pengungkapan Informasi

### Information Disclosure Policy

Sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka atas kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.04/2017 concerning Ownership Report or Any Change in Share Ownership of a Public Company, a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners is required to report to the Financial Services Authority on ownership and any change in ownership of shares of a Public Company, either directly or indirectly. The said report must be submitted no later than 10 (ten) days after the ownership or change occurs.

In addition to the provisions for reporting to the Financial Services Authority, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are also required to submit information to the Public Company regarding ownership and any changes in ownership of the shares of the Public Company. The information is submitted no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of the shares of the Public Company.

For the period ended December 31, 2021, there was no change in ownership of the shares of the Public Company to the ownership of shares of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



## Kebijakan Whistleblowing Whistleblowing Policy

Perusahaan menyadari pentingnya Kebijakan *Whistleblowing* untuk meningkatkan dan mempertahankan kesesuaian perilaku karyawan, dimana ini merupakan bagian dari pengendalian internal atas kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan Perusahaan dan penyalahgunaan wewenang.

Perusahaan memiliki Kebijakan *Whistleblowing* sebagai sarana untuk mendorong Insan Perusahaan agar melaporkan pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dalam lingkungan internal Perusahaan.

### TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

### Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui jalur *whistleblower* meliputi hal-hal berikut:

- *Fraud*
- Pelanggaran hukum
- Pelanggaran peraturan perusahaan
- Pelanggaran kode etik
- Pelanggaran benturan kepentingan
- Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu

### Mekanisme Sistem Pengaduan

Seseorang yang menjadi *whistleblower* harus memiliki dasar bahwa yang dilaporkan telah ikut ambil bagian dalam tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Seluruh laporan yang masuk ke dalam sarana *whistleblower* akan ditindaklanjuti dan Perusahaan akan merahasiakan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi pelapor.

### Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

The company realizes the importance of Whistleblowing Policy to improve and maintain the behavior of employees, which is part of internal control over compliance with the Code of Ethics and Code of Conduct, especially in reducing the risk of non-compliance with Company regulations and abuse of authority.

The company has a Whistleblowing Policy as a means to encourage Company Individuals to report violation and/or fraud occurring within the Company's internal environment.

### THE OBJECTIVES OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. As a tool for whistle-blower to report fraudulent acts, violation to laws, company regulations, Code of Ethics and Code of Conduct, and conflicts of interest without worries or fear as the confidentiality of the report is guaranteed.
2. To detect and prevent frauds as early as possible

### Type of Complaints

The type of complaints that can be filed through the whistleblower channel includes the following:

1. Fraud
2. Violation of laws
3. Violation of company regulations
4. Violation of code of ethics
5. Violation of conflicts of interest
6. Other things similar to it.

### Complaint-Reporting System Mechanism

A whistleblower must have proof that those reported have taken part in the violation of Code of Ethics and Code of Conduct. All incoming reports on the whistleblower facility will be followed up and the Company will keep the whistleblower's identity confidential and provide protection for the whistleblower.

### Protection for Whistleblower

For reports proven to be true, the Company will provide protection to the whistleblowers.



Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

### Penanganan Pengaduan

1. Setiap proses penanganan laporan pengungkapan kejadian indikasi *fraud* merupakan kewenangan pengelola *Whistleblowing System* yang dilakukan oleh Direksi, Legal & Corporate Secretary dan Audit Internal.
2. Untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor, setiap nama pelapor akan digunakan anonym/ nama alias.
3. Bilamana diperlukan akan dilakukan investigasi lebih lanjut.
4. Fasilitas/media saluran penyampaian pelaporan pelanggaran bersifat independen, bebas dan rahasia
5. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

Efektivitas penerapan *Whistleblowing System* dikelola oleh satuan unit Legal & Corporate Secretary dan Audit Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi.

### Sarana Pengaduan

- Perusahaan telah membuka sarana pengaduan pada alamat email *bintang.bersih@asuransibintang.com*
- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada pengaduan yang masuk dan diproses oleh Perseroan, maka dengan demikian tidak ada tindak lanjut pengaduan yang dilakukan Perseroan.

Protection for whistleblowers includes:

1. confidentiality guarantee of the whistleblower's identity and the contents of the report submitted;
2. Protection guarantees against treatment that may cause disadvantages to the whistleblowers;
3. Protection guarantees against possible threats, intimidation, punishment, or unpleasant actions from the reported party.

### Complaint Handling

1. Each process of handling reports on disclosure of fraud indications is the authority of the Whistleblowing System Manager, which is carried out by the Board of Directors, Legal & Corporate Secretary and Internal Audit.
2. To ensure the confidentiality of the reporter's identity, each whistleblower's name will be used anonymously/aliased.
3. If necessary, further investigation will be carried out.
4. Facilities/media for reporting violations are independent, free and confidential
5. If, based on the results of the investigation, it is proven that the reported party committed fraud/violation, the decision-making Officials will impose sanctions in accordance with applicable regulations.

### Complaints Managing Parties

The effectiveness of the implementation of the Whistleblowing System is managed by the Legal & Corporate Secretary and Internal Audit units who are responsible directly to the Board of Directors.

### Complaint-Reporting Facility

- The company has opened a complaint-reporting facility through the email address *bintang.bersih@asuransibintang.com*
- As of December 31, 2021, there were no complaints that entered to and processed by the Company, therefore there was no follow up on complaints made by the Company.



## Kebijakan Anti Korupsi Anticorruption Policy

Dalam upaya melaksanakan pencegahan tindakan fraud, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan korupsi, penyuapan, dan gratifikasi, Perusahaan telah memiliki Program Penerapan dan Strategi Anti fraud.

Upaya yang dilakukan dalam penerapan anti fraud di perusahaan meliputi antara lain.

1. Tindakan Pencegahan  
Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara membangun budaya dan kepedulian terhadap anti fraud disetiap jenjang di perusahaan, menandatangani pakta integritas, pelaksanaan *know your employee* atau screening pada saat proses rekrutmen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional,
2. Deteksi  
Perusahaan memiliki sistem whistleblowing sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu unit internal audit juga melakukan proses surprise audit sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan internal audit. Surveillance audit juga secara rutin dilakukan yang merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi  
Perusahaan telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Investigasi sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan fraud perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal dapat disimpulkan terjadi fraud yang dilakukan oleh pegawai maka laporan akan ditindaklanjuti oleh Human Resources Group dan Unit Legal dan selanjutnya penanganan kasus dilaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan-tindakan dan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut  
Efektivitas pelaksanaan strategi anti fraud selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh informasi/ data kejadian fraud didokumentasikan, dipelihara sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan

In an effort to prevent fraud, including but not limited to: acts of corruption, bribery, and gratification, the Company has an Anti-Fraud Strategy and Implementation Program.

Efforts made in the application of anti-fraud in the company includes:

1. Precautions  
Preventive actions are taken by building a culture and awareness of anti-fraud at every level in the company, signing an integrity pact, implementing "know your employee" or screening during the recruitment process, supervising the implementation of operational systems and procedures,
2. Detect  
The company has a whistleblowing system as a channel for reporting and conveying aspirations that is safe and guaranteed to be confidential. In addition, the internal audit unit also conducts a sudden audit process as part of the implementation of the internal audit policy. Surveillance audits are also routinely carried out which is an act of testing or inspection carried out without being known or realized by the party being tested or examined.
3. Investigation, Reporting and Sanctions  
The Company has established an Investigation Policy and Procedure as a reference on its implementation. Several factors are considered whether a suspected fraud needs to be investigated or not based on certain criteria. In the event that it can be concluded that there was a fraud committed by an employee, the report will be followed up by the Human Resources Group and the Legal Unit and subsequently the handling of the case is reported to the Board of Directors for actions and sanctions to be taken.
4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up  
The effectiveness of the implementation of the anti-fraud strategy is always monitored and evaluated, so that any deficiencies in program implementation can be corrected, and the program can run effectively and efficiently. All information/data on fraud incidents are documented, maintained as material for periodic evaluations and improvement efforts

